



LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016



**Alamat : Jl. RTA Milono No. 09
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
website : www.pt-palangkaraya.go.id**



KATA PENGANTAR

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH



Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Banding dengan wilayah yurisdiksi cukup luas yaitu 8 Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah pada tahun 2016 telah melakukan program kerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas pendukung. Untuk melihat secara rinci pelaksanaan program kerja dimaksud akan disajikan dalam laporan tahunan ini.

Laporan tahunan ini sebagai rangkuman dari seluruh kegiatan kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah. Walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana, kuantitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang ada pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah namun atas kerja sama yang baik dari semua pihak, Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan.

Selaku pimpinan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah, atas pengabdian terbaik yang telah ditunjukkan



dalam pelaksanaan tugas selama ini. Semoga semua kerja keras kita dalam rangka mengemban visi dan misi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, yang menjadi dambaan kita bersama.

Palangka Raya, **13** Januari 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH,



H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H

NIP. 19540314 198403 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	<i>i</i>
Daftar Isi	<i>iii</i>
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi)	9
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)	11
1. Eselon II	11
2. Eselon III	14
3. Eselon IV	17
4. Fungsional	21
5. Staf	24
B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	29
1. Eselon II	29
2. Eselon III	29
3. Eselon IV	29
4. Fungsional	30
5. Staf	30
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan	31
A. Sumber Daya Manusia	31
1. Profil Sumber Daya Manusia	31
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	33
3. Mutasi	34
4. Promosi	42
5. Pensiun	45
B. Keadaan Perkara	46
1. Rekapitulasi Perkara	46
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis	84
3. Putusan yang diajukan Banding	84
4. Putusan yang diajukan Kasasi	94
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	97
D. Pengelolaan Keuangan	122
1. DIPA BUA	125
2. DIPA BADILUM	138
E. Dukungan Teknologi Informasi	142

F. Regulasi Tahun 2015	144
- Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu	144
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area	146
1. Manajemen Perubahan	147
2. Perundang-undangan	147
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	148
4. Penataan Tata Laksana	148
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	148
6. Penguatan Akuntabilitas	148
7. Penguatan Pengawasan	149
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	149
Bab IV Pengawasan	150
A. Internal	150
B. Evaluasi	154
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi	163

1

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Dalam sistem ketatanegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum diselenggarakan oleh Satuan Kerja (Satker) lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang pembentukannya diatur dalam Undang-Undang, dimana Pengadilan Negeri berkedudukan di wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota dan Pengadilan Tinggi berkedudukan di wilayah administrasi pemerintahan provinsi yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama yang dikenal dengan prinsip independensi.



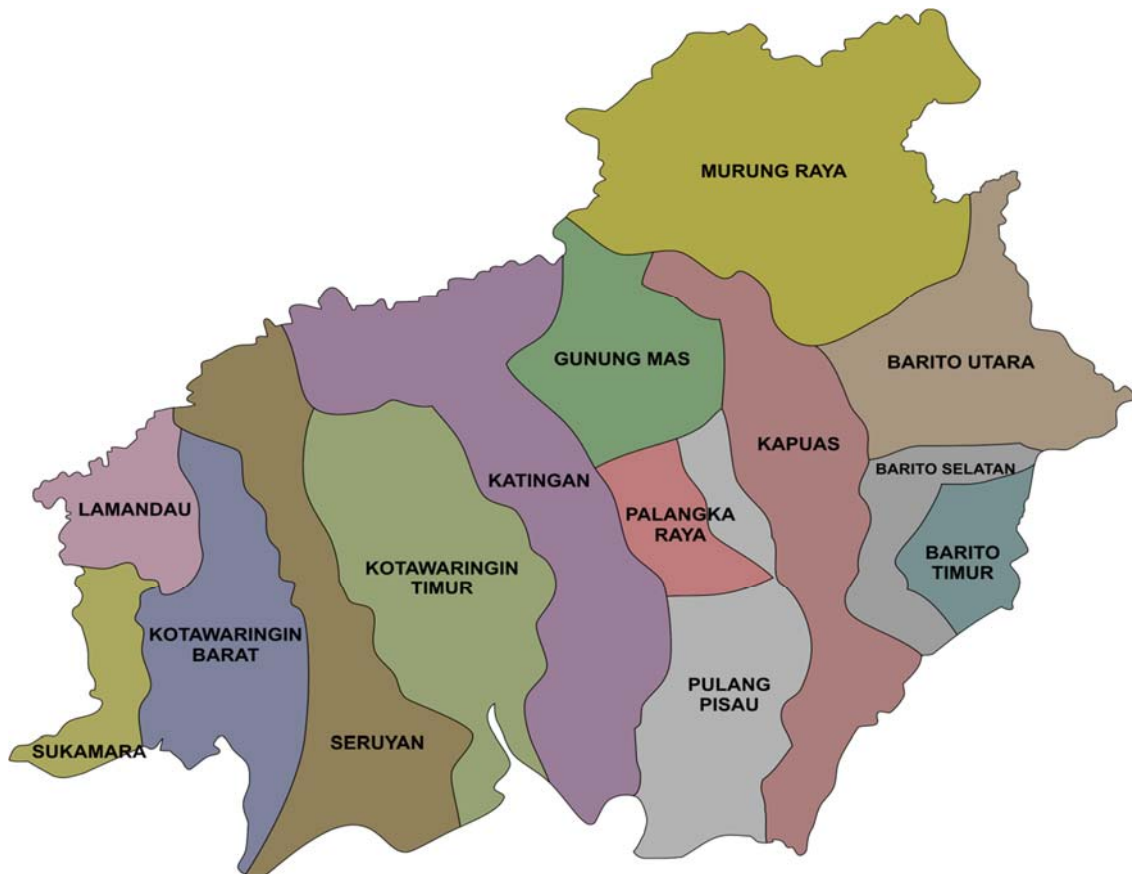
Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain *Universal declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant On Civil and Political Right* (pasal 14), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1980 membawahi 7 (tujuh) Peradilan Tingkat Pertama yaitu:

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya meliputi wilayah hukum Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas;
2. Pengadilan Negeri Sampit meliputi wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan;
3. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas meliputi wilayah hukum Kabupaten Kuala Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau;

4. Pengadilan Negeri Buntok meliputi wilayah hukum Kabupaten Barito Selatan;
5. Pengadilan Negeri Muara Teweh meliputi wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
6. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara;
7. Pengadilan Negeri Tamiang Layang meliputi wilayah hukum Kabupaten Barito Timur;
8. Pengadilan Negeri Kasongan meliputi wilayah hukum Kabupaten Katingan.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkarayang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- 2) **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).



4) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5) **Fungsi Lainnya :**

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

B. VISI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Penjelasan

1. Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kata Badan Peradilan digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dsb;
2. Indonesia, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Mahkamah Agung;
3. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi Pengadilan Tinggi Palangka Raya merujuk pada TAP MPR No.7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.

C. MISI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

D. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Palangka Raya berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Tabel 11. Tujuan, Indikator dan Target

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	20%
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	5%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	10%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	20%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	90%
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001	25%

Sesuai dengan riviur Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi,



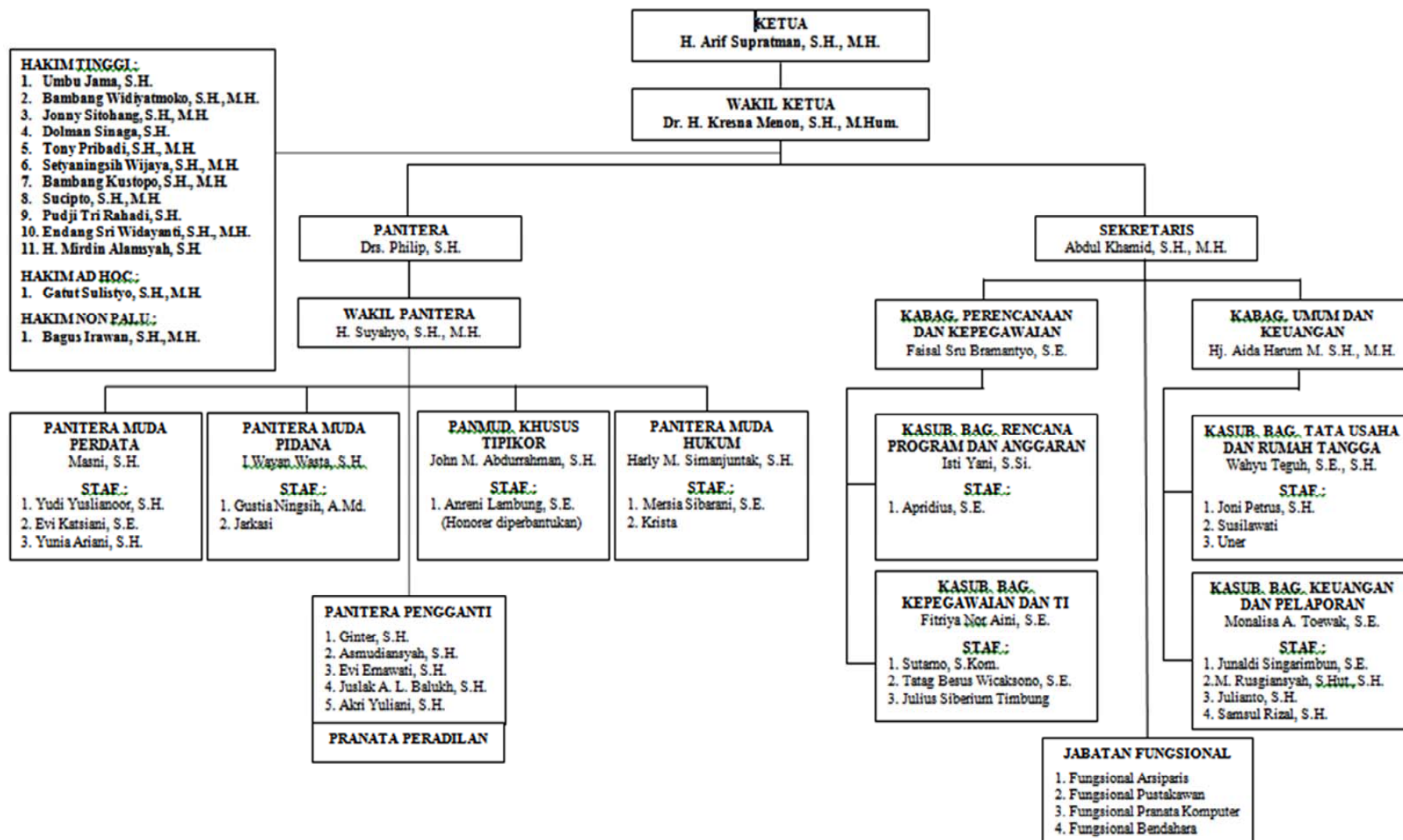
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel,
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal,
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif,
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

2

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah telah berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya



A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan untuk melaksanakan penyelenggaraan aktifitas organisasi yang memuat apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain :

1. Untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian.
3. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas umum di bidang peradilan.
5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur peradilan secara proporsional.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebanyak 92 (sembilan puluh dua) SOP. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Palangka Raya mulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV, Pejabat Fungsional sampai kepada Staf. SOP-SOP tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai dengan kewenangannya.

- ESELON II

✓ Panitera

1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Banding
2. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Perdata Banding
3. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding ke PN Pengaju
4. SOP Pencatatan Keuangan Biaya Perkara Perdata Banding
5. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata
6. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding



7. SOP Penerimaan Berkas Perkara Pidana Banding
8. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara Pidana Banding
9. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Banding ke PN Pengaju
10. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP)
11. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)
12. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP)
13. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
14. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim
15. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding
16. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana TIPIKOR ke PN Pengaju
17. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan TIPIKOR
18. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
19. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
20. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan
21. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester
22. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
23. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus
24. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan
25. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan
26. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran
27. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan
28. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus
29. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan



30. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan
31. SOP Penanganan Meja Informasi
32. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan
33. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat
34. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian
35. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit

✓ **Sekretaris**

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga
2. SOP Pelaporan Monev BAPPENAS
3. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan
4. SOP Revisi DIPA Kewenangan Eselon I
5. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6. SOP Pengelolaan Website
7. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting
8. SOP Absensi
9. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
10. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
11. SOP Usul Jabatan dan Mutasi
12. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
13. SOP Pembuatan SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi yang Menjadi Kewenangan KPT
14. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Pegawai
15. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
16. SOP Pembuatan Surat Ijin Cuti
17. SOP Pembuatan Surat Tugas
18. SOP Usul Pensiun



19. SOP Pelaksanaan Pelantikan WKPT / KPN / Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional/PNS
20. SOP Pengajuan Pembayaran Langsung
21. SOP Belanja Pegawai
22. SOP Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima
23. SOP Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
24. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
25. SOP Laporan Keuangan SAIBA Tingkat Satuan Kerja
26. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Satuan Kerja
27. SOP Penyerapan Anggaran Bulanan
28. SOP Pengelolaan Surat Masuk
29. SOP Pengelolaan Pemeliharaan Aset BMN
30. SOP Pembayaran Tagihan (Listrik, Telepon, Air dan Pos)

- ESELON III

✓ Wakil Panitera

1. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding ke PN Pengaju
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata
3. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding
4. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara Pidana Banding
5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Banding ke PN Pengaju
6. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP)
7. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)
8. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP)
9. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana



10. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim
 11. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding
 12. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana TIPIKOR ke PN Pengaju
 13. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan TIPIKOR
 14. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
 15. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
 16. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan
 17. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester
 18. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
 19. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus
 20. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan
 21. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan
 22. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran
 23. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan
 24. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus
 25. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan
 26. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan
 27. SOP Penanganan Meja Informasi
 28. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan
 29. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat
 30. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian
 31. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- ✓ **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
 2. SOP Pelaporan Monev BAPPENAS



3. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan
4. SOP Revisi DIPA Kewenangan Eselon I
5. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6. SOP Pengelolaan Website
7. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting
8. SOP Absensi
9. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
10. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
11. SOP Usul Jabatan dan Mutasi
12. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
13. SOP Pembuatan SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi yang Menjadi Kewenangan KPT
14. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Pegawai
15. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
16. SOP Pembuatan Surat Ijin Cuti
17. SOP Pembuatan Surat Tugas
18. SOP Usul Pensiun
19. SOP Pelaksanaan Pelantikan WKPT / KPN / Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional/PNS

✓ **Kepala Bagian Umum dan Keuangan**

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah
2. SOP Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima
3. SOP Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
4. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Wilayah
5. SOP Penyerapan Anggaran Bulanan
6. SOP Penginputan di Aplikasi KOMDANAS
7. SOP Pengelolaan Surat Masuk



8. SOP Pengelolaan Surat Keluar

- **ESELON IV**

✓ **Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran**

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
2. SOP Pelaporan Monev BAPPENAS
3. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan
4. SOP Revisi DIPA Kewenangan Eselon I
5. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

✓ **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**

1. SOP Pengelolaan Website
2. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting
3. SOP Absensi
4. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
5. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
6. SOP Usul Jabatan dan Mutasi
7. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
8. SOP Pembuatan SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi yang Menjadi Kewenangan KPT
9. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Pegawai
10. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
11. SOP Pembuatan Surat Ijin Cuti
12. SOP Pembuatan Surat Tugas
13. SOP Usul Pensiun
14. SOP Pelaksanaan Pelantikan WKPT / KPN / Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional/PNS

✓ **Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk



2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Pengiriman Surat
4. SOP Pengelolaan Pemeliharaan Aset BMN
5. SOP Pembayaran Tagihan (Listrik, Telepon, Air dan Pos)
6. SOP Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kantor
7. SOP Pelaksanaan Keamanan Lingkungan Kantor
8. SOP Pengelolaan Barang Persediaan
9. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
10. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
11. SOP Pengadministrasian Perpustakaan

✓ **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan**

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah
2. SOP Pengajuan Pembayaran Langsung
3. SOP Belanja Pegawai
4. SOP Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima
5. SOP Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
6. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
7. SOP Laporan Keuangan SAIBA Tingkat Satuan Kerja
8. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Wilayah
9. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Satuan Kerja
10. SOP Penyerapan Anggaran Bulanan
11. SOP Penginputan di Aplikasi KOMDANAS

✓ **Panitera Muda Perdata**

1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Banding
2. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Perdata Banding
3. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Banding



4. SOP Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perdata
5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding ke PN Pengaju
6. SOP Pencatatan Keuangan Biaya Perkara Perdata Banding
7. SOP Mekanisme Pelaporan dan *Upload* Keuangan Perkara Perdata Banding pada Aplikasi KOMDANAS
8. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata
9. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata

✓ **Panitera Muda Pidana**

1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Pidana Banding
2. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding
3. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara Pidana Banding
4. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Banding ke PN Pengaju
5. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP)
6. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)
7. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP)
8. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
9. SOP Pengarsipan dan Pengiriman berkas ke Kepaniteraan Hukum

✓ **Panitera Muda Khusus Tipikor**

1. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim
2. SOP Penerimaan Berkas Perkara TIPIKOR Banding
3. SOP Pendaftaran Berkas Perkara TIPIKOR Banding
4. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding
5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana TIPIKOR ke PN Pengaju
6. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN



7. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara TIPIKOR Banding
8. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
9. SOP Pengarsipan dan Pengiriman berkas ke Kepaniteraan Hukum

✓ **Panitera Muda Hukum**

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
3. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
4. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan
5. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester
6. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
7. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus
8. SOP Penanganan Papan Informasi Perkara
9. SOP Pembuatan Penataan Arsip Berkas Perkara In Aktif
10. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan
11. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan
12. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran
13. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan
14. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus
15. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Denda Tipiring Pidana
16. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Keuangan Perdata
17. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan
18. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan
19. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan
20. SOP Penanganan Meja Informasi



21. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan
22. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat
23. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian
24. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit

- FUNGSIONAL

✓ Ketua

1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Perdata Banding
2. SOP Mekanisme Pelaporan dan *Upload* Keuangan Perkara Perdata Banding pada Aplikasi KOMDANAS
3. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding
4. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP)
5. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)
6. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP)
7. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
8. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim
9. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan TIPIKOR
10. SOP Pengelolaan Website
11. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting
12. SOP Absensi
13. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
14. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
15. SOP Usul Jabatan dan Mutasi
16. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
17. SOP Pembuatan SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi yang Menjadi Kewenangan KPT



18. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Pegawai
19. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
20. SOP Pembuatan Surat Ijin Cuti
21. SOP Pembuatan Surat Tugas
22. SOP Usul Pensiun
23. SOP Pelaksanaan Pelantikan WKPT / KPN / Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional/PNS
24. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Wilayah
25. SOP Penyerapan Anggaran Bulanan
26. SOP Pengelolaan Surat Masuk (Surat-surat umum)
27. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
28. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan
29. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester
30. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
31. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus
32. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan
33. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan
34. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran
35. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan
36. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus
37. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan
38. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan
39. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan
40. SOP Penanganan Meja Informasi
41. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan



42. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat
43. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian
44. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit

✓ **Wakil Ketua**

1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Perdata Banding
2. SOP Mekanisme Pelaporan dan *Upload* Keuangan Perkara Perdata Banding pada Aplikasi KOMDANAS
3. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding
4. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP)
5. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)
6. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP)
7. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
8. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim
9. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan TIPIKOR
10. SOP Usul Jabatan dan Mutasi
11. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
12. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan
13. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester
14. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
15. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus
16. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan
17. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan
18. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran
19. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan



20. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus
21. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan
22. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan
23. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan
24. SOP Penanganan Meja Informasi
25. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan
26. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat
27. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian
28. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit

✓ **Hakim**

1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding
2. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)
3. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP)
4. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim

✓ **Panitera Pengganti**

1. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara Pidana Banding
2. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)
3. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding

- **STAF**

✓ **Staf Kepaniteraan Perdata**

1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Banding
2. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Perdata Banding
3. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Banding
4. SOP Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perdata



5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding ke PN Pengaju
6. SOP Pencatatan Keuangan Biaya Perkara Perdata Banding
7. SOP Mekanisme Pelaporan dan *Upload* Keuangan Perkara Perdata Banding pada Aplikasi KOMDANAS
8. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata
9. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata

✓ **Staf Kepaniteraan Pidana**

1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Pidana Banding
2. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Banding
3. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara Pidana Banding
4. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Banding ke PN Pengaju
5. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHAP)
6. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT (Pasal 27 Ayat (2) KUHAP)
7. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara Pidana Banding (Pasal 27 Ayat (1) KUHAP)
8. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
9. SOP Pengarsipan dan Pengiriman berkas ke Kepaniteraan Hukum

✓ **Staf Kepaniteraan Khusus Tipikor**

1. SOP Pelimpahan Berkas Perkara TIPIKOR Banding ke Majelis Hakim
2. SOP Penerimaan Berkas Perkara TIPIKOR Banding
3. SOP Pendaftaran Berkas Perkara TIPIKOR Banding
4. SOP Penyelesaian Administrasi Perkara TIPIKOR Banding
5. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana TIPIKOR ke PN Pengaju
6. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dari PN
7. SOP Penyelesaian Penetapan Perpanjangan Penahanan PT



8. SOP Penyelesaian Penetapan Penahanan Perkara TIPIKOR Banding
9. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Kepaniteraan TIPIKOR
10. SOP Pengarsipan dan Pengiriman berkas ke Kepaniteraan Hukum

✓ **Staf Kepaniteraan Hukum**

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum
3. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
4. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Triwulan
5. SOP Pembuatan Laporan Pengaduan Semester
6. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
7. SOP Pembuatan Laporan Pidana Khusus
8. SOP Penanganan Papan Informasi Perkara
9. SOP Pembuatan Penataan Arsip Berkas Perkara In Aktif
10. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Bulanan
11. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Caturwulan
12. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Semesteran
13. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Tahunan
14. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Pidana Khusus
15. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Denda Tipiring Pidana
16. SOP Penanganan Surat Masuk Klasifikasi Laporan Keuangan Perdata
17. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan
18. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan
19. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan
20. SOP Penanganan Meja Informasi
21. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan



22. SOP Penanganan Permohonan Pelantikan Advokat
23. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian
24. SOP Penanganan Permohonan Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit

✓ **Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran**

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
2. SOP Pelaporan Monev BAPPENAS
3. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan
4. SOP Revisi DIPA Kewenangan Eselon I
5. SOP Revisi DIPA Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

✓ **Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**

1. SOP Pengelolaan Website
2. SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting
3. SOP Absensi
4. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
5. SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis
6. SOP Usul Jabatan dan Mutasi
7. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
8. SOP Pembuatan SK Kenaikan Pangkat dan Mutasi yang Menjadi Kewenangan KPT
9. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Pegawai
10. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
11. SOP Pembuatan Surat Ijin Cuti
12. SOP Pembuatan Surat Tugas
13. SOP Usul Pensiun
14. SOP Pelaksanaan Pelantikan WKPT / KPN / Pejabat Struktural / Pejabat Fungsional/PNS



✓ **Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Pengiriman Surat
4. SOP Pengelolaan Pemeliharaan Aset BMN
5. SOP Pembayaran Tagihan (Listrik, Telepon, Air dan Pos)
6. SOP Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kantor
7. SOP Pelaksanaan Keamanan Lingkungan Kantor
8. SOP Pengelolaan Barang Persediaan
9. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
10. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
11. SOP Pengadministrasian Perpustakaan

✓ **Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan**

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah
2. SOP Pengajuan Pembayaran Langsung
3. SOP Belanja Pegawai
4. SOP Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima
5. SOP Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
6. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
7. SOP Laporan Keuangan SAIBA Tingkat Satuan Kerja
8. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Wilayah
9. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Tingkat Satuan Kerja
10. SOP Penyerapan Anggaran Bulanan
11. SOP Penginputan di Aplikasi KOMDANAS



B. KINERJA/ SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian Prestasi Kerja PNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan Pejabat Penilai. Mulai tahun 2014 dari Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sampai tataran staf membuat SKP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

SKP Tahun 2016 yang telah disusun dan ditandatangani Atasan Langsung adalah :

NAMA JABATAN	JUMLAH SKP (dokumen)
Ketua	1
Wakil Ketua	1
Hakim Tinggi	11
Hakim Ad Hoc TIPIKOR	1
Hakim Non Palu	1

- ESELON II

SKP Eselon II berjumlah 2 (dua) dokumen yaitu SKP Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan SKP Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- ESELON III

SKP Eselon III/setara Eselon III berjumlah 3 (tiga) dokumen yaitu SKP Wakil Panitera, SKP Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan SKP Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

- ESELON IV

SKP Eselon IV/setara Eselon IV berjumlah 8 (delapan) dokumen yaitu SKP Panitera Muda Perdata, SKP Panitera Muda Pidana, SKP Panitera Muda Khusus Tipikor, SKP Panitera Muda Hukum, SKP Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, SKP Kepala Sub



Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, SKP Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta SKP Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

- **FUNGSIONAL**

SKP Fungsional berjumlah 5 (lima) dokumen yaitu SKP Panitera Pengganti yang berjumlah 5 (lima) orang.

- **STAF**

SKP Staf berjumlah 18 (delapanbelas) dokumen yaitu 1 (satu) SKP Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, 3 (tiga) SKP Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, 3 (tiga) SKP Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, 4 (empat) SKP Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, 3 (tiga) SKP Staf Kepaniteraan Perdata, 2 (dua) SKP Staf Kepaniteraan Pidana dan 2 (dua) SKP Staf Kepaniteraan Hukum.



PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI dalam Bidang Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan fungsinya. Beberapa kewenangan dalam Bidang Kepegawaian itu antara lain mutasi, promosi dan pengusulan pensiun. Adapun rekapitulasi data mengenai kewenangan tersebut selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Profil Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2016 kekuatan sumber daya manusia di lingkungan peradilan umum se-Kalimantan Tengah mengalami tambah kurang berkaitan dengan adanya mutasi dan promosi keluar dan masuk dari dan keluar wilayah Kalimantan Tengah, sampai akhir tahun 2016 dapat dilihat profil sumber daya manusia aparatur Peradilan Umum Se-Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PERADILAN UMUM SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016
PER 30 DESEMBER 2016

N O	SATUAN KERJA	JUMLA H	GOLONGAN																PENDIDIKAN							
			I/ c	I/ d	II/ a	II/ b	II/ c	II/ d	III/ a	III/ b	III/ c	III/ d	IV/ a	IV/ b	IV/ c	IV/ d	IV/ e	JM L	S D	SLT P	SLT A	SM/D 3	S1	S 2	S 3	JM L
1	PT PALANGKA RAYA	50	0	0	1	1	2	1	7	7	4	8	1	3	0	13	2	50	0	0	5	2	29	13	1	50
2	PN PALANGKA RAYA	52	0	0	1	1	4	3	5	8	9	10	3	2	1	3	0	50	0	0	10	3	27	10	0	50
3	PN SAMPIT	31	0	0	0	0	1	3	3	7	6	7	2	2	0	0	0	31	0	0	4	1	17	9	0	31
4	PN PANGKALA NBUN	26	0	0	3	0	1	1	2	8	6	3	1	0	0	0	0	25	0	0	7	2	13	3	0	25
5	PN KUALA KAPUAS	28	0	0	0	3	0	0	3	10	6	4	1	1	0	0	0	28	0	0	7	0	18	3	0	28
6	PN MUARA TEWEH	23	1	0	2	1	1	1	2	9	1	4	1	0	0	0	0	23	0	1	8	0	9	5	0	23
7	PN BUNTOK	21	0	0	2	0	0	1	5	6	2	3	2	0	0	0	0	21	0	0	4	1	14	2	0	21
8	PN TAMIANG LAYANG	21	0	0	0	0	0	0	7	7	2	4	0	1	0	0	0	21	0	0	3	0	16	2	0	21
9	PN KASONGAN	26	0	0	0	0	2	0	8	7	6	1	2	0	0	0	0	26	0	0	2	1	22	1	0	26
JUMLAH		278	1	0	9	6	11	10	42	69	42	44	13	9	1	16	2	275	0	1	50	10	16 5	48	1	275



2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kelas Pengadilan dan volume perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah, maka kebutuhan sumber daya yang ada belum mencukupi. Berikut adalah perbandingan antara kebutuhan sumber daya manusia ideal dan riil di lingkungan Peradilan Negeri se-Kalimantan Tengah :

Formasi Ideal dan Riil Pegawai Pengadilan Tinggi Palangka Raya

NO	JABATAN	IDEAL	RIIL
1	Ketua	1	1
2	Wakil Ketua	1	1
3	Hakim Tinggi	23	11
4	Panitera	1	1
5	Sekretaris	1	1
6	Wakil Panitera	0	1
7	Kepala Bagian	2	2
8	Panitera Muda	3	3
9	Kepala Sub Bagian	2	1
10	Panitera Pengganti	4	4
11	Staf Kepaniteraan	32	5
12	Staf Kesekretariatan	15	7

Formasi Ideal Pegawai Pengadilan Negeri

NO	JABATAN	KLAS IA	KLAS IB	KLAS II
1	Ketua	1	1	1
2	Wakil Ketua	1	1	1
3	Hakim	23	14	11
4	Panitera	1	1	1
5	Sekretaris	1	1	1
6	Wakil Panitera	0	0	0
7	Panitera Muda	3	3	3
8	Kepala Sub Bagian	2	0	0



9	Panitera Pengganti	3	3	3
10	Juru Sita	32	20	16
11	Juru Sita Pengganti	5	4	3
12	Staf Kepaniteraan	10	8	6
13	Staf Kesekretariatan	12	9	6

Formasi Riil Pegawai Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah

NO	SATUAN KERJA	KLS	JABATAN												
			Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Panitera	Sekretaris	Wakil Panitera	Panitera Muda	Kepala Sub Bagian	Panitera Pengganti	Juru Sita	Juru Sita Pengganti	Staf Kepaniteraan	Staf Kesekretariatan
1	PN Palangka Raya	IA	1	1	8	1	1	0	4	3	10	3	4	6	7
2	PN Sampit	IB	1	1	7	1	1	1	3	2	6	2	2	1	2
3	PN Pangkalan Bun	II	1	1	4	1	1	0	2	2	7	1	0	3	3
4	PN Kuala Kapuas	II	1	1	5	1	1	1	3	3	7	2	1	0	2
5	PN Muara Teweh	II	1	1	3	1	1	1	2	3	2	1	0	4	3
6	PN Buntok	II	1	1	2	1	1	0	3	2	4	1	1	1	3
7	PN Tamiang Layang	II	1	1	2	1	1	0	3	3	4	1	0	3	1
8	PN Kasongan	II	1	1	4	1	1	0	3	3	6	1	0	2	2
JUMLAH			8	8	35	8	8	3	23	21	46	12	8	20	23

1. Data Mutasi, Promosi dan Pensiun Selama Tahun 2016

✓ MUTASI

1. MUTASI MASUK

a. Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	H. Arif Supratman, S.H., M.H.	WKPT Pontianak	KPT Palangka Raya
2	DR. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Jakarta	WKPT Palangka Raya
3	Bambang Widiyatmoko, S.H.,	Hakim Tinggi PT	Hakim Tinggi PT



	M.H.	Bengkulu	Palangka Raya
4	Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H.	Hakim PN Sidoarjo	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
5	Bambang Kustopo, S.H., M.H.	Hakim PN Jakarta Pusat	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
6	Sucipto, S.H., M.H.	Hakim PN Jakarta Barat	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
7	Pudji Tri Rahadi, S.H.	Hakim PN Jakarta Selatan	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
8	Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.	Hakim PN Sidoarjo	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
9	H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.	Hakim PN Medan	Hakim Tinggi PT Palangka Raya
10	Bagus Irawan, S.H., M.H.	Hakim PN Bekasi	Hakim Non Palu
11	Abdul Khamid, S.H., M.H.	Kabag. Umum dan Keuangan PT Surabaya	Sekretaris PT Palangka Raya
12	John Morton Abdurrahman, S.H.	Panitera PN Kasongan	Panmud. Khusus TIPIKOR PT Palangka Raya

b. Pengadilan Negeri Palangka Raya

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Parlas Nababan, S.H., M.H.	WKPN Palembang	KPN Palangka Raya
2	Kaswanto, S.H., M.H.	Hakim PN Jakarta Pusat	WKPN Palangka Raya
3	Etri Widayati, S.H., M.H.	Hakim PN Pati	Hakim PN Palangka Raya
4	Atok Dwinugroho, S.H.	Hakim PN Indramayu	Hakim PN Palangka Raya
5	H. M. Khusairi Anwar, S.H., M.H.	Panitera PN Mataram	Panitera PN Palangka Raya
6	Enan Sugiarto, S.H., M.H.	Hakim PN Tegal	Hakim PN Palangka Raya
7	Achmad Syahruiji, A.Md.	Staf PN Tamiang Layang	Staf PN Palangka Raya



8	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	Hakim PN Dumai	Hakim PN Palangka Raya
---	--------------------------------	----------------	------------------------

c. Pengadilan Negeri Sampit

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Buyung Dwikora, S.H., M.H.	WKPN Lubuk Linggau	KPN Sampit
2	Ike Iduri Mustika Sari, S.H., M.H.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Sampit
3	Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.	Hakim PN Sekayu	Hakim PN Sampit
4	Wardhanakusuma, S.H.	Staf Kepaniteraan Khusus Tipikor PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Sampit
5	M. Teguh, S.E., S.H., M.H.	Wakil Panitera PN Bengkulu	Panitera PN Sampit

d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Yelly Febdrianty, S.H.	Panitera Pengganti PN Ketapang	Panitera Pengganti PN Pangkalan Bun
2	Jurmani, S.H.	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang	Panmud. Perdata PN Pangkalan Bun
3	Eman Sulaiman, S.H.	Hakim PN Sumber	WKPN Pangkalan Bun
4	Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.	Hakim PN Martapura	Hakim PN Pangkalan Bun

e. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Emna Aulia, S.H.	Hakim PN Rantau	Hakim PN Kuala Kapuas
2	Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.	Hakim PN Pangkalan Bun	Hakim PN Kuala Kapuas



3	M. Fransyah Budinor, S.H.	Wakil Panitera PN Rantau	Panitera PN Kuala Kapas
---	---------------------------	-----------------------------	----------------------------

f. Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Fredy Tanada, S.H., M.H.	Hakim PN Putussibau	Hakim PN Muara Teweh
2	Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang	Panmud. Pidana PN Muara Teweh
3	Leon, S.H.	Wakil Panitera PN Kasongan	Panitera PN Muara Teweh

g. Pengadilan Negeri Buntok

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkal Pinang	WKPN Buntok
2	John Ricardo, S.H.	Hakim PN Tamiang Layang	Hakim Pn Buntok
3	Ika Melinda Meliala, S.H.	Staf PN Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Buntok
4	Lia Nova, S.H.	Staf PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Buntok
5	Patwiansyah, S.H.	Panmud. Hukum PN Tamiang Layang	Panmud. Pidana PN Buntok

h. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Maskur Hidayat, S.H., M.H.	Hakim PN Pamekasan	WKPN Tamiang Layang
2	Helka Rerung, S.H.	Hakim PN Barabai	Hakim PN Tamiang Layang
3	Matseman, S.H.	Wakil Panitera PN Buntok	Panitera PN Tamiang Layang
4	Riswan Adiputra, S.H.	Panitera Pengganti PN Kasongan	Panmud. Hukum PN Tamiang Layang



i. Pengadilan Negeri Kasongan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Gusti Risna Mariana, S.H.	Hakim PN Tamiang Layang	Hakim PN Kasongan
2	Juhriansyah, S.H.	Panitera PN Tamiang Layang	Panitera PN Kasongan
3	I Wayan Sugiartawan, S.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Kasongan
4	Jumiati, S.H.	Staf PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Kasongan

2. MUTASI KELUAR

a. Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Hesmu Purwanto, S.H., M.H.	KPT Palangka Raya	WKPT Semarang
2	P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Jambi
3	M. Najib Sholeh, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Samarinda
4	W. H. Van Keeken, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Palembang
5	Subyantoro, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Denpasar
6	Mulyanto, S.H.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
7	Setyawan Hartono, S.H., M.H.	WKPT Palangka Raya	WKPT Tanjung Karang
8	Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PT Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Tanjung Karang
9	Lia Nova, S.H.	Staf Kepaniteraan Pidana PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Buntok
10	Kusuma Ayu Riswahyuni, S.E.	Kasub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga PT Palangka Raya	Staf PN Karang Anyar



11	Wardhanakusuma, S.H.	Staf Kepaniteraan Khusus Tipikor PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Sampit
12	Jumiati, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Kasongan
13	Intan Widiastuti, S.H., M.Kn.	Hakim Ad Hoc TIPIKOR PT Palangka Raya	Hakim Ad Hoc TIPIKOR PT Surabaya

b. Pengadilan Negeri Palangka Raya

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Mulyanto, S.H., M.H.	KPN Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Pekanbaru
2	Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.	WKPN Palangka Raya	KPN Jayapura
3	Nurhayati Nasution, S.H., M.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Kuala Kapuas
4	I Wayan Sugiartawan, S.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Kasongan
5	Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.	Hakim PN Palangka Raya	Hakim PN Mataram
6	Rerung Patongloan, S.H., M.H.	Hakim PN Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Maluku Utara
7	Andi Hendrawan, S.H., M.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Kuala Tungkal
8	Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Sidrap
9	Baso Rasyid, S.H., M.H.	Panitera PN Palangka Raya	Panitera PN Makassar
10	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.	Jurusita PN Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang
11	Ika Melinda Meliala, S.H.	Staf Kepaniteraan Pidana PN Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Buntok



12	Tohiri Bin Asngat, S.H.	Wakil Panitera PN Palangka Raya	Panmud. Perdata PT Banten
----	-------------------------	------------------------------------	------------------------------

c. Pengadilan Negeri Sampit

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Hebbin Silalahi, S.H., M.H.	KPN Sampit	Hakim PN Jakarta Barat
2	Gabriel Sillagan, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	Hakim PN Bengkulu
3	Leo Sukarno, S.H.	Hakim PN Sampit	Hakim PN Ambon
4	Erianto Siagian, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	Hakim PN Palu
5	Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H.	Hakim PN Sampit	Hakim PN Sleman

d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Mohamad Zakiuddin, S.H.	Hakim PN Pangkalan Bun	Hakim PN Rangkas Bitung
2	Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.	Hakim PN Pangkalan Bun	Hakim PN Kuala Kapas
3	Titik Budi Winarti, S.H., M.H.	KPN Pangkalan Bun	Hakim PN Yogyakarta

e. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Lilie Fitri Handayani, S.H.	Hakim PN Kuala Kapas	Hakim PN Banjarbaru
2	H. Burhanuddin, S.H.	Panitera PN Kuala Kapas	Panitera PN Banjarbaru

f. Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Yacob Mahar, S.H.	Hakim PN Muara Teweh	Hakim PN Sambas
2	Banuwati, S.H.	Panitera PN Muara Teweh	Panitera Pengganti PT Banjarmasin



3	Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H.	Hakim PN Muara Teweh	Hakim PN Kotabaru
4	Falcon, S.H., M.H.	Hakim PN Muara Teweh	Staf Biro Perlengkapan MA-RI

g. Pengadilan Negeri Buntok

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Esthar Oktavi, S.H., M.H.	KPN Buntok	PN Denpasar
2	Matseman, S.H.	Wakil Panitera PN Buntok	Panitera PN Tamiang Layang
3	I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.	Hakim PN Buntok	Hakim PN Sumbawa Besar
4	Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.	Hakim PN Buntok	Hakim PN Marabahan
5	Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.	Hakim PN Buntok	Hakim PN Batu Licin

h. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Akhmad Fazrinoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H.	WKPN Tamiang Layang	KPN Masohi
2	GT. Risna Mariana, S.H.	Hakim PN Tamiang Layang	Hakim PN Kasongan
3	Jhon Ricardo, S.H.	Hakim PN Tamiang Layang	Hakim PN Buntok
4	Juhriansyah, S.H.	Panitera PN Tamiang Layang	Panitera PN Kasongan
5	Patwiansyah, S.H.	Panmud. Hukum PN Tamiang Layang	Panmud. Pidana PN Buntok
6	Jurmani, S.H.	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang	Panmud. Pidana PN Pangkalan Bun
7	Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang	Panmud. Muara Teweh PN Muara Teweh
8	Akhmad Syahruiji, A.Md.	Staf PN Tamiang Layang	Staf PN Palangka Raya



i. Pengadilan Negeri Kasongan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Judi Prasetya, S.H., M.H.	KPN Kasongan	KPN Lamongan
2	John Morton Abdurrahman, S.H.	Panitera PN Kasongan	Panmud. Khusus Tipikor PT Palangka Raya
3	Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.	Hakim PN Kasongan	Hakim PN Sampit
4	Leon, S.H.	Wakil Panitera PN Kasongan	Panitera PN Muara Teweh
5	Riswan Adiputra, S.H.	Panitera Pengganti PN Kasongan	Panmud. Hukum PN Tamiang Layang

✓ **PROMOSI**

a. Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Lia Nova, S.H.	Staf Kepaniteraan Pidana PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Buntok
2	Wardhanakusuma, S.H.	Staf Kepaniteraan Khusus Tipikor PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Sampit
3	Jumiati, S.H.	Staf Kepaniteraan Hukum PT Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Kasongan

b. Pengadilan Negeri Palangka Raya

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Mulyanto, S.H., M.H.	KPN Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Pekanbaru
2	Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.	WKPN Palangka Raya	KPN Jayapura
3	Nurhayati Nasution, S.H., M.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Kuala Kapuas



4	I Wayan Sugiartawan, S.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Kasongan
6	Rerung Patongloan, S.H., M.H.	Hakim PN Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Maluku Utara
7	Andi Hendrawan, S.H., M.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Kuala Tungkal
8	Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.	Hakim PN Palangka Raya	WKPN Sidrap
9	Baso Rasyid, S.H., M.H.	Panitera PN Palangka Raya Klas IA	Panitera PN Makassar Klas IA Khusus
10	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.	Jurusita PN Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Tamiang Layang
11	Ika Melinda Meliala, S.H.	Staf Kepaniteraan Pidana PN Palangka Raya	Panitera Pengganti PN Buntok
12	Tohiri Bin Asngat, S.H.	Wakil Panitera PN Palangka Raya	Panmud. Perdata PT Banten

c. Pengadilan Negeri Sampit

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru

d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., CN.	WKPN Pangkalan Bun	KPN Pangkalan Bun
2	Rosilawati, A.Md.	Staf PN Pangkalan Bun	Jurusita Pengganti PN Pangkalan Bun

e. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Mariatul Khiftiah	Staf PN Kuala Kapuas	Jurusita Pengganti PN Kuala Kapuas



f. Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru

g. Pengadilan Negeri Buntok

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Praditia Danindra, S.H., M.H.	WKPN Buntok	KPN Buntok
2	Matseman, S.H.	Wakil Panitera PN Buntok	Panitera PN Tamiang Layang
3	Chelvia, A.Md.	Staf PN Buntok	Jurusita Pengganti PN Buntok

h. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru

i. Pengadilan Negeri Kasongan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Ahmad Bukhori, S.H., M.H.	WKPN Kasongan	KPN Kasongan
2	John Morton Abdurrahman, S.H.	Panitera PN Kasongan	Panmud. Khusus Tipikor PT Palangka Raya
3	Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.	Hakim PN Kasongan Klas II	Hakim PN Sampit Klas IB
4	Leon, S.H.	Wakil Panitera PN Kasongan	Panitera PN Muara Teweh
5	Riswan Adiputra, S.H.	Panitera Pengganti PN Kasongan	Panmud. Hukum PN Tamiang Layang

✓ **PENSIUN**

a. Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	Remuddin Siringo, S.H.	Panitera Pengganti PT Palangka Raya	1 Oktober 2016 (BUP)

b. Pengadilan Negeri Palangka Raya

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
	NIHIL		

c. Pengadilan Negeri Sampit

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	Mardhiana	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan PN Sampit	1 September 2016 (BUP)

d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	Hj. Nursehan	Wakil Panitera PN Pangkalan Bun	1 Agustus 2016 (BUP)
2	Abdul Samad, S.H.	Panitera Muda Hukum PN Pangkalan Bun	31 Agustus 2016 (Pensiun karena Meninggal Dunia)

e. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	NIHIL		

f. Pengadilan Negeri Muara Teweh

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	NIHIL		

g. Pengadilan Negeri Buntok

No	Nama	Jabatan Lama	TMT Pensiun
----	------	--------------	-------------



1	Sukarni	Juru Sita PN Buntok	1 Mei 2016 (BUP)
2	Mariati	Panitera Pengganti PN Buntok	1 November 2016 (BUP)

h. Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	NIHIL		

i. Pengadilan Negeri Kasongan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	NIHIL		

B. Keadaan Perkara

1. REKAPITULASI PERKARA

A. INFORMASI PERKARA PIDANA

Perkara Pidana yang merupakan sisa perkara keseluruhan tahun 2015 berjumlah 436 perkara, perkara Pidana yang masuk selama tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah berjumlah 34.873 perkara, yang terdiri dari perkara pidana biasa, pidana singkat dan perkara khusus di luar tindak pidana korupsi (Tipikor) dan Pidana Anak berjumlah 2.708 perkara, perkara Tipikor berjumlah 62 perkara, perkara Pidana Anak berjumlah 101 perkara, sedangkan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) berupa pelanggaran lalu lintas berjumlah 32.002 perkara.

Selama tahun 2016, perkara pidana yang putus berjumlah 34.756, terdiri dari 2.598 perkara pidana biasa, singkat dan khusus diluar tipikor dan Pidana Anak, 58 perkara Tipikor, 98 perkara Pidana Anak dan 32.002 perkara Tipiring. Sehingga terdapat 574



perkara pidana biasa, pidana singkat dan khusus termasuk Tipikor dan Pidana Anak yang belum putus dan masih dalam proses.

1) Perkara Pidana Biasa dan Khusus diluar Perkara TIPIKOR, Pidana Anak dan Tipiring.

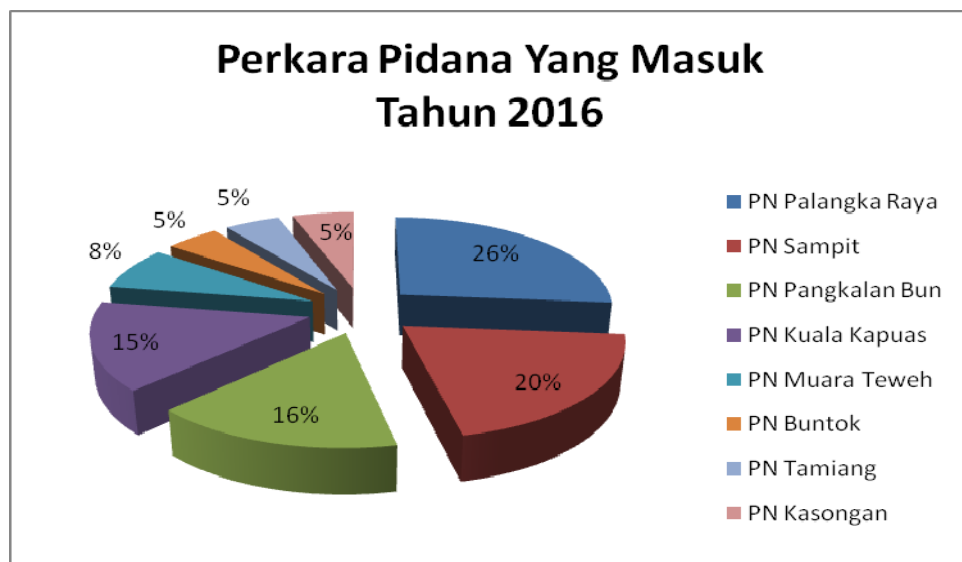
Perkara sisa tahun 2015 berjumlah 430 perkara. Perkara yang masuk berjumlah 2.708 perkara dan perkara yang telah diputus berjumlah 2.598 perkara. Persentase perkara terbanyak berasal dari Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan persentase perkara masuk adalah 26 %, sedangkan perkara yang paling sedikit berasal dari Pengadilan Negeri Buntok dengan persentase 5 % saja. Adapun distribusi perkara yang masuk dari tiap Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel 3.1.

No.	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2015	Perkara Pidana Yang Masuk selama tahun 2016	Perkara Pidana Yang Putus selama tahun 2016	Dicabut	Sisa Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PN Palangka Raya	47	714	691	0	70
2	PN Sampit	189	549	524	0	214
3	PN Pangkalan Bun	91	431	405	0	117
4	PN Kuala Kapuas	34	408	384	0	58
5	PN Muara Teweh	13	201	195	0	19
6	PN Buntok	12	128	132	0	8
7	PN Tamiang	18	131	127	0	22

8	PN Kasongan	26	146	140	0	32
J U M L A H		430	2,708	2,598	0	540

Tabel 3.1 Distribusi Perkara Pidana biasa dan khusus diluar perkara tipikor yang masuk dan putus selama tahun 2016

Jika digambarkan maka persentase perkara Pidana Biasa dan Khusus diluar Tipikor dan Pidana Anak yang masuk dapat dilihat pada diagram 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Persentase Perkara yang masuk

Sedangkan perbandingan perkara pidana yang putus tiap Pengadilan Negeri dapat digambarkan sesuai dengan diagram batang 3.2



Gambar 3.2 Diagram Perkara Pidana yang putus
berdasarkan Asal PN

2) Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Perkara Tipikor yang masuk berjumlah 62 perkara, sedangkan perkara sisa tahun 2015 berjumlah 5 perkara. Perkara Tipikor yang putus selama tahun 2016 berjumlah 58 perkara, dan 9 perkara yang belum putus. Distribusi perkara yang masuk tiap bulan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

No.	Pengadilan	Sisa Tahun 2015	Perkara Tipikor Yang Masuk selama tahun 2016	Perkara Tipikor Yang Putus selama tahun 2016	Dicabut	Sisa Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya	5	62	58	0	9

Tabel 3.2 Distribusi Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
yang masuk dan putus selama tahun 2016



3) Perkara Tindak Pidana Khusus Anak

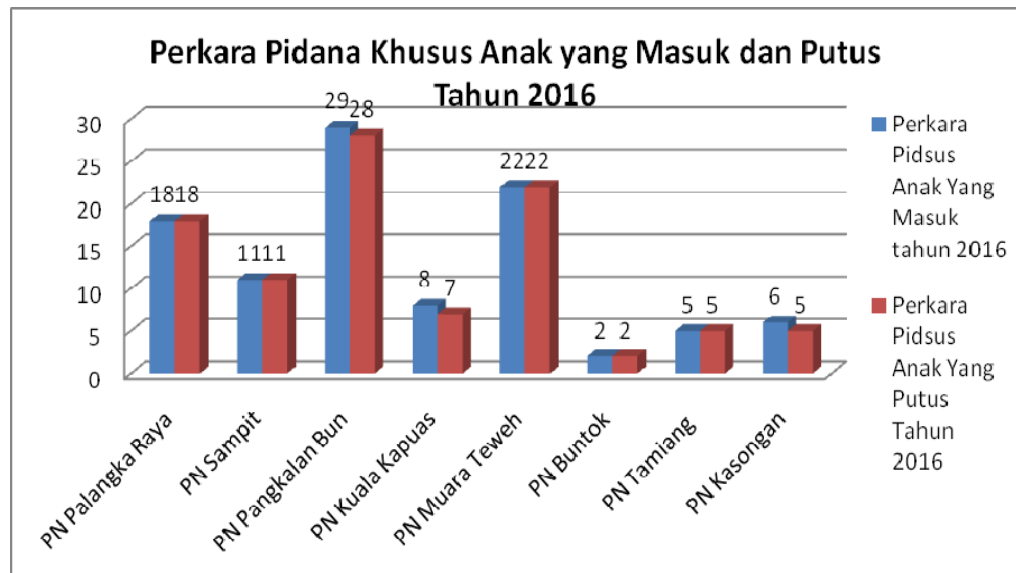
Perkara Tindak Pidana Khusus Anak yang masuk berjumlah 101 perkara, sedangkan perkara sisa tahun 2015 berjumlah 1 perkara. Perkara tindak pidana khusus anak yang putus selama tahun 2016 berjumlah 98 perkara, dan 4 perkara belum putus. Distribusi perkara yang masuk dari PN se-Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table 3.3.

No.	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2015	Perkara Pidana Anak Yang Masuk selama tahun 2016	Perkara Pidana Anak Yang Putus selama tahun 2016	Dicabut	Sisa Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PN Palangka Raya	1	18	18	0	1
2	PN Sampit	0	11	11	0	0
3	PN Pangkalan Bun	0	29	28	0	1
4	PN Kuala Kapuas	0	8	7	0	1
5	PN Muara Teweh	0	22	22	0	0
6	PN Buntok	0	2	2	0	0
7	PN Tamiang	0	5	5	0	0
8	PN Kasongan	0	6	5	0	1
J U M L A H		1	101	98	0	4

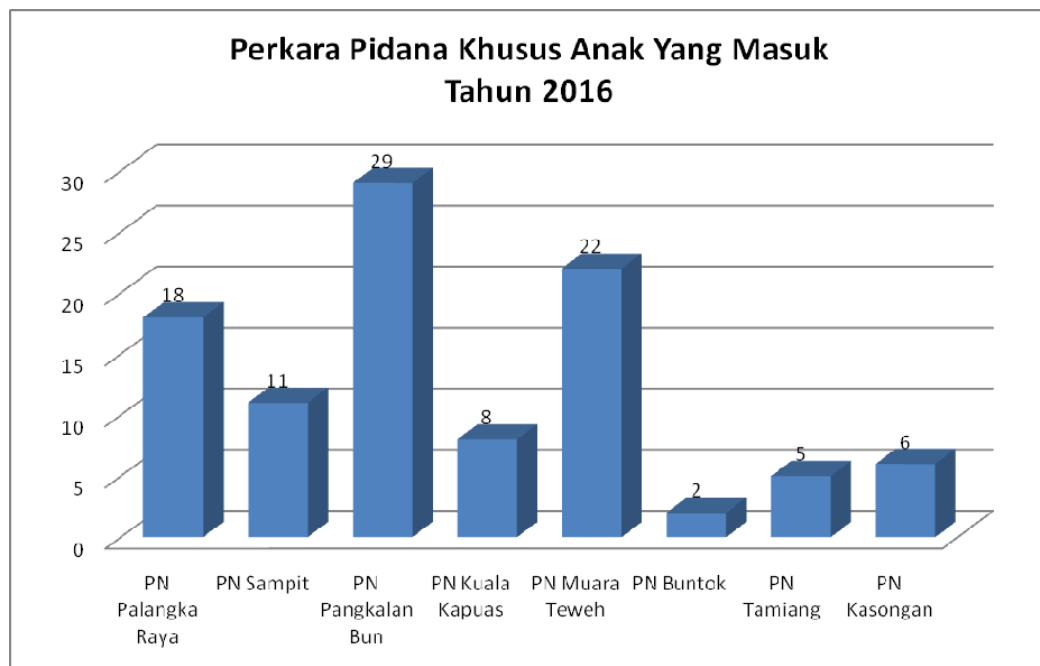
Tabel 3.3. Distribusi Perkara Tindak Pidana Khusus Anak

yang masuk dan putus selama tahun 2016

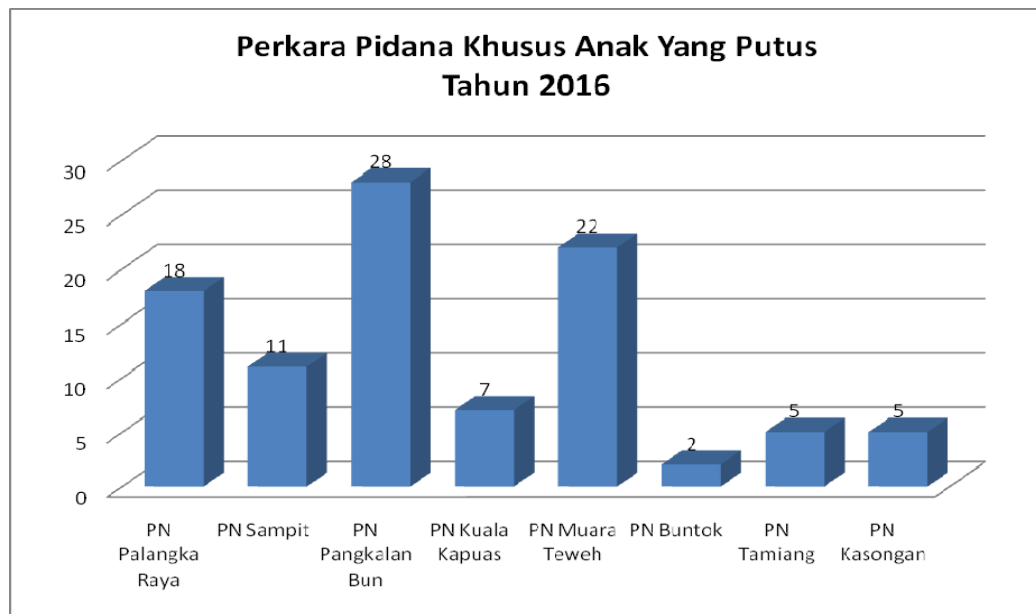
Sehingga dapat digambarkan perbandingan antara perkara yang masuk dan yang putus sebagaimana terdapat pada gambar 3.3.



Gambar 3.3 Perkara Pidana Khusus Anak yang Masuk dan Putus pada PN se-Kalimantan Tengah Tahun 2016



Gambar 3.4 Perkara Pidana Khusus Anak yang Masuk pada PN se-Kalimantan Tengah Tahun 2016



Gambar 3.5 Perkara Pidana Khusus Anak yang Putus pada PN
se-Kalimantan Tengah Tahun 2016

4) **Perkara Tindak Pidana Ringan Lalu Lintas**

Perkara Pidana Lalu Lintas yang masuk selama tahun 2016 se-Kalimantan Tengah berjumlah 32.002 perkara. Perkara Tindak Pidana Ringan terbanyak berasal dari PN Sampit yang berjumlah 7.491 perkara, sedangkan perkara paling sedikit berasal dari PN Buntok yaitu 738 perkara saja. Adapun rincian Perkara Pidana Ringan Lalu Lintas seluruh Pengadilan Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.4

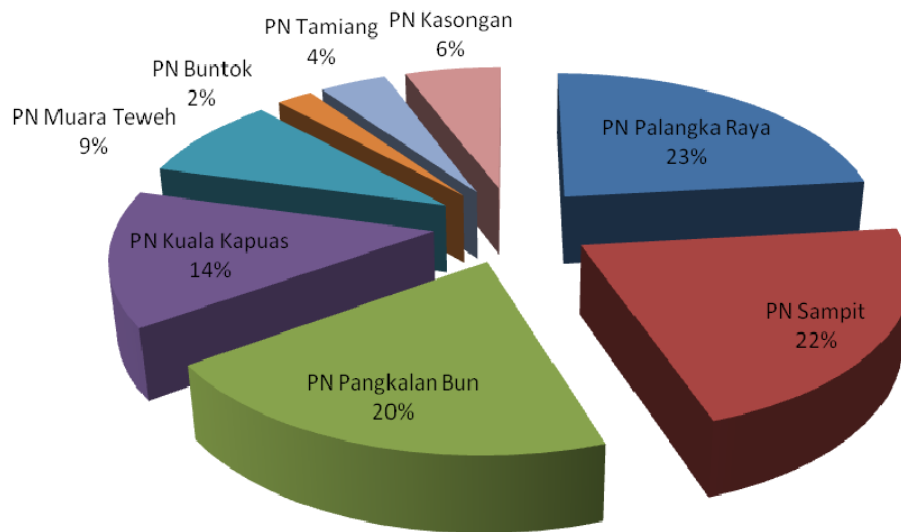


No.	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2015	Perkara Tipiring Lalu Lintas Yang Masuk selama tahun 2016	Perkara Tipiring Lalu Lintas Yang Putus selama tahun 2016	Dicabut	Sisa Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PN Palangka Raya	0	5,413	5,413	0	0
2	PN Sampit	0	7,491	7,491	0	0
3	PN Pangkalan Bun	0	7,041	7,041	0	0
4	PN Kuala Kapuas	0	4,854	4,854	0	0
5	PN Muara Teweh	0	3,058	3,058	0	0
6	PN Buntok	0	738	738	0	0
7	PN Tamiang	0	1,400	1,400	0	0
8	PN Kasongan	0	2,007	2,007	0	0
J U M L A H		0	32,002	32,002	0	0

Tabel 3.4 Perkara Pidana Ringan Lalu Lintas

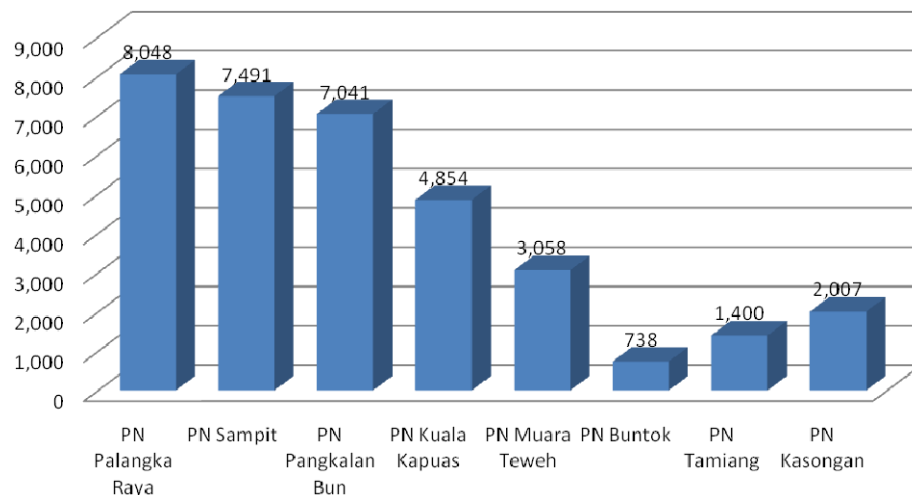
Lebih jelasnya persentase perkara pidana ringan yang masuk dapat dilihat pada gambar 3.5

Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Putus Selama Tahun 2016



Gambar 3.5. Persentase Perkara Pidana Ringan Lalu Lintas yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Masuk Tahun 2016



Gambar 3.6 Perkara Pidana Ringan yang Masuk pada PN se-Kalimantan Tengah Tahun 2016



Sedangkan Distribusi Perkara Pidana yang masuk dan putus oleh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3.5. Perkara pidana yang terbanyak adalah Narkotika yang berjumlah 555 perkara disusul oleh Perkara Pencurian dan Lain-lain yang masing-masing jumlah terdakwa 422 dan 223 perkara.

KODE	KLASIFIKASI	PN PALANGKA RAYA	PN SAMPIT	PN PANGKA LAN BUN	PN KUALA KAPUAS	PN MUARA TEWEH	PN BUNTOK	PN TAMIA NG LAYAN G	PN KASON GAN	JUML AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	0	1	2	0	0	0	1	0	4
3	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	2	0	0	0	3	0	0	0	5
4	Pemalsuan Surat	4	2	8	3	0	0	4	0	21
5	Kejahatan terhadap Kesusilaan	7	0	27	0	2	0	2	1	39
6	Kejahatan Perjudian	41	0	16	22	7	3	3	4	96
7	Penghinaan	1	25	0	0	0	0	0	0	26
8	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	1	1	0	0	0	0	0	0	2
9	Kejahatan terhadap Nyawa	1	0	7	0	8	1	0	2	19
10	Penganiayaan	47	25	9	34	0	0	9	5	129
11	Pencurian	104	86	40	85	35	33	26	13	422
12	Pemerasan dan Pengancaman	1	1	18	4	0	1	0	0	25
13	Penggelapan	34	35	15	14	11	2	5	3	119
14	Penipuan	12	10	0	2	3	1	0	0	28
15	Penghancuran atau Perusakan Barang	3	1	3	0	1	0	0	0	8
16	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	14	19	16	9	7	0	1	0	66
17	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	41	9	59	17	7	12	19	4	168
18	Narkotika	287	99	42	28	34	12	27	26	555



19	Lain-Lain	24	87	36	43	14	0	4	15	223
20	Lalu Lintas	21	2	11	29	5	1	3	5	77
21	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	2	1	3	3	0	1	1	16
22	Tanpa hak mengambil atau memiliki suatu barang milik orang lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Perbuatan Tidak Menyenangkan	0	0	5	0	0	0	0	0	5
24	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	0	3	4	7	2	4	5	3	28
25	Pembunuhan	2	9	4	5	1	2	0	0	23
26	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	0	1	2	0	0	1	0	0	4
27	Pencemaran Nama Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2	0	0	0	0	0	0	0	2
29	Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Perkara Lalu-Lintas	3236	920	1742	1452	3040	738	1401	322	12851
31	Kejahatan	0	0	1	0	0	0	0	0	1
32	Lingkungan Hidup	6	0	0	0	0	0	0	0	6
33	Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dari Kesehatan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Pelanggaran Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum	0	0	0	5	0	0	0	0	5
36	Pelanggaran Kesusilaan	0	1	0	0	0	0	0	0	1
37	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pelanggaran Jabatan	0	0	3	0	0	0	0	0	3
39	Informasi dan Transaksi Elektronik	1	3	0	0	1	0	0	0	5
40	Pertambangan Mineral dan Batubara	3	76	2	0	5	0	0	0	86
41	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	9	1	0	19	0	0	29
42	Kesehatan	17	17	1	70	9	3	16	7	140
43	Perlindungan Anak	17	4	9	19	8	0	4	1	62
44	Kebakaran Hutan	6	0	0	0	0	0	0	0	6
45	Penebangan Kayu	12	0	0	0	0	0	2	0	14
46	Konservasi Sumber Daya Alam	1	0	1	0	0	0	0	0	2

47	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	0	3	0	0	1	0	0	3	7
48	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tabel 3.5 Distribusi Perkara Pidana yang diputus oleh Pengadilan se-Kalimantan Tengah selama tahun 2016 berdasarkan klasifikasi perkara.

B. INFORMASI PERKARA PERDATA

1) Perkara Perdata Gugatan

Perkara Perdata Gugatan yang masuk dari Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah selama tahun 2016 berjumlah 411 perkara, dan sisa perkara tahun 2015 berjumlah 119 perkara. Sedangkan perkara yang diputus dan dicabut selama tahun 2016 berjumlah 441 perkara, sehingga terdapat perkara yang belum putus dan masih dalam proses berjumlah 106 perkara.

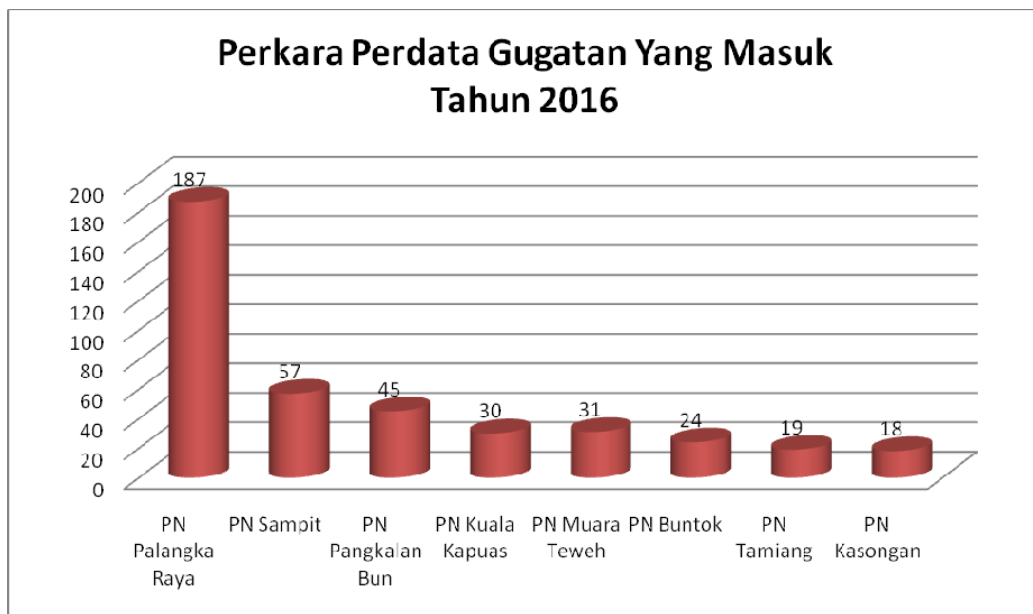
Jika dilihat berdasarkan asal Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara perdata Gugatan terbanyak berasal dari Pengadilan Negeri Palangka Raya berjumlah 187 perkara dalam setahun, sedangkan perkara perdata yang masuk paling sedikit selama tahun 2016 adalah berasal dari PN Kasongan berjumlah 18 perkara dalam setahun. Adapun rincian perkara perdata gugatan yang masuk dan putus selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.6



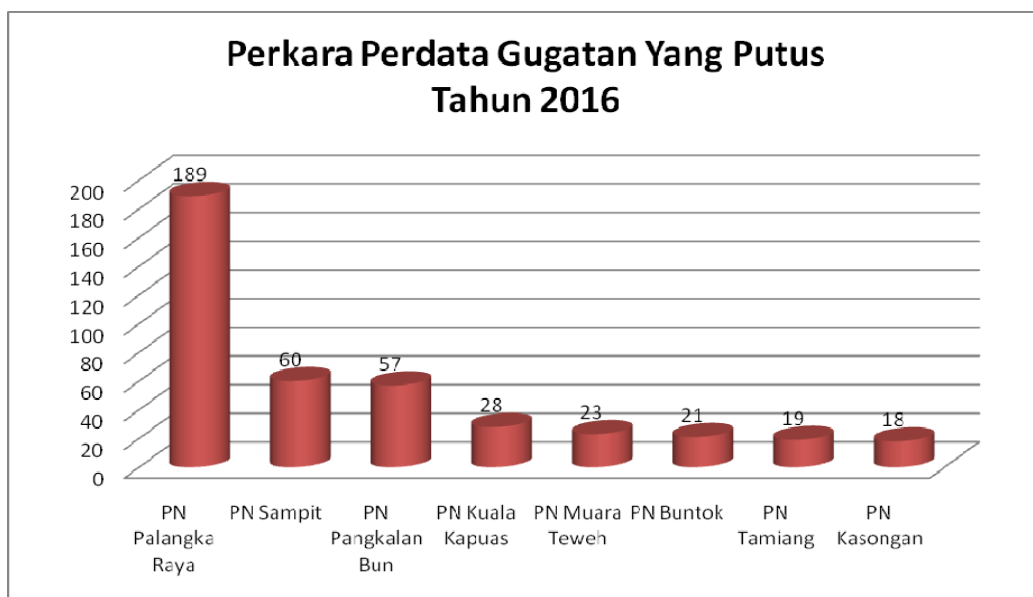
No.	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2015	Perkara Perdata Gugatan Yang Masuk selama tahun 2016	Perkara Perdata Gugatan Yang Putus selama tahun 2016	Dicabut	Sisa Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PN Palangka Raya	47	187	189	-	45
2	PN Sampit	22	57	60	-	19
3	PN Pangkalan Bun	21	45	57	15	9
4	PN Kuala Kapuas	16	30	28	7	11
5	PN Muara Teweh	3	31	23	-	11
6	PN Buntok	2	24	21	1	4
7	PN Tamiang	3	19	19	3	3
8	PN Kasongan	5	18	18	-	4
J U M L A H		119	411	415	26	106

Tabel 3.6 Distribusi Perkara Perdata Gugatan yang masuk dan putus pada
PN se-Kalimantan Tengah Tahun 2015

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dibuat grafik batang Perkara Perdata yang masuk dan putus selama tahun 2016 PN se-Kalimantan Tengah sebagaimana terdapat pada Grafik 3.7 dan Grafik 3.8.

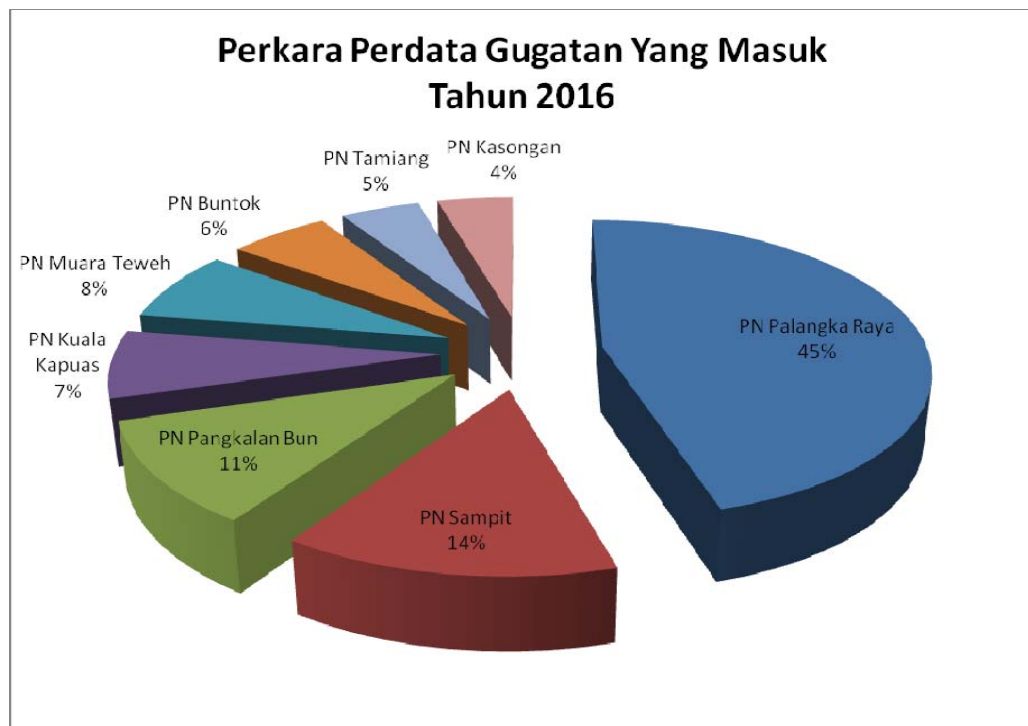


Gambar 3.7 Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama Tahun 2016

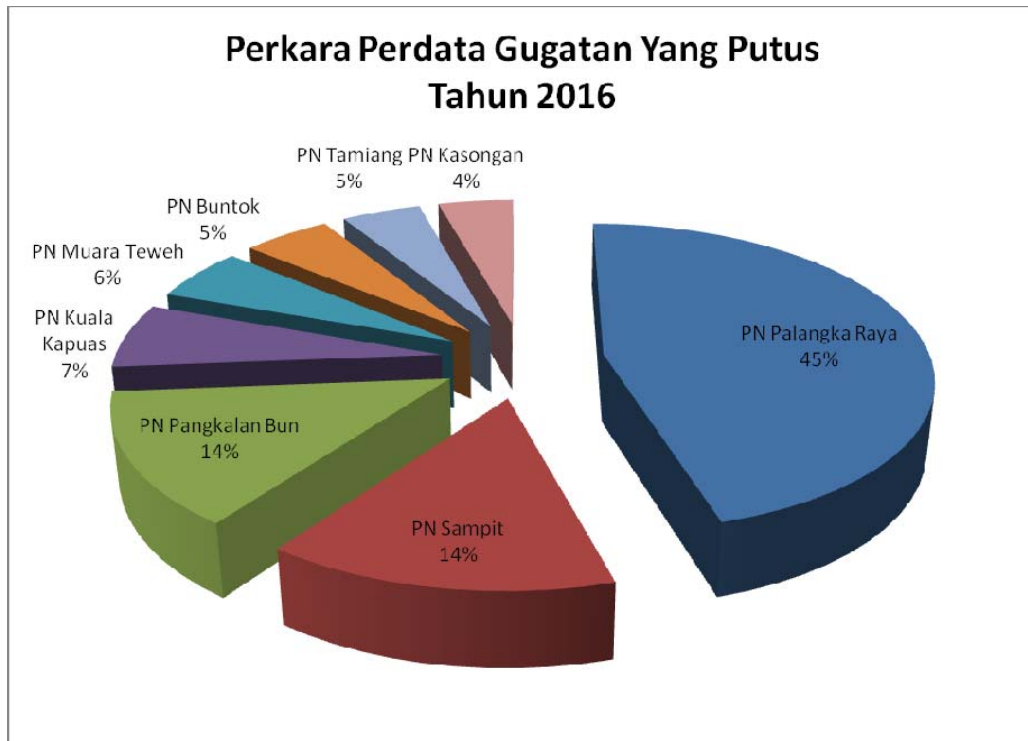


Gambar 3.8 Perkara Perdata Gugatan yang putus selama Tahun 2016

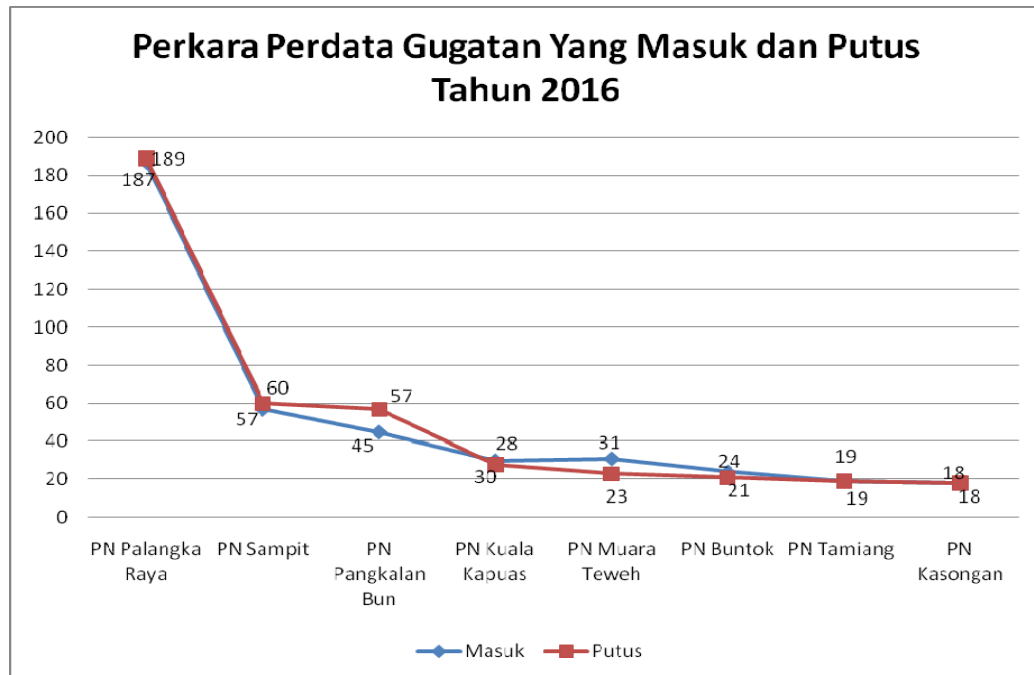
Jika dipersentasekan maka Perkara Perdata Gugatan yang masuk dan putus selama tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 3.9 dan 3.10



Gambar 3.9 Persentase Perkara Perdata Gugatan yang Masuk
selama tahun 2016



Gambar 3.10 Persentase Perkara Perdata Gugatan yang Putus
selama tahun 2016



Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Perkara Perdata Gugatan yang masuk dan Putus Per Pengadilan Negeri selama tahun 2016

Secara rinci maka jumlah perkara yang masuk pada tiap Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel 3.7

No.	Gugatan mengenai	PN Palangka raya		PN Sampit		PN Pangkalan Bun		PN Kuala Kapuas		PN Muara Teweh		PN Buntok		PN Tamiang Layang		PN Kasongan		Jumlah	
		m	p	m	p	m	p	m	p	m	p	m	p	m	p	m	p	m	p
1	Perceraian	84	87	11	13	13	11	11	12	18	14	19	19	15	15	4	3	175	174
2	Perbuatan Melawan Hukum	44	10	5	15	16	31	12	16	10	6	0	1	3	3	11	11	101	93
3	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	6	5	259	244	26	25	25	27	0	1	2	2	2	2	4	3	324	309
4	Pengangkatan Wali Bagi Anak	8	8	2	2	1	1	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	16	16
5	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	0	0	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5
6	Permohonan Ganti Nama	0	0	2	2	15	15	7	7	4	5	2	2	1	1	0	0	31	32
7	Lain-Lain	5	4	4	4	5	6	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	16	17



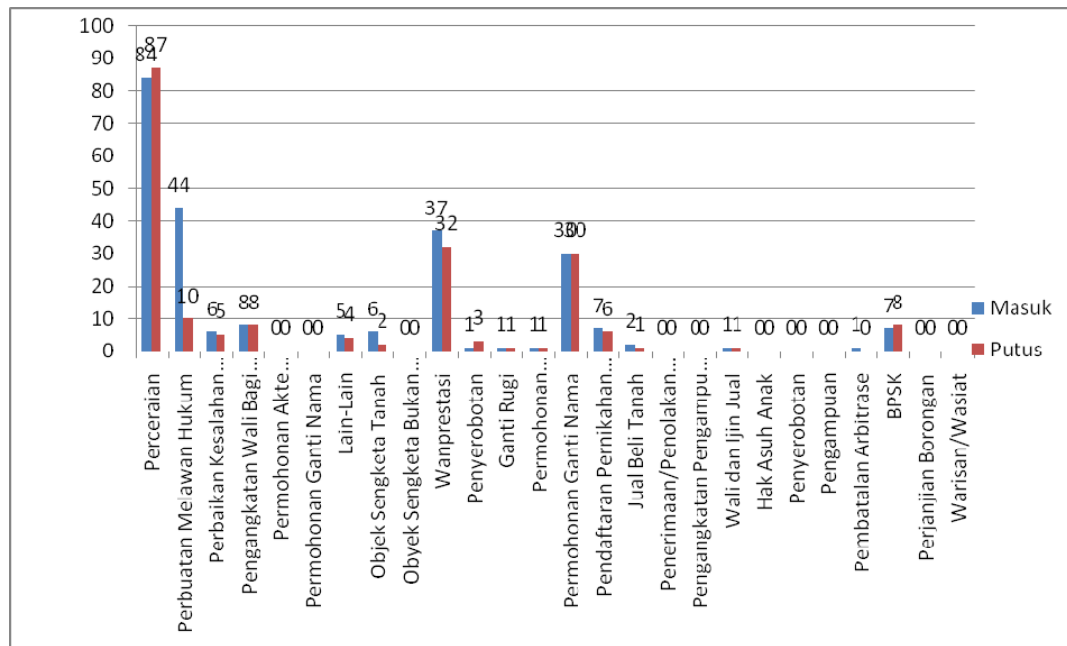
8	Objek Sengketa Tanah	6	2	0		2	0	2	3	0	0	3	2	0	0	2	2	15	9
9	Obyek Sengketa Bukan Tanah	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
10	Wanprestasi	37	32	4	1	1	2	5	3	1	1	2	3	1	0	0	0	51	42
11	Penyerobotan	1	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5
12	Ganti Rugi	1	1	0	0	1	2	0	1	2	2	0	0	0	0	1	3	5	9
13	Permohonan Pengangkatan Anak	1	1	2	2	7	7	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	14	14
14	Permohonan Ganti Nama	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
15	Pendaftaran Pernikahan Terlambat	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	8	7
16	Jual Beli Tanah	2	1	2	1	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13
17	Penerimaan/Penolakan Warisan	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
18	Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa Kurang Ingatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Wali dan Ijin Jual	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
20	Hak Asuh Anak	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	Penyerobotan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Pengampuan	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
23	Pembatalan Arbitrase	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24	BPSK	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
25	Perjanjian Borongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
26	Warisan/Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	241	199	300	293	100	115	66	75	38	34	35	37	22	21	22	22	824	796

Tabel 3.7 Perkara Perdata Gugatan yang masuk

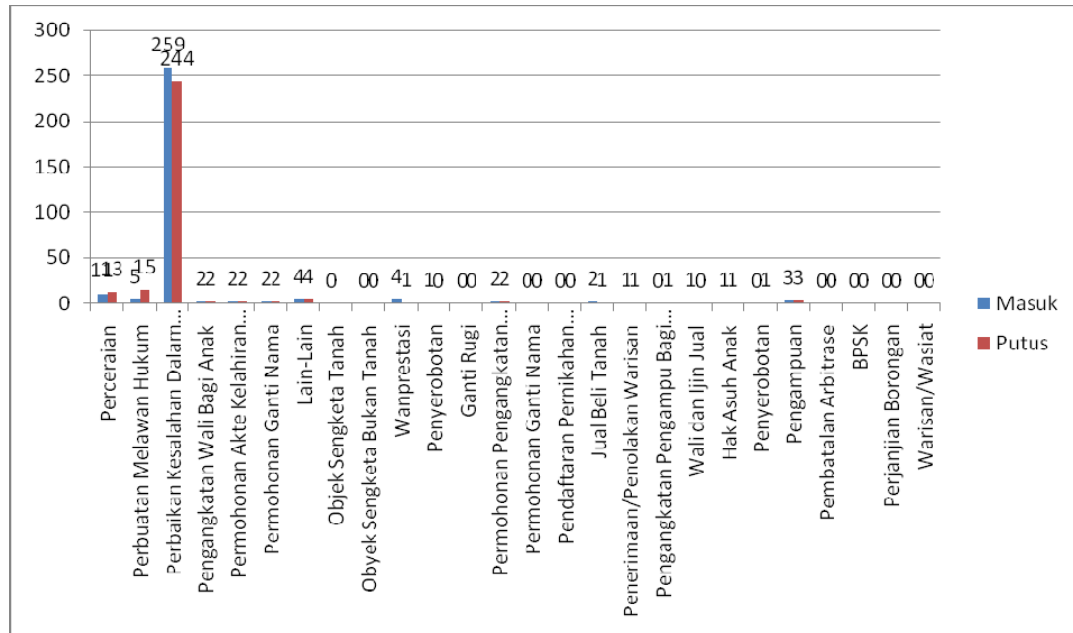
Tiap Pengadilan Negeri Tahun 2016

Adapun grafik Perkara perdata gugatan yang masuk dan Putus tiap Pengadilan

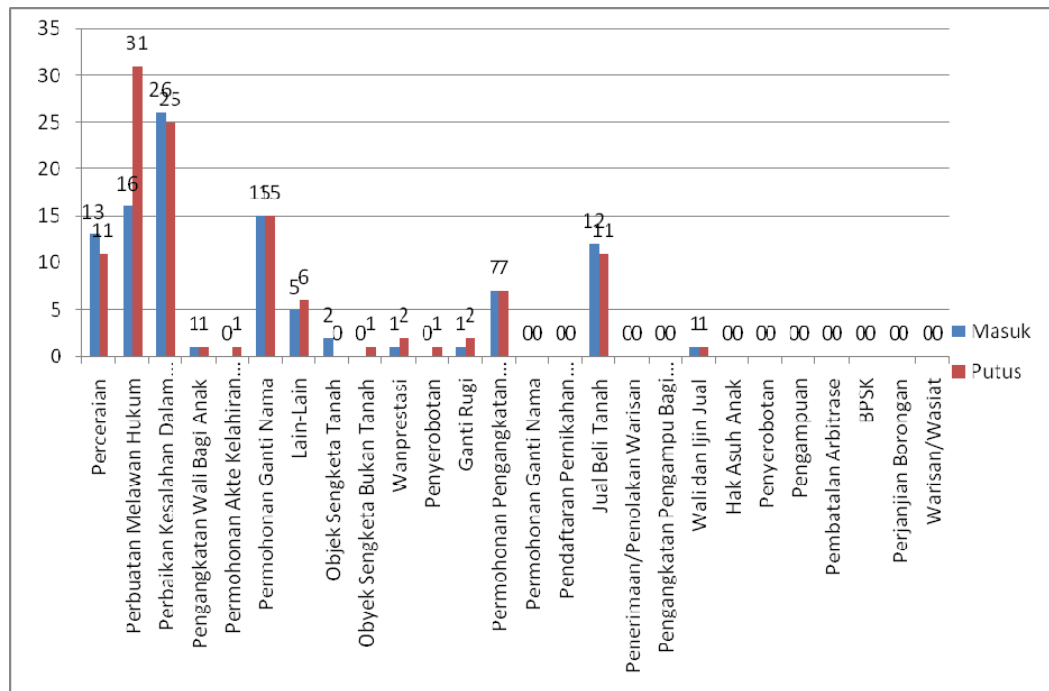
Negeri se-Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar 3.12 – 3.19



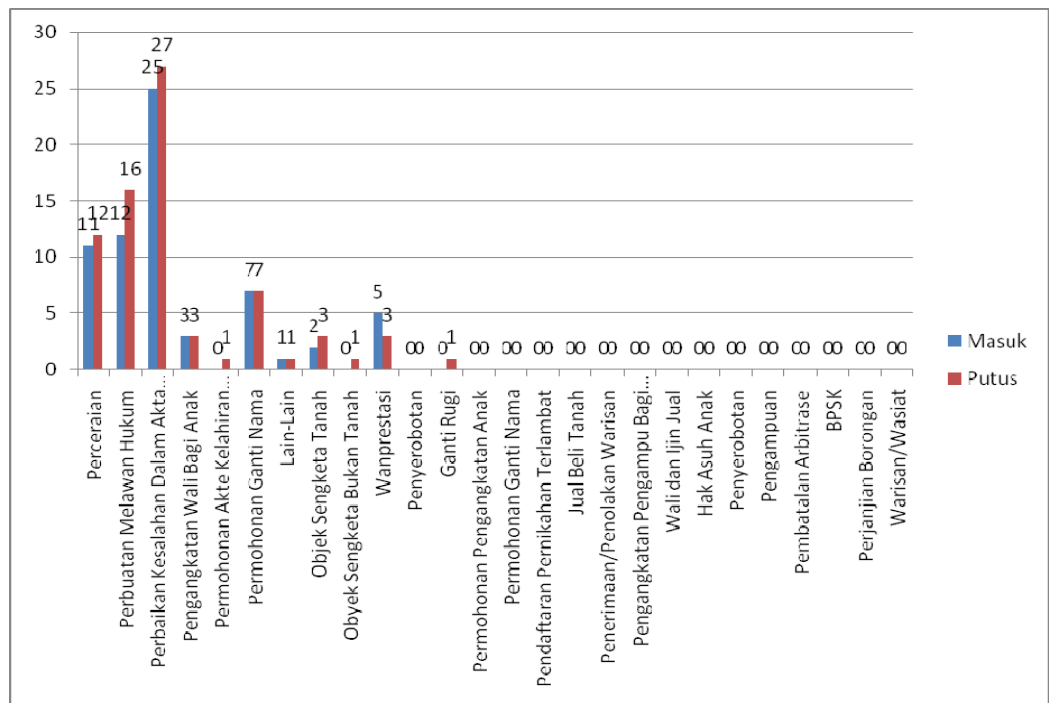
Gambar 3.12 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2016
berdasarkan Jenis Perkara pada PN Palangka Raya



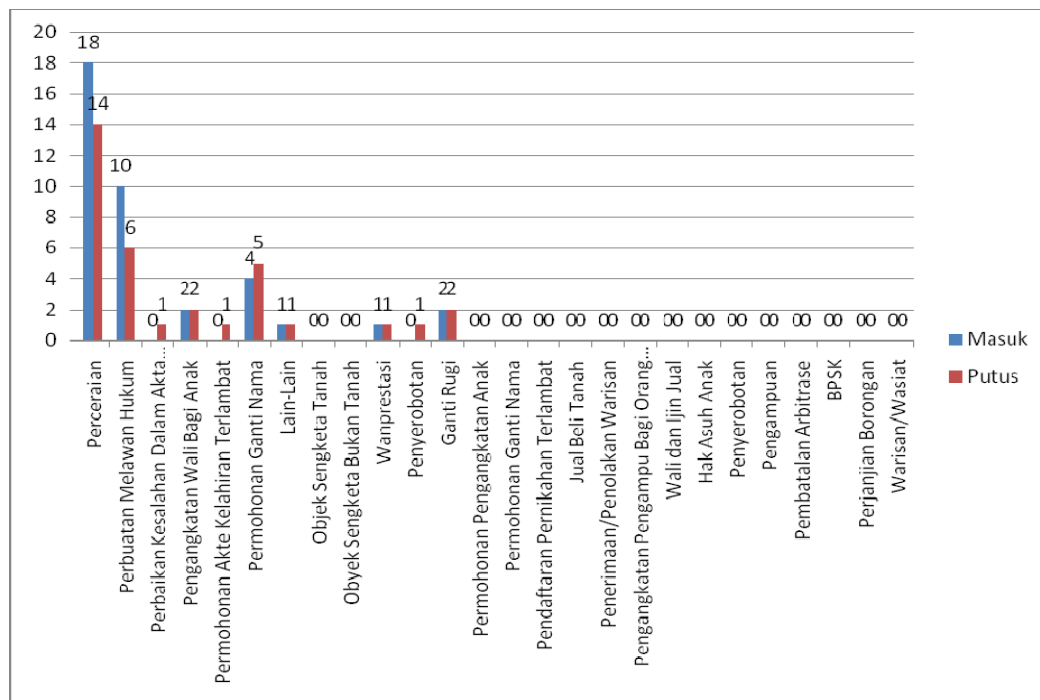
Gambar 3.13 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2016
berdasarkan Jenis Perkara pada PN Sampit



Gambar 3.14 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2016
berdasarkan Jenis Perkara pada PN Pangkalan Bun

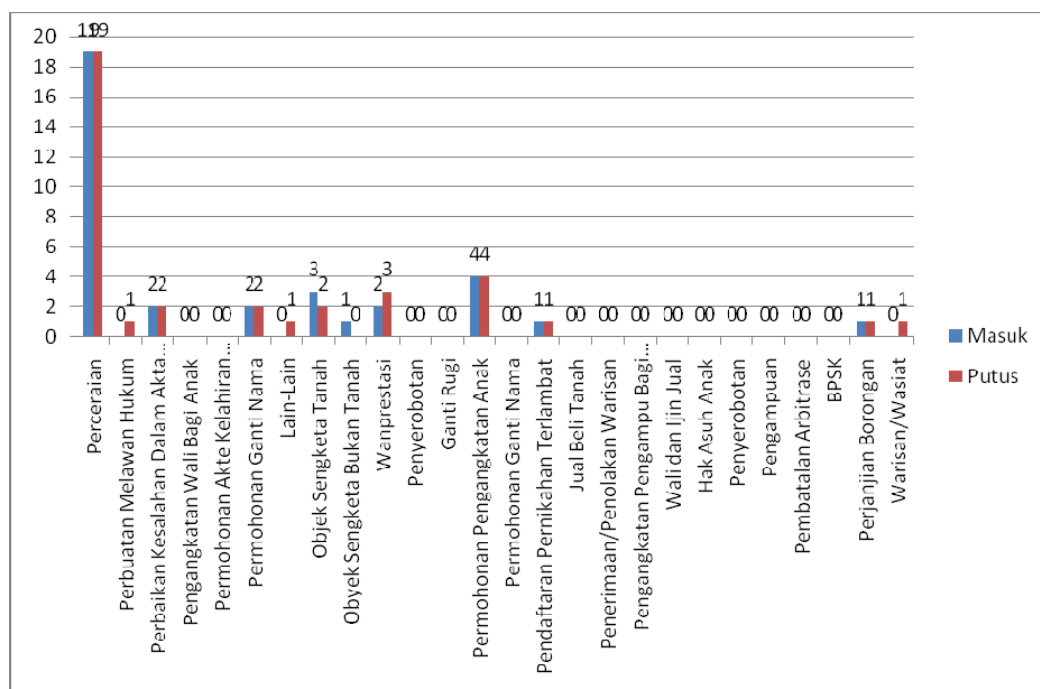


Gambar 3.15 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2016
berdasarkan Jenis Perkara pada PN Kuala Kapuas



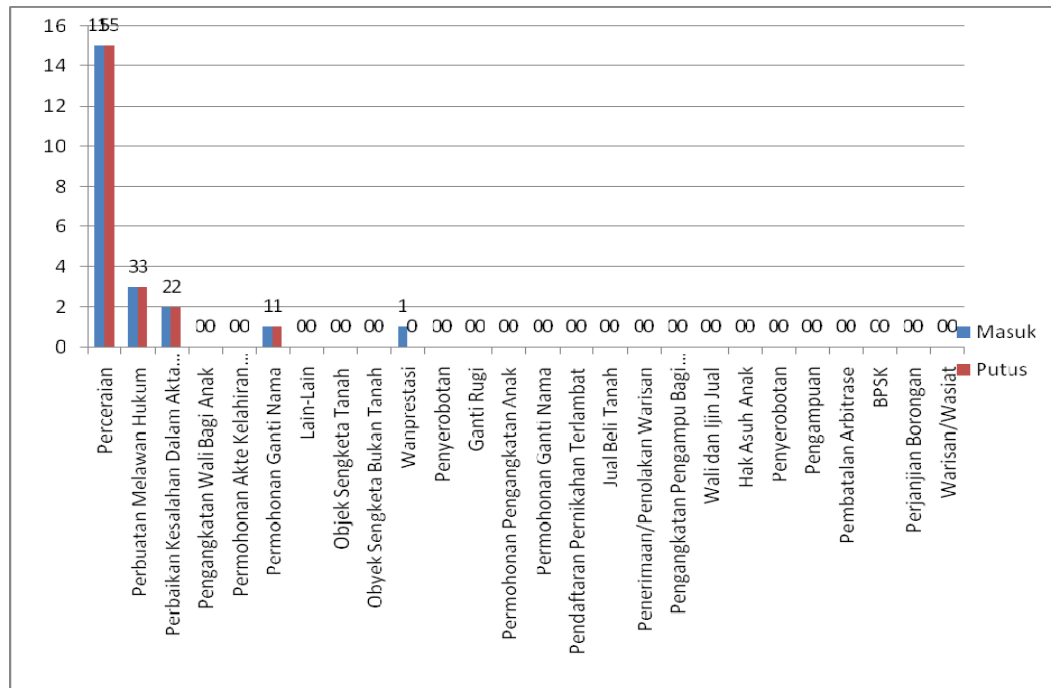
Gambar 3.16 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2016

berdasarkan Jenis Perkara pada PN Muara Teweh

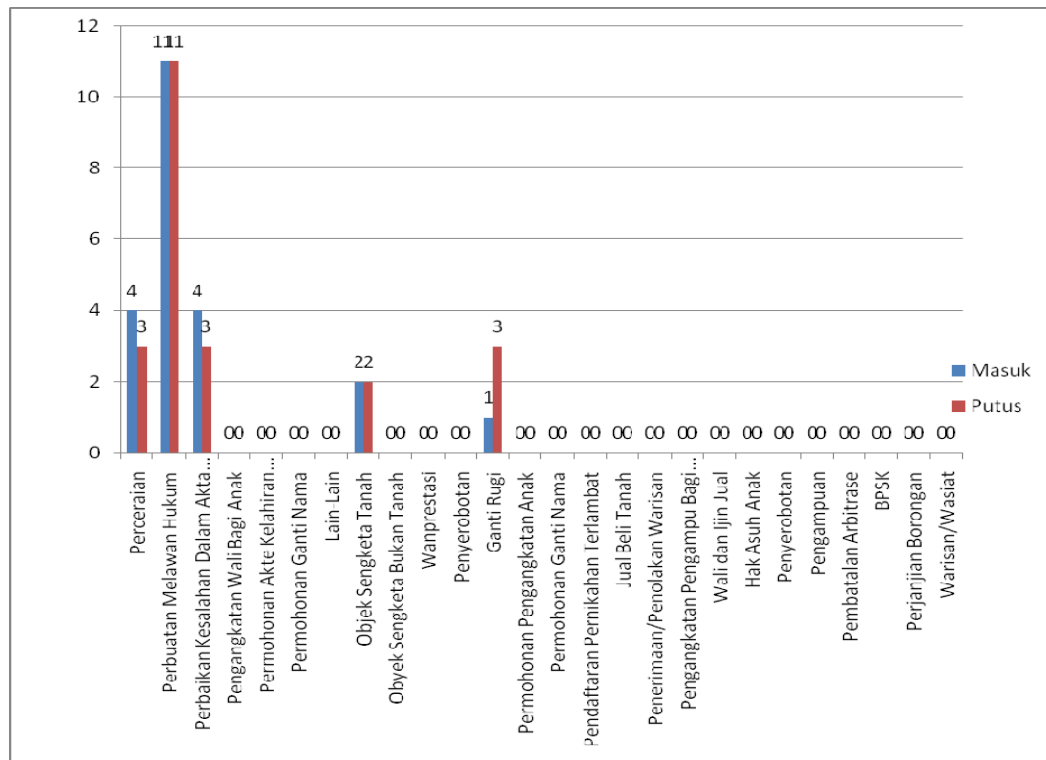


Gambar 3.17 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2016

berdasarkan Jenis Perkara pada PN Buntok



Gambar 3.18 Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2016
berdasarkan Jenis Perkara pada PN Tamiang Layang



Gambar 3.19 Perkara Perkara Perdata Gugatan yang Masuk dan Putus tahun 2016
berdasarkan Jenis Perkara pada PN Kasongan

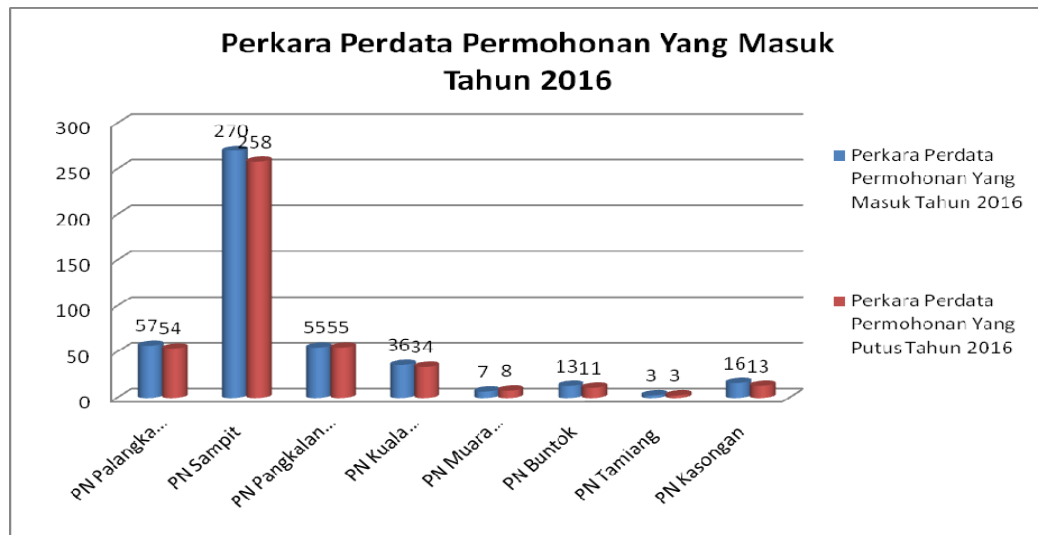
2) Perkara Perdata Permohonan

Perkara perdata permohonan yang masuk selama tahun 2016 berjumlah 457 perkara, sedangkan sisa perkara permohonan yang belum putus selama tahun 2015 berjumlah 6 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut, 436 perkara telah putus, sedangkan 17 perkara belum putus. Adapun secara rinci Distribusi Perkara Permohonan yang masuk tiap Pengadilan Negeri dapat dilihat pada tabel 3.6.

No.	Nama Pengadilan	Sisa Tahun 2015	Perkara Perdata Permohonan Yang Masuk selama tahun 2016	Perkara Perdata Permohonan Yang Putus selama tahun 2016	Dicabut	Sisa Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PN Palangka Raya	0	57	54	2	1
2	PN Sampit	2	270	258	0	14
3	PN Pangkalan Bun	1	55	55	0	1
4	PN Kuala Kapuas	2	36	34	4	0
5	PN Muara Teweh	1	7	8	0	0
6	PN Buntok	0	13	11	2	0
7	PN Tamiang	0	3	3	0	0
8	PN Kasongan	0	16	13	2	1
J U M L A H		6	457	436	10	17

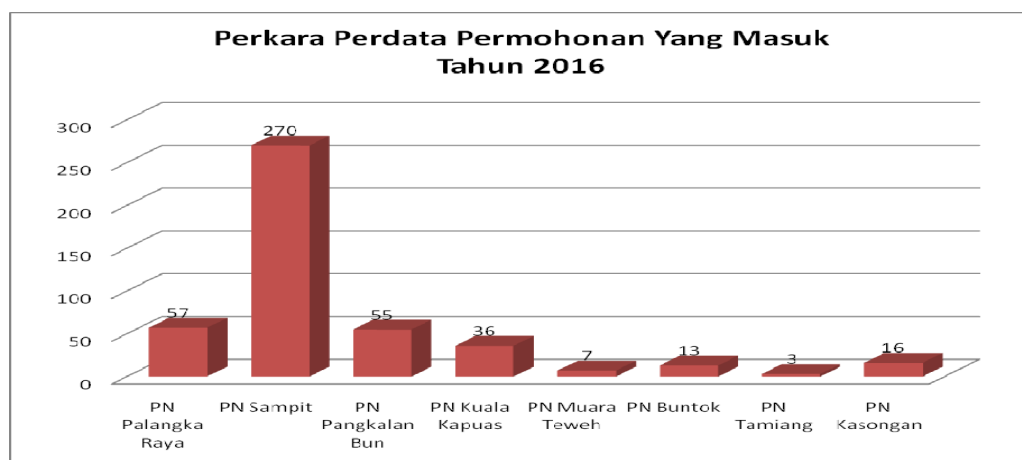
Tabel 3.8 Distribusi Perkara Perdata Permohonan selama tahun 2016

Sehingga dapat digambarkan perbandingan antara perkara yang masuk dan yang putus sebagaimana terdapat pada gambar 3.20.



Gambar 3.20 Perbandingan Perkara Perdata Permohonan yang Masuk dan Putus tahun 2016 berdasarkan Asal PN

Sedangkan perkara permohonan yang masuk berdasarkan Pengadilan Negeri terbanyak berasal dari Pengadilan Negeri Sampit dengan jumlah 270 perkara dan terkecil pada PN Tamiang yang berjumlah 3 perkara.



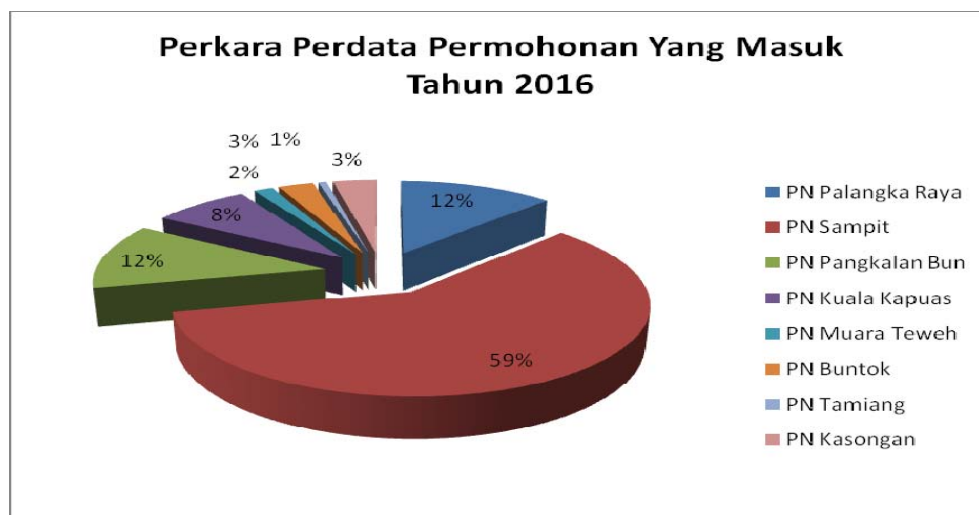
Gambar 3.21 Perkara Perdata Permohonan yang Masuk tahun 2016 berdasarkan tiap Pengadilan Negeri

Sedangkan perkara permohonan yang putus berdasarkan Pengadilan Negeri terbanyak berasal dari Pengadilan Negeri Sampit dengan jumlah 258 perkara dan terkecil pada PN Tamiang Layang yang berjumlah 3 perkara. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.22



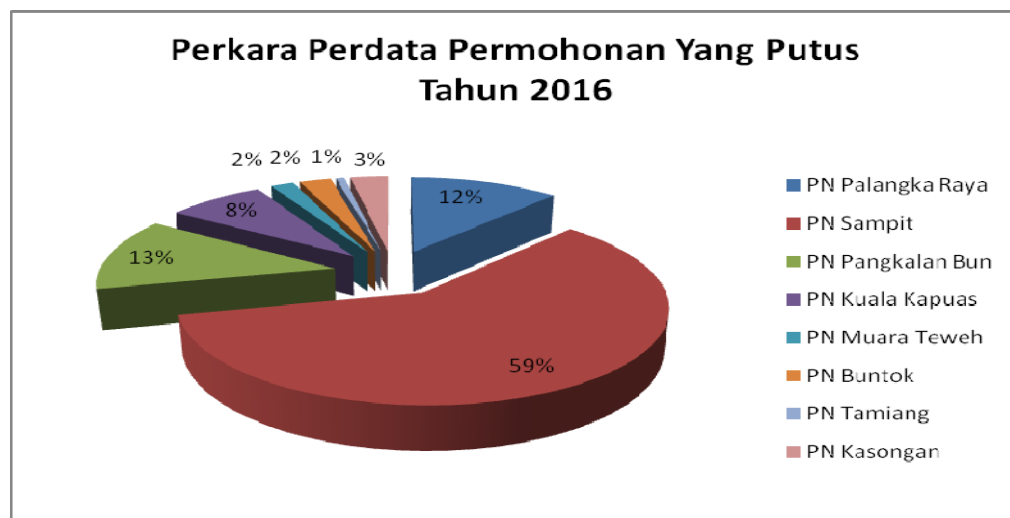
Gambar 3.22 Perkara Perdata Permohonan yang Putus tahun 2016
berdasarkan tiap Pengadilan Negeri

Sehingga dapat dipersentase bahwa perkara perdata permohonan yang masuk persentase terbesar adalah pada PN Sampit yaitu 59 % sedangkan yang terkecil pada PN Tamiang Layang yang persentasenya hanya 1 %.



Gambar 3.23 Persentase Perkara Perkara Perdata Permohonan yang Masuk tahun 2016 berdasarkan tiap Pengadilan Negeri.

Adapun persentase perkara perdata permohonan yang putus persentase terbesar adalah pada PN Sampit yaitu 59 % sedangkan yang terkecil pada PN Tamiang Layang yang persentasenya hanya 1 % sebagaimana terdapat pada gambar 3.32



Gambar 3.24 Persentase Perkara Perkara Perdata Permohonan yang Putus tahun 2016 berdasarkan tiap Pengadilan Negeri.

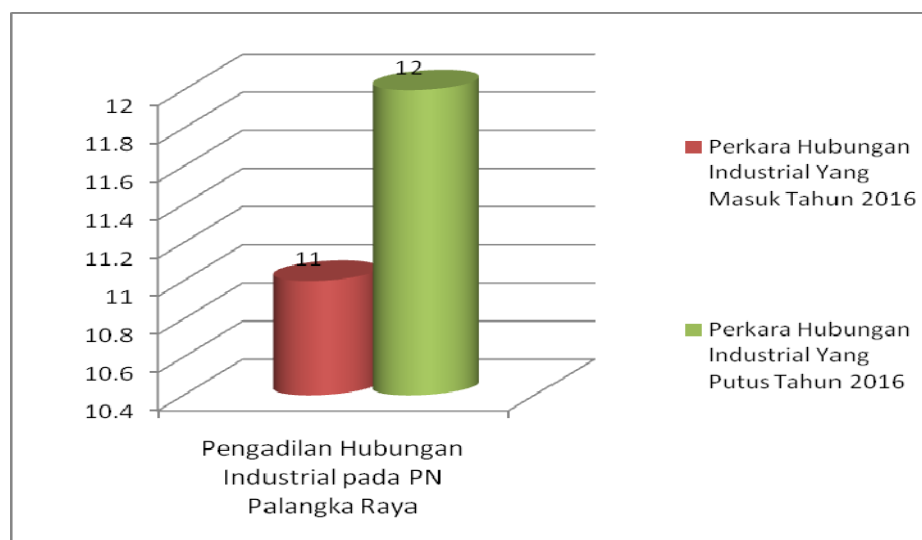
C. INFORMASI PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)

Perkara Hubungan Industrial yang masuk selama tahun 2016 berjumlah 11 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2015 berjumlah 4 perkara. Perkara yang putus berjumlah 12 perkara, sehingga sisa perkara selama tahun 2016 berjumlah 3 perkara. Adapun distribusi masuk dan putusnya perkara PHI Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Pengadilan	Sisa Tahun 2015	Perkara Hubungan Industrial Yang	Perkara Hubungan Industrial Yang	Dicabut	Sisa Tahun 2016

			Masuk selama tahun 2016	Putus selama tahun 2016		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Palangka Raya	4	11	12	0	3

Tabel 3.9 Distribusi Perkara Hubungan Industrial Tahun 2016



Gambar 3.25 Perkara Hubungan Industrial Tahun 2016

D. INFORMASI PERKARA BANDING

1) Perdata

Sisa perkara Perdata yang banding tahun 2015 berjumlah 13 perkara. Perkara Perdata banding yang masuk dari Pengadilan Negeri berjumlah 86 perkara. Sedangkan perkara yang diputus selama tahun 2016 berjumlah 83 perkara dan sisa perkara yang belum putus sebanyak 18 perkara.



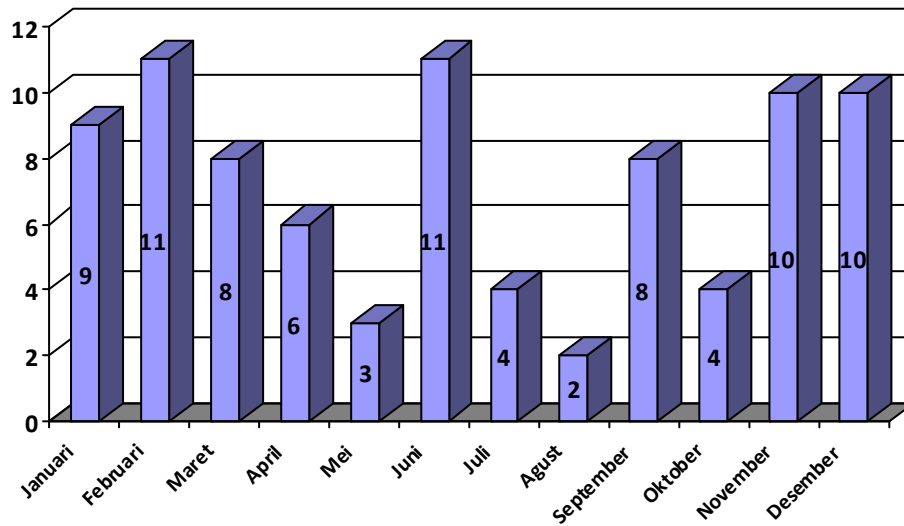
Adapun distribusi perkara yang masuk dan putus selama tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.7

No	BULAN	PERDATA			
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	JANUARI	13	9	9	13
2	FEBRUARI	13	11	9	15
3	MARET	15	8	8	15
4	APRIL	15	6	8	13
5	MEI	13	3	5	11
6	JUNI	11	11	8	14
7	JULI	14	4	5	13
8	AGUSTUS	13	2	8	7
9	SEPTEMBER	7	8	4	11
10	OKTOBER	11	4	3	12
11	NOPEMBER	12	10	8	14
12	DESEMBER	14	10	6	18
JUMLAH			86	81	18

Tabel 3.7 Distribusi Perkara Perdata Banding Tahun 2016

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan gambar diagram batang 3.33

Perkara Perdata Yang Masuk Selama Tahun 2016



Gambar 3.33. Diagram Batang Distribusi Bulanan Perkara Perdata Banding yang Masuk selama tahun 2016

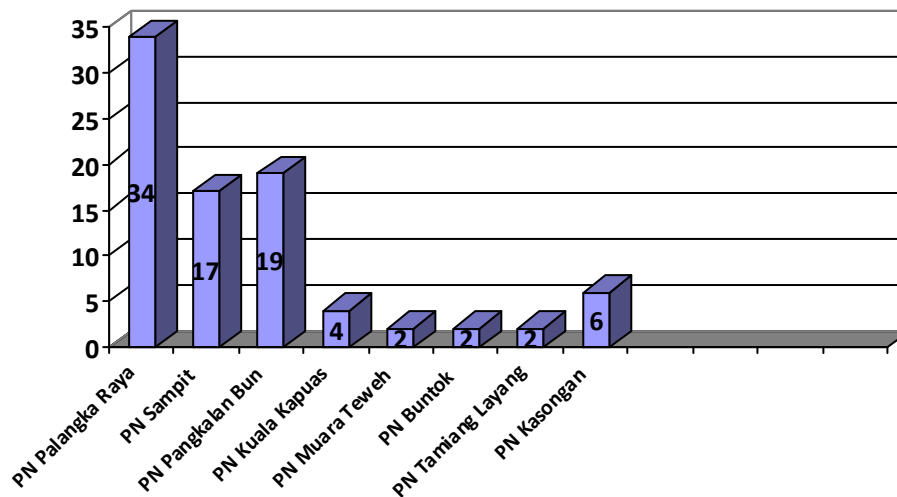
Sedangkan perkara perdata banding yang masuk dari Pengadilan Negeri selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara
1	PN Palangka Raya	34
2	PN Sampit	17
3	PN Pangkalan Bun	19
4	PN Kuala Kapuas	4
5	PN Muara Teweh	2
6	PN Buntok	2
7	PN Tamiang Layang	2

8	PN Kasongan	6
JUMLAH		86

Jika digambarkan diagram batangnya sebagai berikut:

Perkara Perdata Yang Masuk Dari Pengadilan Negeri Selama Tahun 2016



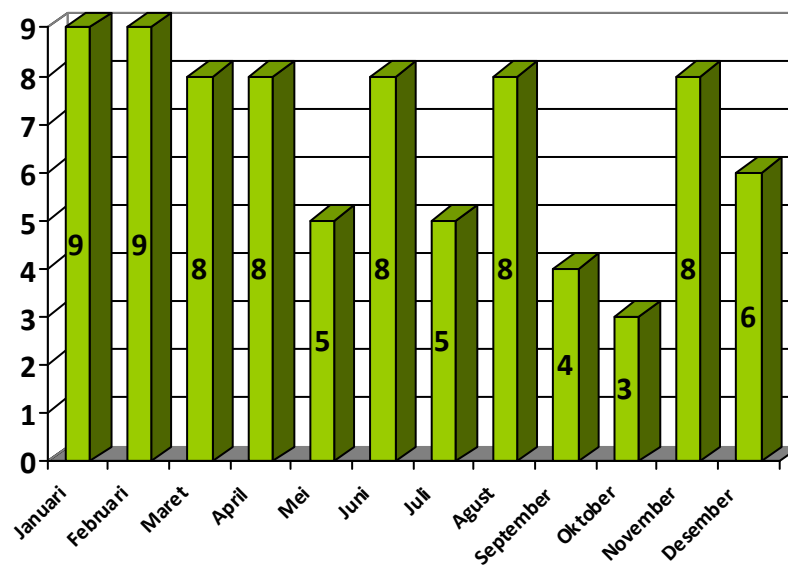
Klasifikasi perkara perdata banding yang masuk selama tahun 2016 dapat dilihat pada uraian sebagai berikut ini:

- Tanah = 24 perkara
- Perbuatan Melawan Hukum = 4 perkara
- Hutang Piutang = 37 perkara
- Perceraian = 3 perkara
- Wanprestasi = 3 perkara
- Lain-lain = 1 perkara
- Warisan = 2 perkara



- Hipotik	=	1 perkara
- Ganti Rugi	=	2 perkara
- Harta Perkawinan	=	1 perkara
- Perseroan	=	1 perkara
- Perlawanan	=	1 perkara
- Lelang Eksekusi	=	1 perkara
		86 perkara

PERKARA PERDATA YANG PUTUS SELAMA TAHUN 2016



Gambar 3.33. Diagram Batang Distribusi Bulanan Perkara Perdata Banding yang Putus selama tahun 2016

Perkara Perdata yang belum putus adalah sebagai berikut:

- *No.56/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 7 September 2016*
Ketua Majelis: BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H./ 6 Desember 2016
Putusan Sela : 4 Oktober 2016



- No.67/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 1 November 2016
Ketua Majelis: UMBU JAMA, S.H
- No.70/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 7 November 2016
Ketua Majelis: UMBU JAMA, S.H
- No.71/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 7 November 2016
Ketua Majelis: JONNY SITOANG, S.H., M.H.
- No.72/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 7 November 2016
Ketua Majelis: H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.
- No.73/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 9 November 2016
Ketua Majelis: UMBU JAMA, S.H
- No.75/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 14 November 2016
Ketua Majelis: UMBU JAMA, S.H.
- No.76/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 17 November 2016
Ketua Majelis: DR. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
- No.77/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 8 Desember 2016
Ketua Majelis: UMBU JAMA, S.H.
- No.78/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 8 Desember 2016
Ketua Majelis: BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.
- No.79/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 8 Desember 2016
Ketua Majelis: BAMBANG WIDYATMOKO, S.H., M.H.
- No.80/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 19 Desember 2016
Ketua Majelis: BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.
- No.81/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 19 Desember 2016
Ketua Majelis: H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.
- No.82/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 19 Desember 2016
Ketua Majelis: H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.



- No.83/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 19 Desember 2016
Ketua Majelis: BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.
- No.84/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 23 Desember 2016
Ketua Majelis: DR. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
- No.85/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 23 Desember 2016
Ketua Majelis: DR. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
- No.86/PDT/2016/PT.PLK, diregister tanggal 23 Desember 2016
Ketua Majelis: BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

Rasio Perkara Banding Pada Pengadilan Negeri :

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya	=	34	perkara (40%)
2. Pengadilan Negeri Sampit	=	17	perkara (20%)
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	=	19	perkara (22%)
4. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	=	4	perkara (5%)
5. Pengadilan Negeri Muara Teweh	=	2	perkara (2%)
6. Pengadilan Negeri Buntok	=	2	perkara (2%)
7. Pengadilan Negeri Tamiang Layang	=	2	perkara (2%)
8. Pengadilan Negeri Kasongan	=	6	perkara (7%)

Rasio Perkara terhadap Majelis Hakim :

1. HESMU PURWANTO, S.H., M.H. Sebanyak 3 (tiga) perkara (3%)
2. SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. Sebanyak 4(empat) perkara (4%)
3. MULYANTO, S.H. sebanyak 1 (satu) perkara (1%)
4. SUBYANTORO, S.H. sebanyak 1 (satu) perkara (1%)
5. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum sebanyak 7 (tujuh) perkara (8%)
6. H. ARIF SUPRATMAN, S.H. Sebanyak 5 (lima) perkara (5%);
7. DR. KRESNA MENON, S.H., M.Hum sebanyak 7 (tujuh) perkara (8%)
8. M. NAJIB SHOLEH, S.H. sebanyak 6 (enam) perkara (6%)
9. UMBU JAMA, S.H. sebanyak 20 (dua puluh) perkara (23%)



10. BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H. sebanyak 16 (enam belas) perkara (18%)
11. TONI PRIBADY, S.H., M.H., sebanyak 2 (dua) perkara (2%)
12. JONNY SITOANG, S.H., M.H. Sebanyak 7 (tujuh) perkara (8%)
13. DOLMAN SINAGA, S.H. Sebanyak 3 (tiga) perkara (3%)
14. BAMBANG KUSTOPO, S.H. Sebanyak 4 (empat) perkara (4%)

2) Pidana

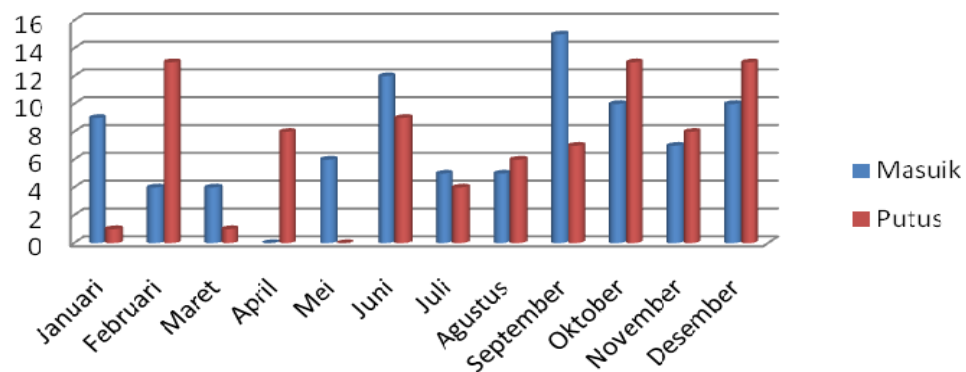
Perkara Pidana sisa tahun 2015 berjumlah 6 perkara, dan perkara yang masuk selama tahun 2016 berjumlah 87 perkara. sedangkan perkara yang putus selama tahun 2016 berjumlah 83 perkara dan sisanya 8 perkara belum putus. Distribusi Perkara tiap bulan yang masuk dan putus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	BULAN	PIDANA BIASA			
		SBL	M	P	S
1	JANUARI	6	9	1	14
2	FEBRUARI	14	4	13	5
3	MARET	5	4	1	8
4	APRIL	8	-	8	-
5	MEI	1	6	-	6
6	JUNI	6	12	9	9
7	JULI	9	5	4	10
8	AGUSTUS	10	5	6	8*
9	SEPTEMBER	8	15	7	16
10	OKTOBER	16	10	13	13
11	NOPEMBER	13	7	8	12



12	DESEMBER	12	10	13	8
JUMLAH			87	83	8

Keadaan Perkara Pidana Selama Tahun 2016



3) Tipikor

Perkara TIPIKOR Sisa tahun lalu berjumlah 4 perkara, 16 Perkara yang masuk. Perkara yang putus selama tahun 2016 berjumlah 13 Perkara, dan sisa perkara yang belum putus berjumlah 7 perkara. Distribusi Perkara tiap bulan yang masuk dan putus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	BULAN	PIDANA TIPIKOR			
		Sisa Bulan Yang Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	JANUARI	4	3	2	5
2	FEBRUARI	5	-	4	1
3	MARET	1	2	1	2
4	APRIL	2	-	-	2



5	MEI	2	1	2	1
6	JUNI	1	1	1	1
7	JULI	1	-	1	-
8	AGUSTUS	-	1	-	1
9	SEPTEMBER	1	-	1	-
10	OKTOBER	-	-	-	-
11	NOPEMBER	-	2	-	2
12	DESEMBER	2	6	1	7
JUMLAH			16	13	7

Keadaan Perkara Tipikor

Tahun 2016

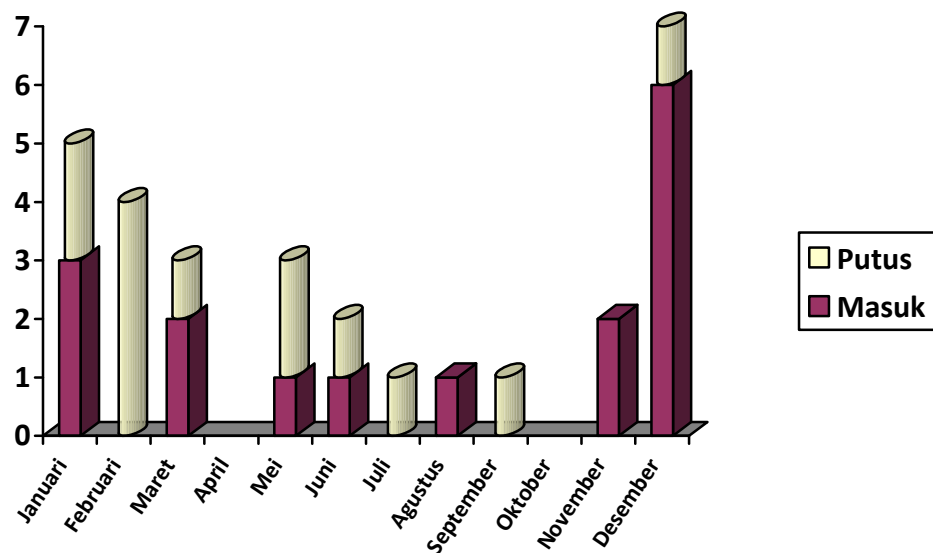


Diagram Batang Distribusi Bulanan Perkara Tipikor Banding yang masuk dan

Putus selama tahun 2016



Rasio Perkara terhadap Majelis Hakim :

1. BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H. Sebanyak (lima) perkara (25%)
2. UMBU JAMA, S.H. Sebanyak 4(empat) perkara (4%)
3. DR. KRESNA MENON, S.H., M.Hum sebanyak 2 (dua) perkara (10%)

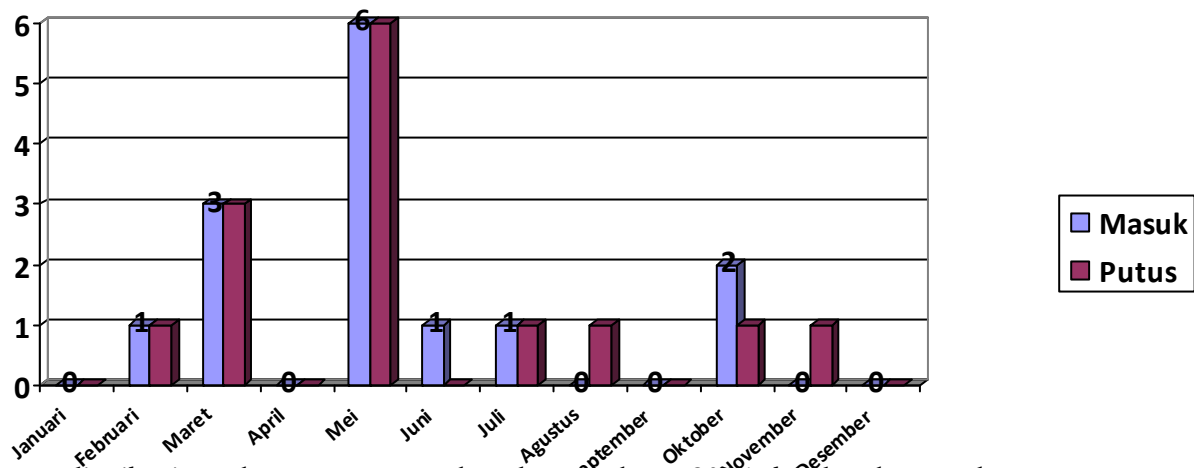
4) Pidana Anak

Perkara Pidana Anak Perkara yang masuk selama tahun 2016 berjumlah 14 Perkara dan Perkara yang putus juga berjumlah 14 Perkara.

No	BULAN	PIDANA ANAK			
		Sisa Bulan Yang Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	JANUARI	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	1	1	-
3	MARET	-	3	3	-
4	APRIL	-	-	-	-
5	MEI	-	6	6	-
6	JUNI	-	1	-	1
7	JULI	1	1	1	1
8	AGUSTUS	1	-	1	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	2	1	1
11	NOPEMBER	1	-	1	-
12	DESEMBER	-	-	-	-

JUMLAH	14	14	-
---------------	-----------	-----------	----------

Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2016



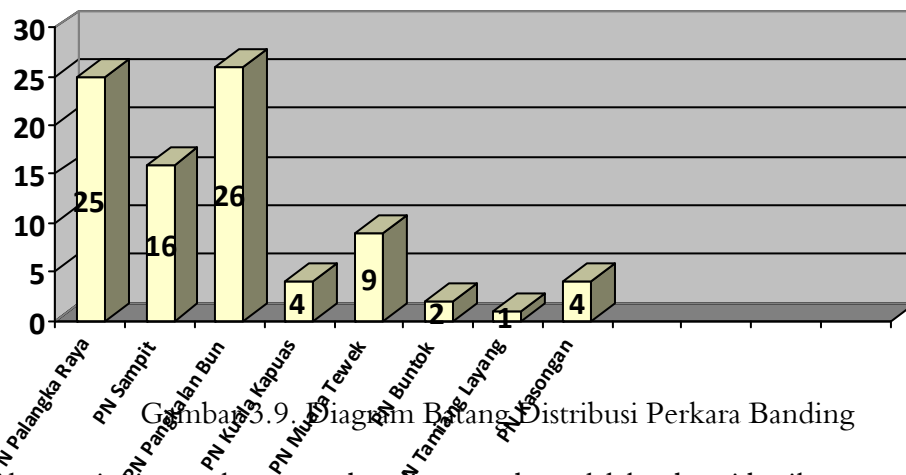
Adapun distribusi perkara yang masuk selama tahun 2016 berdasarkan asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.8

No	Nama Pengadilan	Pidana Banding	Pidana Anak
1	PN Palangka Raya	25	1
2	PN Sampit	16	2
3	PN Pangkalan Bun	26	8
4	PN Kuala Kapuas	4	
5	PN Muara Teweh	9	
6	PN Buntok	2	
7	PN Tamiang Layang	1	2
8	PN Kasongan	4	1
	JUMLAH	87	14

Tabel 3.8 Distribusi Perkara Pidana Banding Tahun 2016

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan gambar diagram batang 3.9

**Perkara Pidana yang Masuk Dari Pengadilan Negeri
Selama Tahun 2016**



Gambar 3.9. Diagram Batang Distribusi Perkara Banding
Adapun rincian perkara yang banding tersebut adalah sebagai berikut:

Narkotika	:	36	Perkara
Farmasi / Kesehatan	:	6	Perkara
Pencurian	:	3	Perkara
Perzinahan / Asusila	:	6	Perkara
Persetubuhan / Pencabulan	:	11	Perkara
Memaniplulasi Dokumen Elektronik	:	1	Perkara
Penggelapan	:	2	Perkara
Pengrusakan	:	4	Perkara
Lingkungan Hidup	:	6	Perkara
BBM / Migas	:	5	Perkara



Penipuan	:	3	Perkara
Pembunuhan	:	1	Perkara
Perikanan	:	1	Perkara
Penganiayaan	:	1	Perkara
Pemalsuan	:	1	Perkara

2. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

- H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H. Sebanyak 1 (satu) Perkara
- Dr. KRESNA MENON, S.H., M.Hum. Sebanyak 2 (dua) Perkara
- H. MULYANTO, S.H. Sebanyak 2 (dua) Perkara
- SUBYANTORO, S.H. Sebanyak 2 (dua) Perkara
- JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. Sebanyak 6 (enam) Perkara
- UMBU JAMA, S.H. Sebanyak 24 (dua puluh empat) Perkara
- BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H. Sebanyak 25 (dua puluh lima) Perkara
- JONNY SITO HANG, S.H., M.H. Sebanyak 12 (dua belas) Perkara
- M. NAJIB SHOLEH, S.H. Sebanyak 9 (sembilan) Perkara
- DOLMAN SINAGA, S.H. Sebanyak 4 (empat) Perkara
- PUDJI TRI RAHADI, S.H. Sebanyak 1 (satu) Perkara

3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

a. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dikuatkan Tk. Banding

Pidana

NO	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	1/PID.SUS/2016/PT.PLK	Narkotika	11 Februari



	78/Pid.Sus/2015/PN.Tml		2016
2	2/PID.SUS/2016/PT.PLK 345/Pid.Sus/2015/PN.Spt	Narkotika	11 Februari 2016
3	10/PID.SUS/2016/PT.PLK 497/Pid.Sus/2015/PN.Plk	Persetubuhan	04 April 2016
4	11/PID.SUS/2016/PT.PLK 85/Pid.Sus/2015/PN.Bnt	Farmasi	06 April 2016
5	14/PID.SUS/2016/PT.PLK 354/Pid.Sus/2015/PN.Pbu	Persetubuhan	25 April 2016
6	16/PID.SUS/2016/PT.PLK 400/Pid.Sus/2015/PN.Pbu	Persetubuhan	25 April 2016
7	17/PID.SUS/2016/PT.PLK 230/Pid.Sus/2015/PN.Klk	Memaniplulasi Dokumen Elektronik	28 April 2016
8	18/PID.SUS/2016/PT.PLK 17/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Narkotika	13 Juni 2016
9	22/PID.SUS/2016/PT.PLK 25/Pid.Sus/2016/PN.Ksn	Narkotika	28 Juni 2016
10	23/PID.SUS/2016/PT.PLK 90/Pid.Sus/2016/PN.Plk	Narkotika	22 Juni 2016
11	25/PID/2016/PT.PLK 522/Pid.B/2016/PN.Spt	Penggelapan	27 Juli 2016
12	29/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK 25/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mtw	Pertambangan	29 Juni 2016
13	31/PID/2016/PT.PLK 18/Pid.B/2016/PN.Bnt	Pembunuhan	15 Agustus 2016
14	34/PID/2016/PT.PLK 101/Pid.B/2016/PN.Spt	Penipuan	15 Agustus 2016
15	35/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK 158/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plk	Sengaja Mengangkut Hasil Hutan	15 Agustus 2016
16	37/PID.SUS/2016/PT.PLK 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk	BBM	31 Agustus 2016
17	39/PID.SUS/2016/PT.PLK 115/Pid.Sus/2016/PN.Klk	Narkotika	15 September 2016
18	41/PID.SUS/2016/PT.PLK 84/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Pengrusakan	26 September 2016
19	42/PID.SUS/2016/PT.PLK 177/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	26 September 2016



20	46/PID.SUS/2016/PT.PLK 239/Pid.Sus/2016/PN.Klk	Perikanan	06 September 2016
21	47/PID.SUS/2016/PT.PLK 200/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	11 Oktober 2016
22	48/PID.SUS/2016/PT.PLK 181/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	10 Oktober 2016
23	49/PID.SUS/2016/PT.PLK 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	10 Oktober 2016
24	50/PID.SUS/2016/PT.PLK 298/Pid.Sus/2016/PN.Plk	Persetubuhan	27 Oktober 2016
25	51/PID.SUS/2016/PT.PLK 186/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	BBM	08 November 2016
26	53/PID/2016/PT.PLK 51/Pid.C/2016/PN.Pbu	Penganiayaan	11 Oktober 2016
27	54/PID.SUS/2016/PT.PLK 192/Pid.Sus/2016/PN.Spt	Narkotika	26 Oktober 2016
28	55/PID.SUS/2016/PT.PLK 227/Pid.Sus/2016/PN.Spt	Narkotika	20 Oktober 2016
29	56/PID.SUS/2016/PT.PLK 192/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	22 November 2016
30	58/PID.SUS/2016/PT.PLK 191/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	27 Oktober 2016
31	64/PID.SUS/2016/PT.PLK 212/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	24 November 2016
32	65/PID/2016/PT.PLK 120/Pid.b/2016/PN.Spt	Penipuan	09 November 2016
33	66/PID/2016/PT.PLK 266/Pid.B/2016/PN.Pbu	Pencurian	13 Desember 2016
34	68/PID.SUS/2016/PT.PLK 195/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Pencabulan	09 Desember 2016
35	69/PID.SUS/2016/PT.PLK 131/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Narkotika	09 Desember 2016
36	70/PID.SUS/2016/PT.PLK 243/Pid.Sus/2016/PN.Spt	Narkotika	24 November 2016
37	71/PID.SUS/2016/PT.PLK 244/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	29 Desember 2016
38	72/PID.SUS/2016/PT.PLK 571/Pid.Sus/2016/PN.Plk	Pencabulan	22 November 2016



39	73/PID/2016/PT.PLK 253/Pid.B/2016/PN.Pbu	Penggelapan	29 Desember 2016
40	74/PID/2016/PT.PLK 523/Pid.B/2016/PN.Plk	Perzinahan	14 Desember 2016
41	77/PID/2016/PT.PLK 524/Pid.B/2016/PN.Plk	Perzinahan	14 Desember 2016
42	78/PID.SUS/2016/PT.PLK 71/Pid.B/2016/PN.Ksn	Narkotika	30 Desember 2016
43	79/PID/2016/PT.PLK 281/Pid.B/2016/PN.Spt	Penipuan	20 Desember 2016

Pidana Anak

NO.	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	2/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pbu	Pencurian	22 Maret 2016
2	4/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Ksn	Pencurian	28 Maret 2016
3	9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Tml	Narkotika	11 Mei 2016
4	10/PID.SUS- ANAK/2016/PT.PLK 17/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu	Pencurian	26 Mei 2016
5	11/PID.SUS- ANAK/2016/PT.PLK 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu	Pencabulan	15 Juli 2016
6	12/PID.SUS- ANAK/2016/PT.PLK 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt	Pencurian	08 Agustus 2016
7	14/PID.SUS- ANAK/2016/PT.PLK 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt	Narkotika	02 November 2016

***Tipikor***

NO.	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	1/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pik	Korupsi	10 Februari 2016
2	2/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pik	Korupsi	10 Februari 2016
3	6/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pik	Korupsi	17 Juni 2016
4	7/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pik	Korupsi	27 Juli 2016

Perdata

NO	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	2/PDT/2016/PT.PLK 12/Pdt.G/2015/PN.Mtw	Tanah	15 Februari 2016
2	3/PDT/2016/PT.PLK 06/Pdt.G/2015/PN.Pik	Tanah	12 Februari 2016
3	4/PDT/2016/PT.PLK 20/Pdt.G/2015/PN.Pik	Hutang Piutang	21 Maret 2016
4	6/PDT/2016/PT.PLK 15/Pdt.G/2015/PN.Spt	PMH	29 Februari 2016
5	10/PDT/2016/PT.PLK 12/Pdt.G/2015/PN.Bnt	Hutang Piutang	04 April 2016
6	11/PDT/2016/PT.PLK 19/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Tanah	08 Maret 2016
7	12/PDT/2016/PT.PLK 20/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Tanah	08 Maret 2016
8	13/PDT/2016/PT.PLK 20/Pdt.G/2015/PN.Tml	Perceraian	14 April 2016
9	14/PDT/2016/PT.PLK 5/Pdt.G/2015/PN.Ksn	PMH	3 Mei 2016
10	15/PDT/2016/PT.PLK	Wanprestasi	6 April 2016



	60/Pdt.G/2015/PN.PIk		
11	16/PDT/2016/PT.PLK 22/Pdt.G/2015/PN.Spt	Tanah	8 Maret 2016
12	17/PDT/2016/PT.PLK 15/Pdt.G/2015/PN.KIk	PMH	6 April 2016
13	18/PDT/2016/PT.PLK 43/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	22 Maret 2016
14	19/PDT/2016/PT.PLK 9/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	4 Mei 2016
15	20/PDT/2016/PT.PLK 38/Pdt.G/2015/PN.PIk	Perceraian	2 Mei 2016
16	21/PDT/2016/PT.PLK 24/Pdt.G/2015/PN.KIk	Perceraian	2 Mei 2016
17	27/PDT/2016/PT.PLK 22/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Warisan	1 Juni 2016
18	28/PDT/2016/PT.PLK 76/Pdt.G/2014/PN.Spt	PMH	2 Mei 2016
19	30/PDT/2016/PT.PLK 133/Pdt.G/2015/PN.PIk	Perceraian	10 Juni 2016
20	33/PDT/2016/PT.PLK 04/Pdt.G/2015/PN.KIk	Tanah	29 Juni 2016
21	34/PDT/2016/PT.PLK 09/Pdt.G/2015/PN.KIk	Tanah	29 Juni 2016
22	36/PDT/2016/PT.PLK 32/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Hipotik	18 Juli 2016
23	37/PDT/2016/PT.PLK 28/Pdt.G/2015/PN.Pbu	PMH	20 Juli 2016
24	38/PDT/2016/PT.PLK 11/Pdt.G/2015/PN.Spt	Tanah	5 Agustus 2016
25	39/PDT/2016/PT.PLK 98/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	18 Juli 2016
26	40/PDT/2016/PT.PLK 80/Pdt.G/2015/PN.Spt	PMH	15 Agustus 2016
27	41/PDT/2016/PT.PLK 151/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	31 Agustus 2016
28	42/PDT/2016/PT.PLK 34/Pdt.G/2015/PN.Spt	PMH	9 Agustus 2016



29	43/PDT/2016/PT.PLK 169/Pdt.G/2015/PN.Plk	Perceraian	15 Agustus 2016
30	45/PDT/2016/PT.PLK 31/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Tanah	31 Agustus 2016
31	46/PDT/2016/PT.PLK 118/Pdt.G/2015/PN.Plk	Perceraian	20 Juli 2016
32	47/PDT/2016/PT.PLK 42/Pdt.G/2015/PN.Plk	Tanah	7 September 2016
33	48/PDT/2016/PT.PLK 190/Pdt.G/2014/PN.Plk	PMH	30 Agustus 2016
34	49/PDT/2016/PT.PLK 26/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Tanah	21 September 2016
35	50/PDT/2016/PT.PLK 87/Pdt.G/2015/PN.Spt	Ganti Rugi	8 September 2016
36	52/PDT/2016/PT.PLK 144/Pdt.G/2015/PN.Plk	Harta Perkawinan	15 September 2016
37	54/PDT/2016/PT.PLK 46/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Tanah	25 Oktober 2016
38	55/PDT/2016/PT.PLK 53/Pdt.G/2015/PN.Plk	PMH	14 November 2016
39	57/PDT/2016/PT.PLK 143/Pdt.G/2015/PN.Plk	PMH	7 November 2016
40	60/PDT/2016/PT.PLK 174/Pdt.G/2015/PN.Plk	Tanah	9 November 2016
41	61/PDT/2016/PT.PLK 90/Pdt.G/2015/PN.Spt	PMH	24 November 2016
42	62/PDT/2016/PT.PLK 08/Pdt.G/2016/PN.Spt	Perseroan	10 November 2016
43	63/PDT/2016/PT.PLK 08/Pdt.G/2016/PN.Plk	Perceraian	24 November 2016
44	64/PDT/2016/PT.PLK 7/Pdt.G/2016/PN.Bnt	Lain-lain (Perjanjian Kerja)	14 Desember 2016
45	68/PDT/2016/PT.PLK 34/Pdt.G/2016/PN.Pbu	Tanah	15 Desember 2016
46	69/PDT/2016/PT.PLK 1/Pdt.G/2016/PN.Ksn	PMH	9 Desember 2016
47	74/PDT/2016/PT.PLK	Tanah	20 Desember 2016



	178/Pdt.Plw/2015/PN.Plk		
--	-------------------------	--	--

b. Putusan Pengadilan Tingkat I yang dibatalkan Tk. Banding

Pidana

NO	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	4/PID/2016/PT.PLK 225/Pid.B/2015/PN.Pbu	Pencurian	24 Februari 2016
2	5/PID/2016/PT.PLK 226/Pid.B/2015/PN.Pbu	Pencurian	24 Februari 2016
3	9/PID.SUS/2016/PT.PLK 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk	Narkotika	25 Februari 2016
4	15/PID.SUS/2016/PT.PLK 14/Pid.Sus/2016/PN.Plk	Narkotika	28 April 2016
5	27/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK 16/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn	Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Surat	29 Juni 2016
6	28/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK 17/Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn	Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Surat	29 Juni 2016
7	33/PID.SUS/2016/PT.PLK 191/Pid.Sus/2016/PN.Plk	Narkotika	20 Juli 2016
8	38/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK 18/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kik	Pencemaran Lingkungan Hidup	26 September 2016
9	44/PID.SUS/2016/PT.PLK 48/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Pembunuhan	15 September 2016
10	45/PID.SUS/2016/PT.PLK 85/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Perbuatan Cabul	11 Oktober 2016
11	52/PID.SUS/2016/PT.PLK 222/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	25 Oktober 2016
12	63/PID.SUS/2016/PT.PLK 113/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Narkotika	15 November 2016
13	67/PID.SUS/2016/PT.PLK 128/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Narkotika	14 Desember 2016
14	75/PID.SUS/2016/PT.PLK 130/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Narkotika	29 Desember 2016
15	76/PID.SUS/2016/PT.PLK 289/Pid.Sus/2016/PN.Spt	Narkotika	09 Desember 2016

***Pidana Anak***

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
1	NIHIL		

Tipikor

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
1	NIHIL		

Perdata

NO	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	1/PDT/2016/PT.PLK 67/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	11 Maret 2016
2	5/PDT/2016/PT.PLK 19/Pdt.G/2015/PN.Spt	Tanah	22 Maret 2016
3	8/PDT/2016/PT.PLK 181/Pdt.G/2014/PN.PIk	Tanah	25 Februari 2016
4	9/PDT/2016/PT.PLK 28/Pdt.G/2014/PN.PIk	Lain-lain	22 Maret 2016
5	22/PDT/2016/PT.PLK 188/Pdt.G/2014/PN.PIk	PMH	25 April 201
6	23/PDT/2016/PT.PLK 6/Pdt.G/2015/PN.Ksn	Tanah	7 Juni 2016
7	24/PDT/2016/PT.PLK 18/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Tanah	28 April 2016
8	25/PDT/2016/PT.PLK 17/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Tanah	25 April 2016
9	26/PDT/2016/PT.PLK 124/Pdt.G/2015/PN.PIk	Perceraian	25 April 2016
10	32/PDT/2016/PT.PLK 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn	Tanah	3 Juni 2016
11	35/PDT/2016/PT.PLK 01/Pdt.G/2015/PN.Spt	PMH	12 Juli 2016
12	44/PDT/2016/PT.PLK 33/Pdt.G/2015/PN.Pbu	PMH	8 Agustus 2016



13	51/PDT/2016/PT.PLK 8/Pdt.G/2015/PN.Ksn	PMH	11 Oktober 2016
14	53/PDT/2016/PT.PLK 56/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	31 Oktober 2016
15	58/PDT/2016/PT.PLK 42/Pdt.G/2015/PN.Pbu	PMH	23 November 2016
16	59/PDT/2016/PT.PLK 117/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	14 November 2016
17	65/PDT/2016/PT.PLK 16/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	13 Desember 2016
18	66/PDT/2016/PT.PLK 1/72Pdt.G/2015/PN.PIk	Wanprestasi	21 Desember 2016

c. **Putusan Pengadilan Tingkat I yang tidak dapat diterima TK. Banding**

Pidana

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

Pidana Anak

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

Tipikor

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
1	NIHIL		

Perdata

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		



d. Putusan pengadilan Tk. I yang dicabut Tk. Banding

Pidana

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Cabut	KLASIFIKASI PERKARA
1	36/PID.SUS/2016/PT.PLK 254/Pid.Sus/2016/PN.Plk		BBM
2	59/PID.SUS/2016/PT.PLK 194/Pid.Sus/2016/PN.Pbu		Narkotika

Pidana Anak

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

Tipikor

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

Perdata

No.	Nomor Perkara PT	Tanggal Putus	KLASIFIKASI PERKARA
	NIHIL		

4. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI

Putusan Pengadilan Tingkat I yang diputus Tk. Banding diajukan Kasasi

Pidana

NO	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	3/PID.SUS/2016/PT.PLK 276/Pid.Sus/2015/PN.Spt	Farmasi	24 Februari 2016
2	6/PID.SUS/2016/PT.PLK	Farmasi	15 Februari 2016



	278/Pid.Sus/2015/PN.Spt		
3	9/PID.SUS/2016/PT.PLK 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk	Narkotika	25 Februari 2016
4	10/PID.SUS/2016/PT.PLK 497/Pid.Sus/2015/PN.Plk	Persetubuhan	4 April 2016
5	15/PID.SUS/2016/PT.PLK 14/Pid.Sus/2016/PN.Plk	Narkotika	28 April 2016
6	18/PID.SUS/2016/PT.PLK 17/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Narkotika	13 Juni 2016
7	20/PID.SUS/2016/PT.PLK 5/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Asusila	20 Juni 2016
8	38/PID.SUS-LH/2016/PT.PLK 18/Pid.Sus/2016/PN.Klk	Narkotika	26 September 2016
9	39/PID.SUS/2016/PT.PLK 115/Pid.Sus/2016/PN.Klk	Narkotika	15 September 2016
10	41/PID.SUS/2016/PT.PLK 84/Pid.Sus/2016/PN.Mtw	Pengrusakan	26 September 2016
11	47/PID.SUS/2016/PT.PLK 200/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	11 Oktober 2016
12	48/PID.SUS/2016/PT.PLK 181/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	10 Oktober 2016
13	49/PID.SUS/2016/PT.PLK 199/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	10 Oktober 2016
14	52/PID.SUS/2016/PT.PLK 222/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	25 Oktober 2016
15	56/PID.SUS/2016/PT.PLK 192/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	22 November 2016
16	58/PID.SUS/2016/PT.PLK 191/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	27 Oktober 2016
17	64/PID.SUS/2016/PT.PLK 212/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Narkotika	24 November 2016
18	68/PID.SUS/2016/PT.PLK 195/Pid.Sus/2016/PN.Pbu	Pencabulan	09 Desember 2016
19	76/PID.SUS/2016/PT.PLK 289/Pid.Sus/2016/PN.Spt	Narkotika	09 Desember 2016

***Pidana Anak***

NO.	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
	NIHIL		

Tipikor

NO.	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	8/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PIk	Korupsi	29 September 2016

Perdata

NO	NO. PT/PN	KLASIFIKASI	PUTUS
1	3/PDT/2016/PT.PLK 06/Pdt.G/2015/PN.PIk	Tanah	12 Februari 2016
2	8/PDT/2016/PT.PLK 181/Pdt.G/2015/PN.PIk	Tanah	25 Februari 2016
3	12/PDT/2016/PT.PLK 20/Pdt.G/2015/PN.Pbu	Tanah	08 Maret 2016
4	13/PDT/2016/PT.PLK 20/Pdt.G/2015/PN.Tml	Perceraian	14 April 2016
5	18/PDT/2016/PT.PLK 43/Pdt.G/2015/PN.PIk	PMH	22 Maret 2016
6	28/PDT/2016/PT.PLK 76/Pdt.G/2014/PN.Spt	PMH	2 Mei 2016
7	37/PDT/2016/PT.PLK 28/Pdt.G/2015/PN.Pbu	PMH	20 Juli 2016
8	38/PDT/2016/PT.PLK 11/Pdt.G/2015/PN.Spt	Tanah	5 Agustus 2016
9	42/PDT/2016/PT.PLK 34/Pdt.G/2015/PN.Spt	PMH	9 Agustus 2016

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terkhusus pada pengelolaan sarana dan prasarana merincikan tentang pelaksanaan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2016.

1. Gedung Kantor

- a) Gedung kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya terbagi menjadi 2 gedung yaitu gedung depan dan gedung belakang. Gedung depan direnovasi pada tahun 2009 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 2.544 m² serta gedung belakang juga dibangun pada tahun 2006 dengan 2 lantai dengan luas bangunan 1.600 m². Bangunan tersebut berdiri di atas tanah dengan luas 6.000 m² Sertipikat Hak Pakai No. 15 tanggal 17 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan RTA. Milono No. 9 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya saat ini mempunyai gedung perkantoran dengan sarana dan prasarana ruangan sebagai berikut:

- Ruang Ketua;
- Ruang Wakil Ketua;
- Ruang Panitera;
- Ruang Sekretaris;
- Ruang Hakim Tinggi;
- Ruang Hakim Ad-Hoc TIPIKOR
- Ruang Panitera Pengganti;



- Ruang Perpustakaan;
- Ruang Dokter dan Laktasi;
- Ruang Wakil Panitera;
- Ruang Kepaniteraan Pidana dan Perdata
- Ruang Kepaniteraan TIPIKOR;
- Ruang Kepaniteraan Hukum;
- Ruang Arsip Perdata;
- Ruang Arsip Pidana;
- Ruang IT/ Server;
- Ruang Pengaduan/Akreditasi;
- Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan IT dan Ruang Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran;
- Ruang Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
- Ruang Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- Ruang Kabag Umum dan Keuangan;
- Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian;
- Ruang Aula Pertemuan Isen Mulang;
- Ruang Sidang Utama;
- Mushola;
- Gudang;
- Toilet.

2. Rumah Dinas

- a) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 2.000 m² Sertipikat nomor 22 tanggal 08 januari 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung



Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 27 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- b) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.500 m² Sertipikat nomor 23 tanggal 19 maret 1981 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan M.H. Thamrin No. 29 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- c) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 34 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- d) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 372 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 7 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- e) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.181 m² Sertipikat nomor 373 tanggal 12 april 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Lambung Mangkurat No. 9 Palangka



Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- f) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 37 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- g) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah luas 750 m² dengan Sertipikat nomor 824 tanggal 20 februari 1985 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 18 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- h) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 120 m² Golongan I tipe B Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 1.200 m² Sertipikat nomor 36 tanggal 17 mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan G. Obos No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- i) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m² Sertipikat nomor 1394 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 26 Palangka Raya, Kalimantan

Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- j) Satu unit rumah dinas dengan dengan luas bangunan 70 m² Golongan I tipe C Permanen, berdiri diatas tanah dengan luas 600 m² Sertipikat nomor 1395 tanggal 04 juli 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Baban No. 28 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai berikut:

- a) Pengadaan/pembangunan dan pengembangan

Dalam hal tersebut diatas terdapat anggaran pengadaan pembangunan dan pengembangan pada DIPA Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun Anggaran 2016 berupa :

- Penggantian Keramik Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Perbaikan Jembatan dan Pengaspalan Jalan Halaman Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- b) Pemeliharaan/perawatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana tetap dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2016 meliputi perbaikan/service AC, PC Komputer, Printer, Jaringan Instalasi Listrik, Kendaraan Dinas/Operasional baik roda 4 maupun roda 2, rumah dinas serta pemeliharaan gedung kantor.



NO	Nama BMN	JUMLAH
1	Kendaraan Dinas Roda 4	5
2	Kendaraan Dinas Roda 2	8
3	Mesin Ketik Manual Standard (14–16 Inchi)	3
4	Lemari Besi/metal	3
5	Lemari Kayu	53
6	Rak Besi	4
7	Rak Kayu	12
8	Filing Cabinet Besi	12
9	Brandkas	2
10	Buffet	4
11	White Board	11
12	Alat Detektor Barang Terlarang/x Ray	2
13	Mesin Absensi	1
14	Penangkal Petir	1
15	Lcd Projector/infocus	2
16	Perkakas Kantor Lainnya	4
17	Meja Kerja Kayu	67
18	Kursi Besi/metal	200
19	Kursi Kayu	39
20	Sice	9
21	Bangku Panjang Kayu	12
22	Meja Rapat	9
23	Meja Komputer	10



24	Meja Telepon	4
25	Meja Resepsionis	13
26	Kasur/spring Bed	1
27	Meja Makan Kayu	1
28	Jam Elektronik	8
29	Mesin Penghisap Debu/vacum Cleaner	1
30	Mesin Pemotong Rumput	1
31	Lemari Es	1
32	A.c. Window	2
33	A.c. Split	28
34	Kipas Angin	12
35	Televisi	5
36	Loudspeaker	9
37	Sound System	1
38	Microphone	15
39	Microphone Table Stand	4
40	Unit Power Supply	6
41	Stabilisator	2
42	Lambang Garuda Pancasila	3
43	Gambar Presiden/wakil Presiden	2
44	Tiang Bendera	2
45	Tangga Aluminium	1
46	Kaca Hias	7
47	Dispenser	4



48	Mimbar/podium	1
49	Palu Sidang	1
50	Lambang Instansi	1
51	Karpet	4
52	Gordyin/kray	3
53	Kabel Roll	6
54	Asbak Tinggi	5
55	Kabel	3
56	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
57	Audio Mixing Portable	2
58	Compact Disc Player (peralatan Studio Audio)	1
59	Intercom Unit	10
60	Modulation Monitor Speaker Kabaret	1
61	Microphone/wireless Mic	2
62	Microphone/boom Stand	2
63	Uninterruptible Power Supply (ups)	1
64	Power Amplifier	1
65	Camera Digital	1
66	Lcd Monitor	2
67	Telephone (pabx)	15
68	Pesawat Telephone	2
69	Handy Talky (ht)	4
70	Facsimile	2
71	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	2



72	Antene Mf/mw Portable	1
73	Genset	1
74	P.c Unit	25
75	Lap Top	13
76	Personal Komputer Lainnya	2
77	Monitor	2
78	Printer (peralatan Personal Komputer)	22
79	Scanner (peralatan Personal Komputer)	1
80	Keyboard (peralatan Personal Komputer)	2
81	Peralatan Personal Komputer Lainnya	4
82	Server	2
83	Router	4
84	Hub	2
85	Rak Server	1
86	Wireless Access Point	14
87	Peralatan Jaringan Lainnya	3
88	Alat Badminton	1
89	Monografi	7362
90	Software Komputer	3

c) Penghapusan

Tidak terdapat penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung untuk tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.



Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang dilaksanakan dalam tahun 2016 ini dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

- a) Pengadaan Peralatan dan Inventaris Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun 2016 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS	NILAI TOTAL (Rp.)
1	1 (satu) Paket Panasonic PABX TES824ND 8 line 24 Extension	1 Set	15.700.000,-
2	AC Panasonic 1 1/2 PK PN12RKJ	5 Unit	25.500.000,-
3	AC Panasonic 1 PK UV9RKP	1 Unit	3.600.000,-

- b) Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun 2016 yaitu:

NO	NAMA	KUANTITAS	NILAI TOTAL (Rp.)
1	Laptop DELL Vostro 14 5480	2 Unit	28.992.000,-
2	Laptop HP 15-AF109AX	1 Unit	6.120.000,-
3	PC HP Pavilion Slimline 450-225L	4 Unit	40.579.200,-
4	Printer Epson M200	1 Unit	3.240.000,-
5	Printer HP Laserjet P1102	2 Unit	2.880.000,-
6	Printer Canon Pixma MX497	1 Unit	1.800.000,-



7	Mikrotik RB750GR2	1 Unit	936.000,-
---	-------------------	--------	-----------

Pengadilan Tinggi Palangka Raya memiliki sarana kendaraan dinas yang terdiri dari 5 buah kendaraan roda empat dan 8 buah kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut :

- a) Mobil dengan nomor polisi KH 8; type Sedan; merk Toyota Altis; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: 1ZZ4460122; nomor rangka: MR053ZEC257402486; nomor BPKB: D8456618G; tahun perolehan 2008, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- b) Mobil dengan nomor polisi KH 26; type Vios 1,5 G M/T; merk Toyota Vios G G/T; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1NZX847105; nomor rangka: MR053HY9389018098; nomor BPKB: F7391880G; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- c) Mobil dengan nomor polisi KH 97; type Kijang V ; merk Toyota; tahun pembuatan 2011; nomor mesin: 1TR7153119; nomor rangka: MHFXW4367B4058717; nomor BPKB: I-06795484M; tahun perolehan 2011, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding Palangka Raya.
- d) Mobil dengan nomor polisi KH 95; type Kijang Innova; merk Toyota; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: 1TR6639606; nomor rangka: MHFXW41G580032720; nomor BPKB: F6668783M; tahun perolehan 2009, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya.



- e) Mobil dengan nomor polisi KH 704 AU; type Station Wagon; merk Toyota Kijang; tahun pembuatan 2001; nomor mesin: 7K0396434; nomor rangka: MHF11KF8010064325; nomor BPKB: B0703017M; tahun perolehan 2001, tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai mobil dinas Operasional Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- f) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2616 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1255450; nomor rangka: MH1JB21133K258193; nomor BPKB: C6280699M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- g) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 2617 AM; merk Honda Kharisma 125; tahun pembuatan 2003; nomor mesin: JB21E1258271; nomor rangka: MH1JB21113K260850; nomor BPKB: C6280700M; tahun perolehan 2003 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kasubbag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- h) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3829 AY; merk Honda Win 100; tahun pembuatan 1996; nomor mesin: HAE2270994; nomor rangka: MH1HA000SSK171432; nomor BPKB: A3697858M; tahun perolehan 1996 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- i) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3646 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1553144; nomor rangka: MH1JB22105K554516; nomor BPKB: D8617805M; tahun perolehan 2005



tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

- j) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 3647 AY; merk Honda Kharisma; tahun pembuatan 2005; nomor mesin: JB22E1563566; nomor rangka: MH1JB221X5K564146; nomor BPKB: D8617806M; tahun perolehan 2005 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- k) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4889 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555259; nomor rangka: MH8EN125A8J555657; nomor BPKB: F2394460M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- l) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 4890 AY; merk Suzuki Thunder; tahun pembuatan 2008; nomor mesin: F4051D555301; nomor rangka: MH8EN125A8J555740; nomor BPKB: F2394461M; tahun perolehan 2008 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- m) Sepeda Motor dengan nomor polisi KH 5002 AY; merk Honda Supra X; tahun pembuatan 2009; nomor mesin: JB91E1660806; nomor rangka: MH1JB91189K664018; nomor BPKB: F6090295M; tahun perolehan 2009 tercatat atas nama Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan digunakan sebagai



kendaraan dinas Operasional Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah

Pengadilan Umum se-Kalimantan Tengah per 31 Desember 2016 memiliki aset yang berjumlah 129.368.388.759 Yang terdistribusi sebagai berikut:

- Persediaan dengan nilai aset 31.300.740
- Tanah dengan nilai aset 31.365.954.969
- Peralatan dan mesin dengan nilai aset 16.832.919.023
- Gedung dan Bangunan dengan nilai aset 62.460.973.879
- Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai aset 1.916.049.636
- Aset Tetap Lainnya dengan nilai aset 126.467.788
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai aset 14.997.711.515
- Aset Tak Berwujud dengan nilai aset 90.362.254
- Aset Yang dihentikan dari penggunaan dengan nilai aset 1.546.648.955

Adapun rincian aset seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Persediaan

Jumlah aset persediaan berjumlah 31.300.740 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	AKUN PERSEDIAAN		
		Konsumsi	Bahan untuk Pemeliharaan	Persediaan Lainnya
1	PN Palangka Raya	3.790.100	2.868.395	161.340



2	PN Pangkalan Bun	9.290.020	0	0
3	PN Muara Teweh	1.381.450	0	0
4	PN Kuala Kapuas	1.408.500	0	0
5	PN Buntok	2.300.705	0	0
6	PN Sampit	891.850	719.000	118,980
7	PT Palangka Raya	0	0	0
8	PN Tamiang Layang	0	0	0
9	PN Kasongan	7.321.400	1.049.000	0
TOTAL		26.384.025	4.636.395	280.320

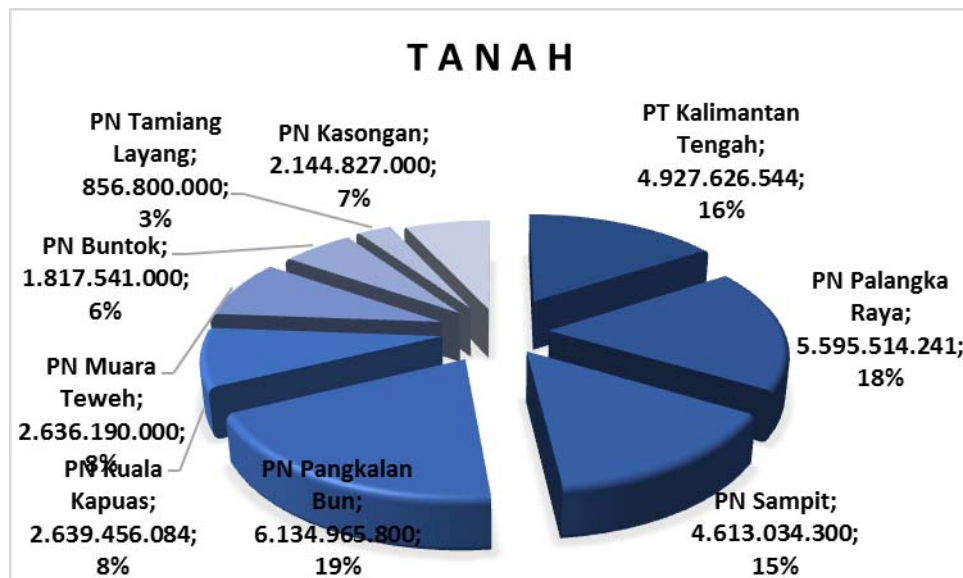
- **Tanah**

Jumlah aset tanah berjumlah 31.365.954.969 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Tanah
1	PT Kalimantan Tengah	4.927.626.544
2	PN Palangka Raya	5.595.514.241
3	PN Sampit	4.613.034.300
4	PN Pangkalan Bun	6.134.965.800
5	PN Kuala Kapuas	2.639.456.084
6	PN Muara Teweh	2.636.190.000
7	PN Buntok	1.817.541.000
8	PN Tamiang Layang	856.800.000

9 PN Kasongan	2.144.827.000
TOTAL	31.365.954.969

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset tanah seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



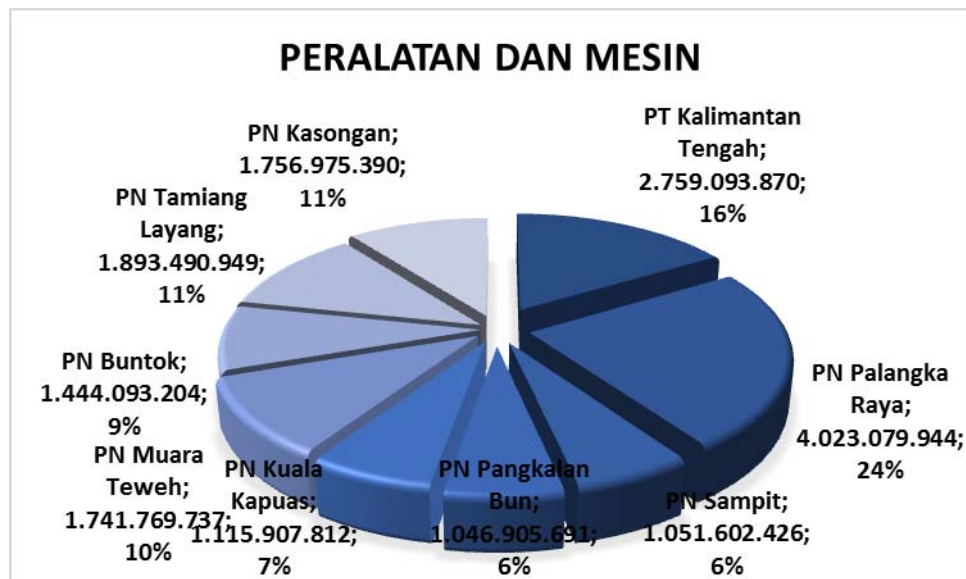
- Peralatan dan Mesin

Jumlah aset Peralatan dan Mesin berjumlah 16.832.919.023 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Peralatan dan Mesin
1	PT Kalimantan Tengah	2.759.093.870
2	PN Palangka Raya	4.023.079.944
3	PN Sampit	1.051.602.426
4	PN Pangkalan Bun	1.046.905.691
5	PN Kuala Kapuas	1.115.907.812
6	PN Muara Teweh	1.741.769.737
7	PN Buntok	1.444.093.204
8	PN Tamiang Layang	1.893.490.949

9 PN Kasongan	1.756.975.390
TOTAL	16.832.919.023

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset Peralatan dan Mesin seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



- Gedung dan Bangunan

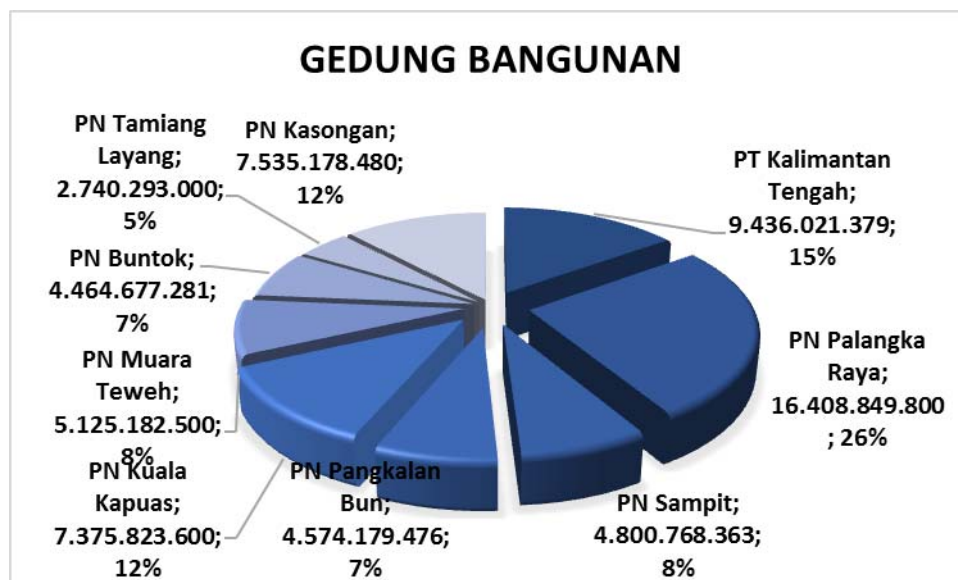
Jumlah aset gedung dan bangunan berjumlah 62.460.973.879 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Gedung dan Bangunan
1	PT Kalimantan Tengah	9.436.021.379
2	PN Palangka Raya	16.408.849.800
3	PN Sampit	4.800.768.363
4	PN Pangkalan Bun	4.574.179.476
5	PN Kuala Kapuas	7.375.823.600
6	PN Muara Teweh	5.125.182.500
7	PN Buntok	4.464.677.281
8	PN Tamiang Layang	2.740.293.000
9	PN Kasongan	7.535.178.480

TOTAL

62.460.973.879

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai gedung dan bangunan seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



- Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan berjumlah 1.916.049.636 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
		Jalan dan Jembatan	Irigasi	Jaringan
1	PT Kalimantan Tengah	299.988.000	0	0
2	PN Palangka Raya	1.255.118.000	0	0
3	PN Sampit	0	0	0
4	PN Pangkalan Bun	259.408.636	0	19.930.000
5	PN Kuala Kapuas	0	0	61.855.000
6	PN Muara Teweh	0	0	49.750.000
7	PN Buntok	0	0	0



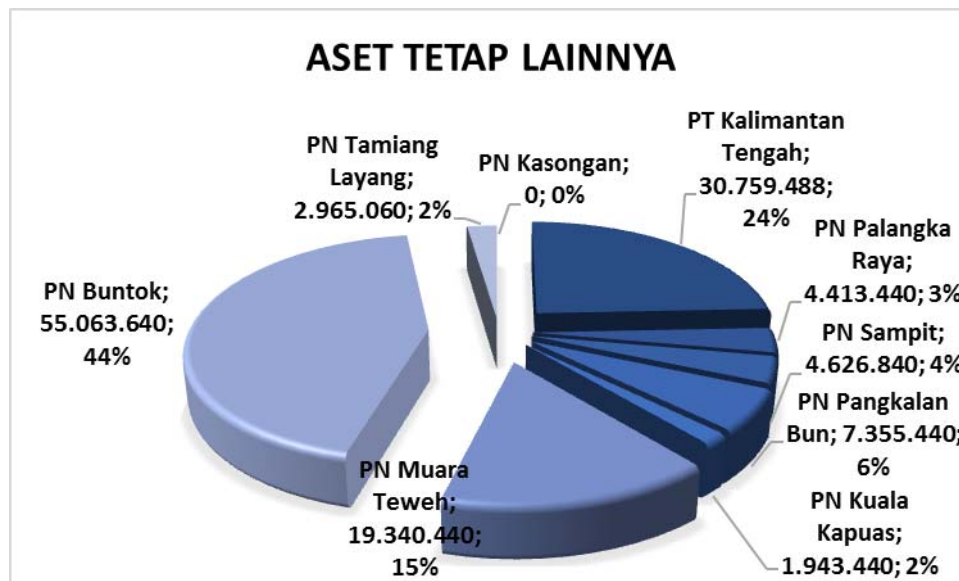
8	PN Tamiang Layang	0	0	0
9	PN Kasongan	0	0	0
TOTAL		1.814.514.636		131.535.000

- **Aset Tetap Lainnya**

Jumlah aset tetap lainnya berjumlah 126.467.788 dan rinciannya pada PN sekalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Aset Tetap Lainnya
1	PT Kalimantan Tengah	30.759.488
2	PN Palangka Raya	4.413.440
3	PN Sampit	4.626.840
4	PN Pangkalan Bun	7.355.440
5	PN Kuala Kapuas	1.943.440
6	PN Muara Teweh	19.340.440
7	PN Buntok	55.063.640
8	PN Tamiang Layang	2.965.060
9	PN Kasongan	0
TOTAL		126.467.788

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset tetap lainnya seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:

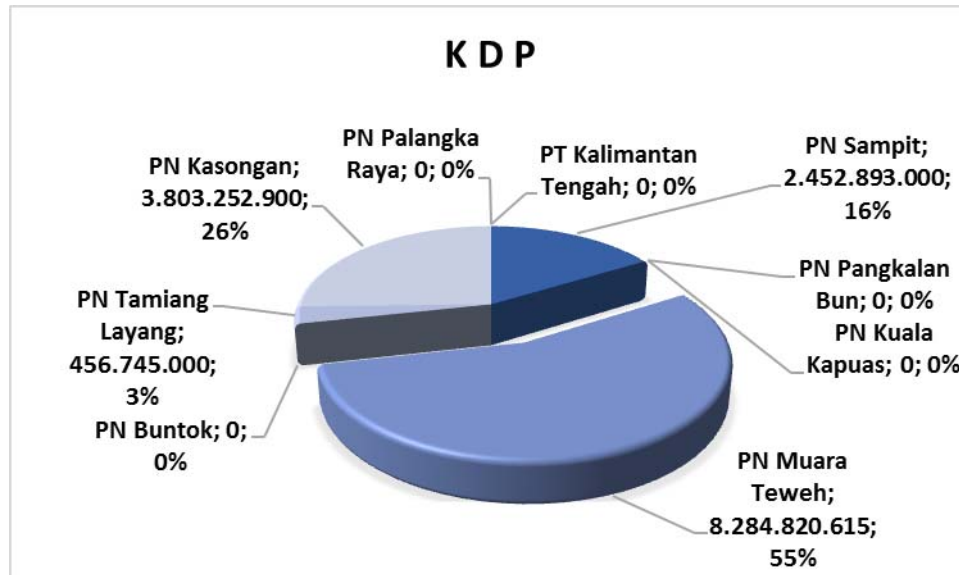


- **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Jumlah aset dalam proses pengerjaan (KDP) berjumlah 14.997.711.515 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	KDP
1	PT Kalimantan Tengah	0
2	PN Palangka Raya	0
3	PN Sampit	2.452.893.000
4	PN Pangkalan Bun	0
5	PN Kuala Kapuas	0
6	PN Muara Teweh	8.284.820.615
7	PN Buntok	0
8	PN Tamiang Layang	456.745.000
9	PN Kasongan	3.803.252.900
TOTAL		14.997.711.515

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai konstruksi dalam pengerjaan seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



- Aset tak Berwujud

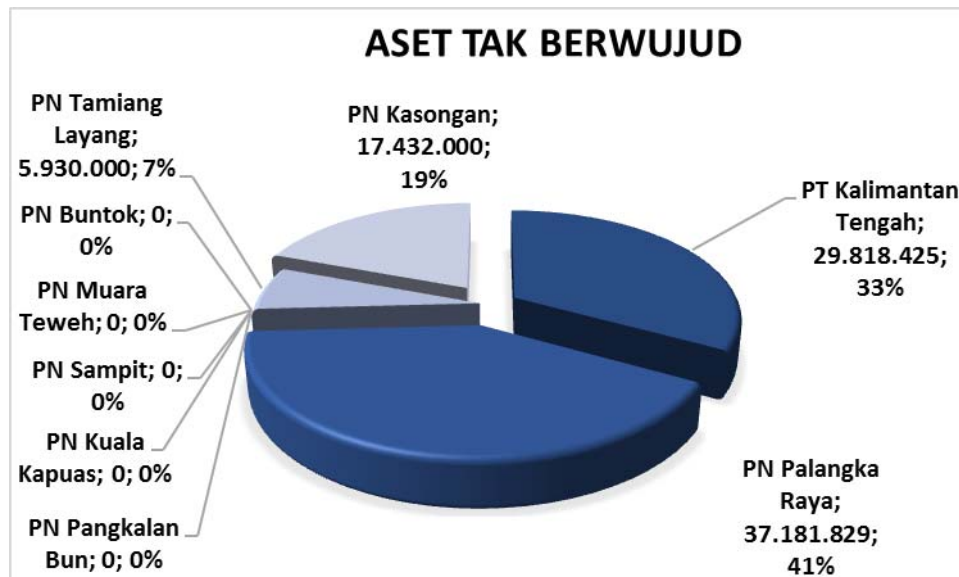
Jumlah aset tak berwujud berjumlah 90.362.254 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Aset tak Berwujud
1	PT Kalimantan Tengah	29.818.425
2	PN Palangka Raya	37.181.829
3	PN Sampit	0
4	PN Pangkalan Bun	0
5	PN Kuala Kapuas	0
6	PN Muara Teweh	0
7	PN Buntok	0
8	PN Tamiang Layang	5.930.000
9	PN Kasongan	17.432.000

TOTAL

90.362.254

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset tak berwujud seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



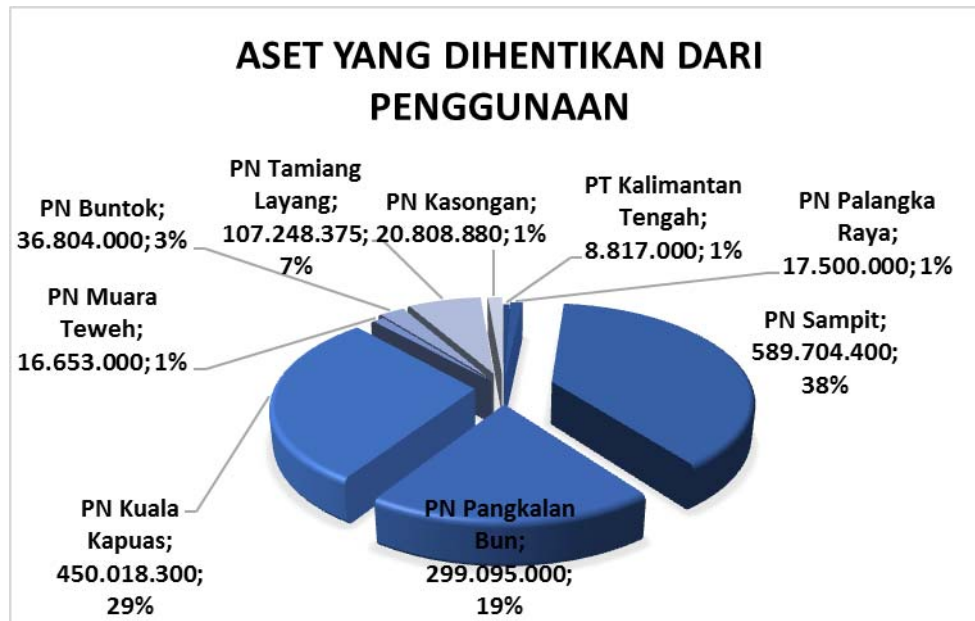
- Aset Yang Dihentikan dari Penggunaan

Jumlah aset lain-lain berjumlah 1.546.648.955 dan rinciannya pada PN se-kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Aset yang dihentikan dari Penggunaan
1	PT Kalimantan Tengah	8.817.000
2	PN Palangka Raya	17.500.000
3	PN Sampit	589.704.400
4	PN Pangkalan Bun	299.095.000
5	PN Kuala Kapuas	450.018.300
6	PN Muara Teweh	16.653.000
7	PN Buntok	36.804.000
8	PN Tamiang Layang	107.248.375

9 PN Kasongan	20.808.880
TOTAL	1.546.648.955

Jika digambarkan dengan diagram batang, maka perbandingan nilai aset lain-lain seluruh satuan kerja adalah sebagai berikut:



Aset tanah yang digunakan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan berjumlah 142,904 M² atau sekitar 87,31 % dari total aset tanah yang berukuran 163,670 M². Adapun rincian aset tanah baik yang lahan kosong maupun lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan adalah sebagai berikut:

	SATUAN	LUAS	NILAI ASET
TANAH		163.670	31.365.954.969
Tanah Bangunan	M2	14.349	4.763.451.000
Rumah Negara			
Golongan I			



Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	32.698	5.530.666.084
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	0	0
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	95.857	20.684.807.885
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya		0	0
Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	M2	20.766	387.030.000

Sedangkan jumlah aset yang merupakan sarana gedung berjumlah 108 buah, yang bernilai 62,897,855,079 yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NAMA ASET	SATUAN	KUANTITAS	NILAI ASET
GEDUNG DAN BANGUNAN		108	62.897.855.079
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	29	52.882.830.984
Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	293.691.300



Semi Permanen			
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya		0	0
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	40.775.300
Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	258.513.581
Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	0	0
Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	126.016.000
Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	1	191.923.000
Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	160.105.000
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Unit	10	1.396.470.376
Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	9	1.256.291.500
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	10	897.568.700
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	8	1.830.676.850
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	75.877.300
Rumah Negara Golongan II	Unit	13	1.254.264.013

Tipe C Permanen			
Rumah Negara Golongan II	Unit	8	453.982.600
Tipe C Semi Permanen			
Rumah Negara Golongan III	Unit	0	0
Tipe B Permanen			
Rumah Negara Golongan III	Unit	0	0
Tipe C Permanen			
Rumah Negara Golongan III	Unit	0	0
Tipe C Semi Permanen			
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	Unit	5	76.188.200
Pagar Permanen	Unit	7	1.702.680.375

D. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Umum se-Wilayah hukum Kalimantan Tengah memperoleh jumlah anggaran sebesar Rp. 60,857,348,000 yang tersebar ke dalam 3 jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal yang tersebar di dalam 2 DIPA Yaitu DIPA BUA (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA BADILUM (Badan Peradilan Umum).

Sedangkan Realisasi belanja seluruhnya adalah Rp. 58,474,069,381 atau sekitar 96,08 % dari PAGU anggarannya, dengan penyebaran DIPA Badan Urusan Administrasi Pagunya 60.149.890.000 dan realisasi sebesar Rp 57.796.629.728 atau 96.09 %, sedangkan DIPA

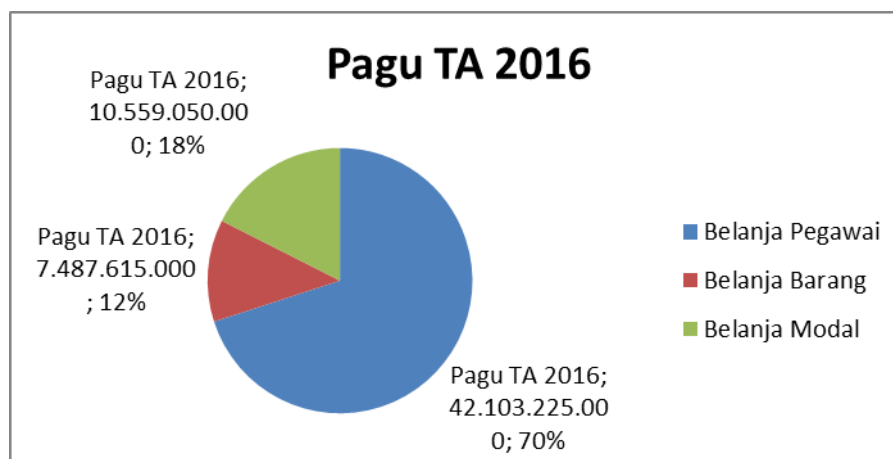


Badan Peradilan Umum dengan PAGU Rp. 707,458,000 dan realisasinya sebesar Rp. 677,439,653 atau sekitar 95,76 %.

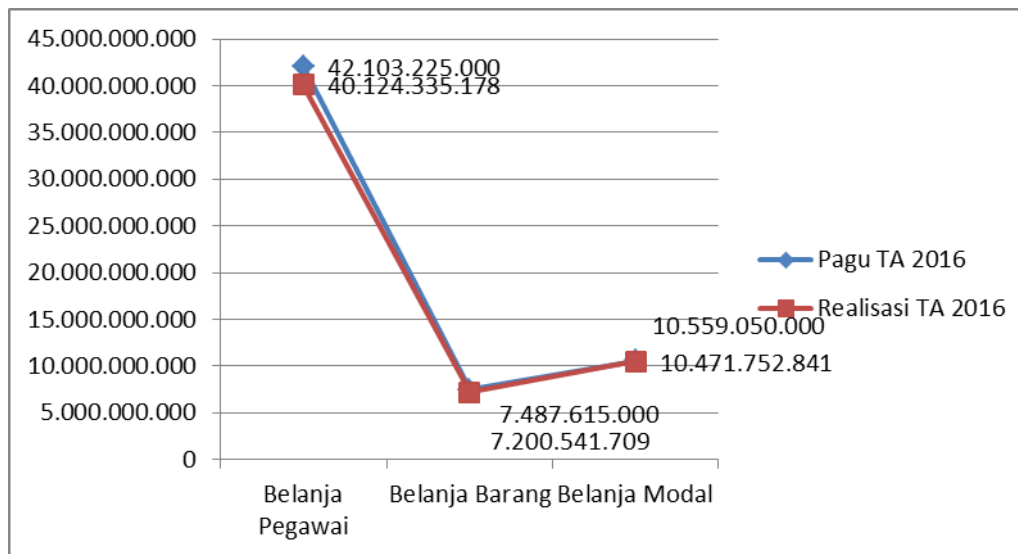
Untuk DIPA BUA pagu dan realisasi tiap jenis belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	42,103,225,000	40,124,335,178	95.30%
Belanja Barang	7,487,615,000	7,200,541,709	96.17%
Belanja Modal	10,559,050,000	10,471,752,841	99.17%
Total	60,149,890,000	57,796,629,728	96.09%

Jika dilihat dari pagu anggaran selama tahun 2016, maka distribusi penyebaran anggaran paling besar adalah di Belanja Pegawai, yaitu 42,103,225,000 atau sekitar 70% dari jumlah Pagu anggaran yang ada, kemudian disusul oleh Belanja Modal sebesar 10,559,050,000 atau sekitar 18% dari total pagu anggaran, dan belanja barang dengan nilai pagu 7,487,615,000 atau sekitar 12% dari total pagu.



Sementara itu realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Untuk DIPA BADILUM hanya terdiri dari satu jenis belanja yaitu belanja barang (MAK 52). Total Pagu pada DIPA Badilum adalah berjumlah 707,458,000. Dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 677,439,653 atau 95.76% dari Pagu Anggarannya

Jika dilihat dari Program yang dilaksanakan, maka Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah terdiri dari 3 (tiga) program yang tersebar di dalam 2 DIPA yaitu DIPA BUA dan DIPA BADILUM

DIPA BUA

- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu sebesar 49,590,840,000 dan realisasi sebesar 47,317,976,887 atau 95,42%
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI dengan pagu sebesar 10,559,050,000 dan realisasi sebesar 10,471,752,841 atau 99,17%

DIPA BADILUM

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pagu 707,458,000 dan realisasi 677,439,653 atau 97,56%



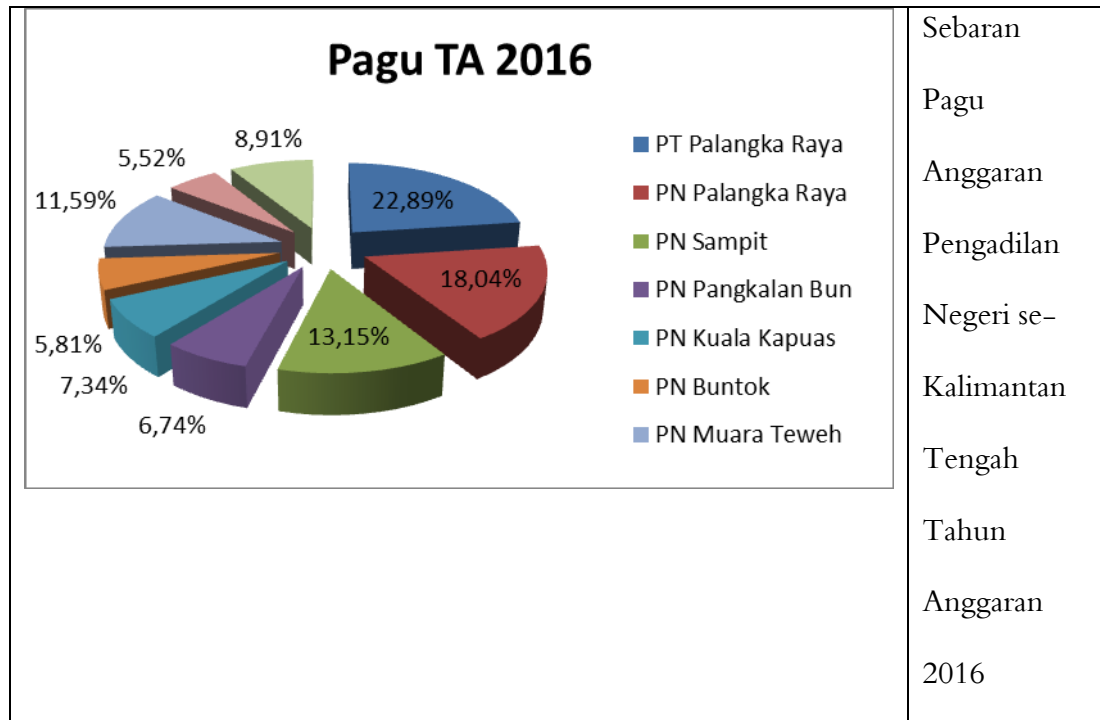
Adapun secara rinci Pagu dan realisasi pada tiap Pengadilan Negeri per DIPA Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DIPA BUA

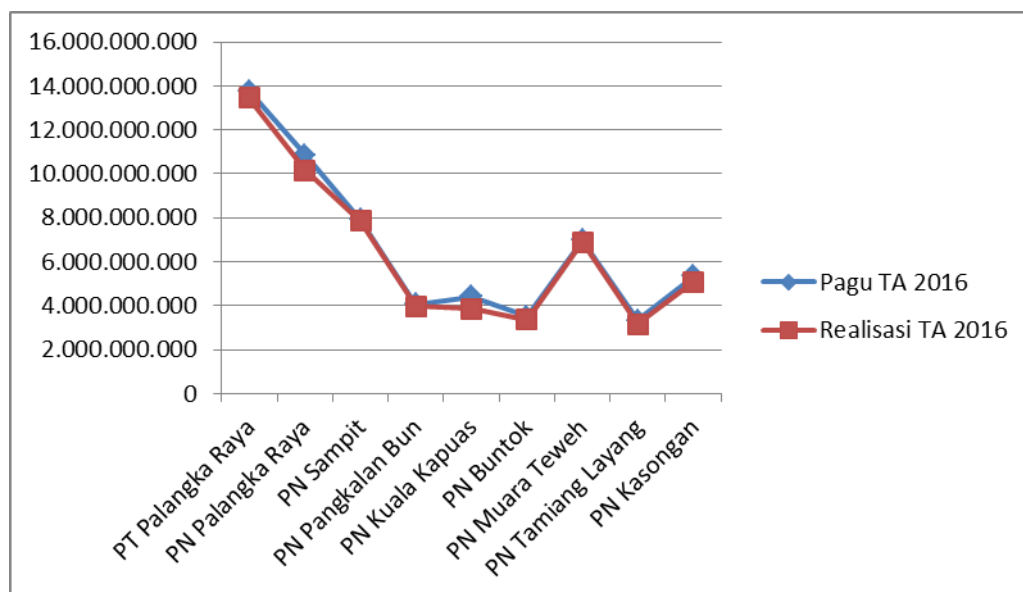
Program ini meliputi Belanja Pegawai (MAK 51), Belanja Barang (MAK 52) dan Belanja Modal (MAK 53). Total PAGU pada program ini adalah sebesar Rp. 60,149,890,000. Dari pagu tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 57,796,629,728 atau 96.09 % dari pagu Anggarannya. Adapun secara rinci pagu dan Realisasi DIPA BUA tiap Pengadilan Negeri se-Wilayah Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

N o	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	PT Palangka Raya	13,768,546,000	13,457,613,614	97.74
2	PN Palangka Raya	10,853,666,000	10,166,661,459	93.67
3	PN Sampit	7,912,624,000	7,844,171,541	99.13
4	PN Pangkalan Bun	4,051,286,000	3,973,361,726	98.08
5	PN Kuala Kapuas	4,415,553,000	3,866,133,782	87.56
6	PN Buntok	3,496,908,000	3,362,991,686	96.17
7	PN Muara Teweh	6,973,611,000	6,882,687,198	98.70
8	PN Tamiang Layang	3,320,583,000	3,148,028,828	94.80
9	PN Kasongan	5,357,113,000	5,094,979,894	95.11
	JUMLAH	60,149,890,000	57,796,629,728	96.09

Dapat pula dilihat realisasi anggarannya pada diagram berikut :



Apabila dilihat realisasi anggarannya pada grafik linear adalah sebagai berikut:



1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Secara umum untuk Belanja Pegawai ini, realisasi sudah mencapai 95,3% dari pagu anggaran yaitu Rp 42,103,225,000 dengan nilai realisasi

40,124,335,178. Dapat dilihat bahwa realisasi secara keseluruhan Belanja Pegawai pada Pengadilan se-Wilayah Kalimantan Tengah adalah sudah mencapai persentase 95.30 % .

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,437,239,000	13,246,666,780	98.58
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	228,000	168,382	73,85
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	923,825,000	902,916,364	97.74
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	266,183,000	258,230,807	97.01
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	329,982,000	322,425,000	97.71
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	16,882,077,000	16,155,740,000	95.70
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,016,084,000	2,664,140,445	88.33
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	729,337,000	687,668,400	94.29
9	511129	Belanja Uang Makan	2,282,765,000	2,083,050,000	91.25



PNS					
10	511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	41,970,000	0	0,00
11	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	308,067,000	153,205,000	49.73
12	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1,305,826,000	1,179,900,000	90.36
13	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,254,620,000	2,146,420,000	95.20
14	512211	Belanja Lembur	325,022,000	323,804,000	99.63
		TOTAL	42,103,225,000	40,124,335,178	95.30

2. Belanja Barang

Secara umum untuk Belanja Barang ini, realisasinya adalah 96,17 % dari PAGU anggarannya. Adapun realisasi per belanja barang dapat dilihat secara rinci di bawah ini :

Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu



satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja keperluan perkantoran;
- b. Belanja pengadaan bahan makanan;
- c. Belanja penambah daya tahan tubuh;
- d. Belanja bahan;
- e. Belanja pengiriman surat dinas;
- f. Honor yang terkait dengan operasional Satker;
- g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
- h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
- i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
- j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja;
- k. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Adapun Pagu dan realisasi dari Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,890,555,000	1,877,916,254	99,33
2	521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	7,512,000	7,440,000	99.04



3	521114	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108,958,000	111,664,014	102.48
4	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	434,240,000	447,600,000	103.08
5	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	119,175,000	117,647,643	98.72
TOTAL			2,560,440,000	2,562,267,911	100.07

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

Jenis pengeluaran terdiri antara lain:

- a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;
- b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
- c. Belanja jasa konsultan;
- d. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;
- e. Belanja jasa profesi;
- f. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
- g. Belanja jasa;
- h. Belanja perjalanan;



- i. Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
- j. Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
- k. Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
- l. Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja non operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521211	Belanja Bahan	197,474,000	179,203,909	90.75
2	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21,000,000	16,000,000	76.19
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	74,600,000	62,855,600	84.26
		TOTAL	293,074,000	258,059,509	88,05

Belanja Barang Persediaan

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja barang persediaan dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	488,719,000	551,665,020	112.88
2	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	9,703,000	9,000,000	92.75
		TOTAL	498,422,000	560,665,020	112.49

Belanja Jasa

Adapaun Belanja Jasa meliputi belanja Sewa Langganan Listrik, Telepon, Air, sewa rumah dan sifatnya suatu satuan kerja menerima jasa dari pemberi jasa dan wajib membaur atas jasa yang telah diterima.

Adapun pagu dan realisasi belanja Jasa dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	522111	Belanja Langganan Listrik	962,364,000	827,127,413	85.95
2	522112	Belanja Langganan Telepon	58,526,000	29,690,180	50.73
3	522113	Belanja Langganan Air	79,448,000	67,623,660	85.12
4	522141	Belanja Sewa	118,000,000	76,000,000	64.41
5	522191	Belanja Jasa Lainnya	100,000	0	0
		TOTAL	1,218,438,000	1,000,441,253	82.11



Belanja Pemeliharaan

Adalah belanja yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan.

Adapun pagu dan realisasi belanja pemeliharaan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	990,163,000	1,003,457,762	101.34
2	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	117,226,000	88,511,188	75.50
3	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	754,192,000	707,684,907	93.83
4.	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	21,460,000	21,019,700	97.95
		TOTAL	1,883,041,000	1,820,673,557	96.69



Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Adapun pagu dan realisasi belanja perjalanan dalam negeri dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,009,160,000	975,034,459	96.62
2	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	24,460,000	23,400,000	95.67
3	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	580,000	0	0
		TOTAL	1,034,200,000	998,434,459	96,54

Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.



Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset

Adapun pagu dan realisasi belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	10,000,000	9,574,200	95,74
2	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,153,000,000	2,143,870,141	99,58
3	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	300,000,000	299,988,000	100
4	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	96,050,000	81,785,000	85,15
		TOTAL	10,559,050,000	10,471,752,841	99,17

Rincian Belanja Modal tiap Pengadiln adlaah sebagai berikut:

No	Nama Pengadiln	Nama Paket	Pagu	Realisasi
		Pengadaan		
1	Pengadiln Tinggi Palangka Raya	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	94,000,000	94,000,000



		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	50,000,000	50,000,000
		Pengadaan Gedung/Bangunan (Pengaspalan dan Keramik)	600,000,000	599,926,000
2	PN Palangka Raya	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	94,000,000	93,950,000
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	459,000,000	456,710,000
3	PN Pangkalan Bun	Pengadaan Sertifikat Tanah	10,000,000	9,574,200
		Pengadaan Jaringan Instalasi		
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	94,000,000	93,900,000
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	80,000,000	79,871,830
4	PN Muara Teweh	Pengadaan	3,500,000,000	3,484,859,000



		Gedung/Bangunan		
		Pengadaan Perangkat	94,000,000	93,700,000
		Pengolah Data dan Komunikasi		
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	400,000,000	399,213,311
5	PN Sampit	Pengadaan Perangkat	118,000,000	117,645,000
		Pengolah Data dan Komunikasi		
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	50,000,000	49,540,000
		Pengadaan Gedung /Bangunan	2,500,000,000	2,452,893,000
6	PN Kuala Kapuas	Pengadaan Perangkat	94,000,000	93,445,000
		Pengolah Data dan Komunikasi		
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100,000,000	96,000,000
		Pengadaan Jaringan / Instalasi	76,050,000	61,855,000
7	PN Kasongan	Pengadaan Perangkat	106,000,000	105,930,000



		Pengolah Data dan Komunikasi		
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	75,000,000	74,965,000
		Pengadaan Gedung dan Bangunan	1,500,000,000	1,498,845,500
8	PN Tamiang Layang	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	106,000,000	106,000,000
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	35,000,000	35,000,000
		Pengadaan Gedung dan Bangunan	200,000,000	200,000,000

2. DIPA BADILUM

Program ini meliputi hanya pada belanja barang. Total Pagu pada DIPA Badilum Rp. 707,458,000. Dari pagu tersebut anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 677,439,653 atau 95.76%. Adapun secara Rinci Pagu dan Realisasi Tiap Pengadilam Negeri se-Wilayah Kalimantan Tengah pada DIPA Badilum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	PT Palangka Raya	43,500,000	41,523,549	95.46



2	PN Palangka Raya	122,859,000	121,441,200	98.85
3	PN Sampit	89,818,000	84,461,208	94.04
4	PN Pangkalan Bun	207,931,000	202,591,896	97.43
5	PN Kuala Kapuas	58,470,000	55,000,000	94.07
6	PN Buntok	65,285,000	63,084,800	96.63
7	PN Muara Teweh	37,185,000	33,998,000	91.43
8	PN Tamiang Layang	48,085,000	43,546,000	90.56
9	PN Kasongan	34,325,000	31,793,000	92.62
		707,458,000	677,439,653	95.76

DIPA BADILUM Hanya terdiri atas 1 belanja, yaitu Belanja Barang dengan rincian belanja sebagai berikut:

Belanja Barang Operasional

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja barang operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521114	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,184,000	11,247,100	69.50
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,600,000	3,600,000	100.00
		TOTAL	19,784,000	14,847,100	75.05



Belanja Barang Non Operasional

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja non operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521211	Belanja Bahan	195,106,000	187,758,019	96,23
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,520,000	4,585,000	83,06
		TOTAL	200,626,000	192,343,019	95,87

Belanja Barang Persediaan

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja barang persediaan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	171,821,000	168,883,235	98.29
2	521813	Belanja Barang Persediaan Pita	894,000	683,000	76,40



		Cukai, Materai dan Leges			
		TOTAL	172,715,000	169,566,235	98,18

Belanja Jasa Konsultan

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja Jasa Konsultansi dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	522131	Belanja Jasa Konsultan	193,200,000	192,210,000	99,49
		TOTAL	193,200,000	192,210,000	99,49

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Adapun pagu dan realisasi anggaran belanja Perjalanan Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MAK	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	121,133,000	108,473,299	89,55
		TOTAL	121,133,000	108,473,299	89,55

E. Dukungan Teknologi dan Informasi

Teknologi Informasi (TI), adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat., mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi Teknologi Informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk pengelolaan penyimpanan dan penyebaran data baik berupa teks maupun numeric.

Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum se-Kalimantan Tengah menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja disemua bagian dalam upaya mewujudkan transparansi. Seluruh satuan kerja telah mempunyai website yang membuat informasi secara lengkap berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik itu dalam hal tugas pokok maupun tugas pendukung. Berikut alamat website Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan 8 satuan kerja dibawahnya :

No.	Nama Pengadilan	Alamat Website	Alamat E-mail
1.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah	https://pt-alangkaraya.go.id	pt_kalteng@yahoo.com
2.	Pengadilan Negeri Palangka Raya	http://pn-alangkaraya.go.id	pnpalangkaraya1@gmail.com
3.	Pengadilan Negeri Kasongan	http://pn-kasongan.go.id	pn.kasongan@gmail.com
4.	Pengadilan Negeri Sampit	http://pn-sampit.go.id	info@pn-sampit.go.id
5.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	http://pn-pangkalanbun.go.id	pangkalanbunpn@gmail.com
6.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	http://pn-kualakapuas.go.id	kualakapuaspn@gmail.com
7.	Pengadilan Negeri Muara Teweh	http://pn-muarateweh.go.id	pnmuarateweh1@gmail.com



8.	Pengadilan Negeri Buntok	http://pn-buntok.go.id	pn_buntok@yahoo.co.id
9.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	http://pn-tamianglayang.go.id	pntamianglayang@yahoo.co.id

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang administrasi pengadilan berbasis Teknologi Informasi di lingkungan peradilan umum. Dalam rangka mencapai sasaran dalam penerapan TI tersebut, peradilan umum harus memastikan kelengkapan dokumentasi , penyimpanan, manajemen dan publikasi data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya disebut dengan SIPP). Seluruh satuan kerja pengadilan tk. pertama se-kalimantan tengah telah melakukan dan melaksanakan update/pemutakhiran version terbaru untuk aplikasi SIPP yaitu version 3.1.5. Berikut alamat aplikasi SIPP berbasis web:

No.	Nama Pengadilan	Alamat Website
1.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah	https://sipp-banding.mahkamahagung.go.id
2.	Pengadilan Negeri Palangka Raya	http://sipp.pn-palangkaraya.go.id
3.	Pengadilan Negeri Kasongan	http://sipp.pn-kasongan.go.id
4.	Pengadilan Negeri Sampit	http://sipp.pn-sampit.go.id
5.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	http://sipp.pn-pangkalanbun.go.id
6.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	http://sipp.pn-kualakapuas.go.id
7.	Pengadilan Negeri Muara Teweh	http://sipp.pn-muarateweh.go.id
8.	Pengadilan Negeri Buntok	http://sipp.pn-buntok.go.id
9.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	http://sipp.pn-tamianglayang.go.id

F. Regulasi Tahun 2015

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya untuk memperoleh pengakuan dari lembaga penilai independen melalui audit penjaminan mutu sesuai standar internasional dengan menggunakan anggaran swadaya. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor:1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan akreditasi penjaminan mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan indonesia yang unggul / prima (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*).

Dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah, maka dipandang perlu melakukan akreditasi terhadap Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor:41/JPT/SK/OT.01.1/IV/2016 tanggal 25 April 2016, yang akan melakukan audit, penilaian dan evaluasi kinerja pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah. Tim Akreditasi mempunyai tugas:

1. Melakukan perumusan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan Pengadilan secara lengkap dan menyeluruh.
2. Menyusun Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.
3. Melakukan sosialisasi Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.
4. Melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.
5. Menyusun laporan seluruh kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menjadi satuan kerja pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang diajukan untuk diakreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah telah melakukan serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (*audit criteria*) terpenuhi, mulai membangun dan merencanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan apakah SMM tersebut sudah dijalankan. Guna terwujudnya tujuan akreditasi, maka telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh Unit di Pengadilan, yang meliputi:

1. Manajemen Peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan;
4. Administrasi Umum;

5. Pelayanan Publik
6. Pengelolaan Kas;
7. Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Pengawasan; dan
9. Penanganan Pengaduan.

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, bersama dengan 27 Pengadilan Negeri se-Indonesia, secara resmi menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Penyerahan sertifikat ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. DR. H. M. Hatta Ali, SH.,MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial serta Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 2 November 2016 di Mataram.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya kembali mencanangkan untuk melakukan akreditasi pada Pengadilan Negeri Kasongan-Buntok-Pangkalan Bun, dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya di tahun 2017. Dengan demikian, ditargetkan >50% satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah terakreditasi dan memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area

Untuk mendorong terwujudnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditetapkan regulasi-regulasi guna mendukung terwujudnya reformasi birokrasi.

1. Manajemen Perubahan

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:09/KPT/KP.04.6/SK/II/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Palangka Raya;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:50/KPT/PL.02/SK/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Tukar Gulimg/*Ruislag* tempat sidang (*zetting plaat*) Pengadilan Negeri Palangka Raya di Kabupaten Gunung Mas;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:61/KPT/OT.01.1/SK/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjukan Tim Penilai prestasi kerja ASN di wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam rangka HUT ke-71 Mahkamah Agung RI.

2. Perundang-undangan

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:02/KPT/HK.02/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:03/KPT/HK.02/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Petugas Pencatat Buku Induk Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:04/KPT/HK.02/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan

Petugas Pencatat Buku Penerimaan Uang Haka-hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

3. **Penataan dan Penguatan Organisasi**

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:41/KPT/OT.01.1/SK/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pembentukan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah tahun 2016;

4. **Penataan Tata Laksana**

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:60/KPT/HM.01.2/SK/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Panitia Persiapan *Ceremonial Launching* Akreditasi.

5. **Penataan Sistem Manajemen SDM**

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:05/KPT/KP.02.1/SK/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:07/KPT/KP.04.4/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pemindahan PNS di dalam Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

6. **Penguatan Akuntabilitas**

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:85/KPT/HK/SK/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:90/KPT/OT.01.2/SK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang



Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2016.

7. Penguatan Pengawasan

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:10/KPT/PS/SK/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) Se-Wilayah Hukum Kalimantan Tengah;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:11/KPT/PS/SK/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (Hatiwasbid);
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:77/KPT/PS/SK/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan Tim Pengawas Daerah Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:83/KPT/SK/HK/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016 tentang Panitia Penyelenggara Acara Pengambilan Sumpah Advokat Se-Kalimantan Tengah.

4

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Peradilan Tingkat Banding berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

Obyek pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah meliputi pengawasan intern Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan juga meliputi Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berjumlah 8 Pengadilan Negeri. Sedangkan ruang lingkup pengawasan rutin/ reguler meliputi :

- Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan dan evaluasi kegiatan.
- Administrasi peradilan yang terdiri dari administrasi perkara, administrasi persidangan, pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.
- Mutu pelayanan publik.
- Kinerja Pengadilan.

Pengawasan Intern

Guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih dan transparan, maka Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah



membentuk Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang yaitu Nomor 69/KPT/PS/SK/IX/2016 yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Hakim Tinggi	Keterangan
1	Bidang Perdata	Dolman Sinaga, SH. Bambang Kustopo, SH.,MH.	Pengawasan
2	Bidang Pidana Dan TIPIKOR	Umbu Jama, SH. Sucipto, SH., MH. Gatut Sulistyo, SH.,MH.	Pengawasan
3	Bidang Hukum	Bambang Widiyatmoko, SH.,MH. Pudji Tri Rahadi, SH.	Pengawasan
4	Bidang Umum dan Keuangan	Jonny Sitohang, SH., MH. Setyaningsih Wijaya,SH.,MH.	Pengawasan
5	Bidang Perencanaan, Kepegawaian dan IT	Dolman Sinaga, SH. H. Mirdin Alamsyah, SH.,MH. Gatut Sulistyo, SH.,MH.	Pengawasan
6	HUMAS	Tony Pribadi, SH, MH	Pengawasan
7	Exterior/ Tata Kelola Gedung dan Halaman Kantor	Setyaningsih Wijaya,SH.,MH. Endang Sri Widayanti, SH.,MH.	Penanggung Jawab
8	Interior / Kebersihan Gedung dan Estetika Ruang	Pudji Tri Rahadi, SH. H. Mirdin Alamsyah, SH.,MH.	Penanggung Jawab



9	Pembinaan Mental / Spiritual	Umbu Jama, SH. H. Mirdin Alamsyah, SH.,MH.	Pengawasan
10	Kesehatan dan Olahraga	Bambang Widiyatmoko, SH.,MH. Jonny Sitohang, SH., MH Sucipto, SH., MH.	Pengawasan
11	Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Peradilan	Tony Pribadi, SH, MH Bambang Kustopo, SH.,MH. Endang Sri Widayanti, SH.,MH.	Pembinaan
12	Monitoring Pelaksanaan SOP / SPP (Standar Pelayanan Peradilan)	Dolman Sinaga, SH. Jonny Sitohang, SH., MH Pudji Tri Rahadi, SH.	Pembinaan

Pengawasan Daerah

Guna meningkatkan fungsi Pengawasan Daerah di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah membentuk Hakim Pengawas Daerah yaitu Nomor.71/KPT/PS/SK/X/2016 yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	Daerah Pengawasan
1	WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI	KOORDINATOR



2	Bambang Widiyatmoko, SH.,MH. Dolman Sinaga, SH. Setyaningsih Wijaya,SH.,MH. Gatut Sulisty, SH.,MH.	PN PALANGKA RAYA
2	Umbu Jama, SH. Jonny Sitohang, SH., MH	PN SAMPIT
3	Tony Pribadi, SH, M.H. Bambang Kustopo, SH.,MH.	PN PANGKALAN BUN
4	Dolman Sinaga, SH. Tony Pribadi, SH, M.H.	PN KUALA KAPUAS
5	Bambang Kustopo, SH.,MH. Pudji Tri Rahadi, SH.	PN BUNTOK
6	Sucipto, SH., MH. H. Mirdin Alamsyah, SH.,MH.	PN MUARA TEWEH
7	Jonny Sitohang, SH., MH H. Mirdin Alamsyah, SH.,MH.	PN TAMIANG LAYANG
8	Umbu Jama, SH, MH Endang Sri Widayanti, SH.,MH.	PN KASONGAN

Pengawasan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Kalimantan Tengah rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pengawasan yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan

peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri di Wilayah Kalimantan Tengah dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap 8 Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dengan membentuk Tim Pengawas dengan obyek pengawasan meliputi :

- Administrasi perkara
- Administrasi persidangan
- Administrasi umum
- Manajemen peradilan
- Pelayanan publik

B. EVALUASI

Selesai melakukan pengawasan Tim Pengawas membuat laporan hasil pengawasan, untuk tahun 2016 sampai dengan bulan Desember hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:

- Pada umumnya seluruh Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung, namun masih perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan di bidang teknis maupun dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).
- Pada umumnya Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah pegawainya sangat kurang dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- Masih terdapat jabatan-jabatan yang dirangkap atau kosong karena kurangnya pegawai.

- Keseluruhan Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / CTS dengan baik dan setiap bulannya dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaannya.

Sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Kalimantan Tengah, bahwa di samping menerapkan *total justice* yang merupakan tugas pokok badan peradilan, integritas yang tinggi dan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga timbul kepercayaan dari masyarakat, juga akuntabilitas dan responsibilitas serta keterbukaan dan ketidakberpihakan untuk menjaga citra, wibawa dan martabat badan peradilan, harus tetap menjadi komitmen yang kuat dari segenap jajaran pengadilan di Kalimantan Tengah. Disamping itu telah dilaksanakan pula program mengadakan Akreditasi terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan akreditasi tersebut, Pada Hari Rabu, 2 November 2016 di Mataram diselenggarakan Acara Penyerahan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum bagi 28 Pengadilan Negeri se-Indonesia. Salah satu Pengadilan Negeri yang menerima adalah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang merupakan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non-Yudisial serta Dirjen Badan Peradilan Umum secara langsung menyerahkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Dimana Pengadilan Negeri Kuala Kapuas meraih nilai “A” dalam akreditasi, hal ini merupakan sebuah kebanggaan dan memotivasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk terus berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan-pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain.
2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).
3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.
4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu yang berkembang.

Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
2. Pelanggaran sumpah jabatan.
3. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif.
4. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidak pahaman.
5. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku.



6. Pelanggaran terhadap kode etik dan code of conduct Hakim.
7. Tindakan indisipliner.

Jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember ini berjumlah 45 (empat puluh lima) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN / TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	5	8
1.	4 Januari 2016	BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG RI / -	LAPORAN DUGAAN SUAP Menindaklanjuti surat pengaduan dari Drs. MENTENG ASMIN tertanggal 05 November 2015 nomor : 089 / LSM-LDW / KTG / XI / 2015, diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya melakukan Pemeriksaan mengenai kebenaran isi surat pengaduan dimaksud, dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi Berita cara Pemeriksaan (terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak – pihak yang dianggap perlu), Kesimpulan / Pendapat dan Rekomendasi / Saran.	Laporan Hasil Pemeriksaan sudah terkirim
2.	14 Januari 2016	CITIGOLD SURPLUS INTERNASIONAL LIMITED / -	Permohonan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Mahkamah Agung RI cq Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	-
3.	28 Januari 2016	KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI / -	Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas pengaduan Sdr. ANDREAS.	Arsip
4.	10 Februari 2016	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI / TIOMINA SIMANJUNTAK,SH	KESIMPULAN/REKOMENDASI DARI TIM PEMERIKSA TENTANG PENGADUAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PERKARA PERDATA NO : 67/PDT.G/2015/PN.PLR Setelah Mahkamah Agung RI melakukan penelitian terhadap hasil pemeriksaan yang dikirimkan oleh Tim Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya, hasil pemeriksaaan pengaduan tersebut disetujui untuk ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka kembali apabila ada bukti-bukti baru dan memulihkan nama baik Terlapor TIOMINA SIMANJUNTAK, SH selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palangka Raya.	Sudah selesai
5.	22 Februari 2016	PT. BANGUN NUSANTARA	MOHON PERLINDUNGAN HUKUM	Arsip



NO	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN / TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	5	8
		JAYA MAKMUR / -	PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur mohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah serta kepada Pejabat-pejabat yang berwenang lainnya, untuk berkenan menegur dan membatalkan serta memberikan sanksi hukum dan administrasi terhadap segala tindakan/perbuatan pihak Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dimaksud terhadap pihak PT. BNJM tersebut.	
6.	8 Maret 2016	LASMA ROMINA / -	EKSEKUSI PERKARA PERDATA	Arsip
7.	14 Maret 2016	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI / -	Pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengaduan dari Sdr. Chow Ya Chen	Laporan Hasil Pemeriksaan sudah terkirim
8.	14 Maret 2016	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI / -	HASIL PEMERIKSAAN Sdr. Abdul Kahar Mashuri NIP. 19721110 199303 1 002, Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a) Jabatan Jusrita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dijatuhi hukuman disiplin berat berupa " Pembebasan dari jabatan Jusrita Pengadilan Negeri palangka Raya" dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi selama 12 (dua belas) bulan sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 21 ayat 1 huruf c angka1 SK. KMA. Nomor 071/KMA/SK/V/2008.	Sudah selesai
9.	17 Maret 2016	KOMISI YUDISIAL R.I / -	PERMOHONAN BANTUAN Komisi Yudisial memanggil Panitera Pengganti a/n LIANAWATI guna didengar keterangannya terkait dengan laporan masyarakat yang telah terdaftar dalam register Nomor : 0224/L/KY/VI/2015. Komisi Yudisial berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat memerintahkan yang bersangkutan hadir dan agar menyediakan ruang pemeriksaan.	Diarsipkan (surat sebagai tembusan)
10.	24 Maret 2016	Y & K PARTNERS COUNSELLOR AT LAW (M. RASYID RIDHO,S.H.,M.H, PARLINDUNGAN MARPAUNG & TUBAGUS SYAQIEF HARIZANSYAH,SH) / -	MOHON PENJELASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM Para pihak yaitu PT. Bank Permata Tbk yang diwakili oleh kuasa hukumnya : M. RASYID RIDHO,S.H.,M.H, dkk merasa telah dirugikan dengan tidak adanya salinan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dikirimkan Pengadilan Negeri Sampit kepada para pihak yang berdampak terhadap jawaban yang tidak dapat	Sudah ditindaklanjuti



NO	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN / TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	5	8
			disampaikan oleh Pihak dalam Kontra Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini dan untuk itu Pihak memohon penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Sampit.	
11.	7April 2016	KOMISI YUDISIAL RI / RAJALI, S.H.,M.H (HAKIM AD HOC TIPIKOR) PN. PALANGKA RAYA	PEMBERITAHUAN Uraian Singkat : Laporan Masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor dahulu selaku Anggota Majelis Hakim perkara Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN.SMR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa Komisi Yudisial telah melakukan pembahasan atas Laporan dimaksud dalam Sidang Pleno Komisi Yudisial	Arsip
12.	8April 2016	ALUSPIANTO / -	Keberatan atas penangkapan dan penahanan a/n AGUSTIAN als AGUS Bin ALUSPIANTO	Arsip
13.	12April 2016	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI / -	SURAT TUGAS	Arsip
14.	21April 2016	KOMISI YUDISIAL RI / JONNY SITOANG, S.H.,M.H (HAKIM TINGGI PT. PALANGKA RAYA)	Pemberitahuan	Arsip
15.	21 April 2016	KOMISI YUDISIAL RI / ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H	Pemberitahuan	Arsip
16.	21 April 2016	KOMISI YUDISIAL RI / ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETTA, S.H (HAKIM PN. BUNTOK)	Pemberitahuan	Arsip
17.	21 April 2016	KOMISI YUDISIAL RI / M. NAJIB SHOLEH, S.H (HAKIM TINGGI PT. PALANGKA RAYA)	Pemberitahuan	-
18.	25 April 2016	PN. KLAS 1B SAMPIT / -	Mohon penjelasan dan perlindungan hukum.	Telah ditindaklanjuti
19.	25 April 2016	WENSI, S.Pd / Agus Hairuddin, S.H (Panitera perkara no. 124/Pdt.G/2015/PN.PLK)	Pengaduan terhadap Saudara Agus Hairuddin, S.H (Panitera perkara no. 124/Pdt.G/2015/PN.PLK)	Laporan Hasil Pemeriksaan telah dikirim tanggal 16 Juni 2016



NO	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN / TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	5	8
20.	28 April 2016	FACHRI MASHURI, S.H & REKAN / -	Tanggapan Surat	-
22.	18 Mei 2016	KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT / -	Tanggapan Surat (Surat yang diajukan oleh Ir. Fachri Mashuri, S.H)	Arsip
23.	23 Mei 2016	AMINUDDIN LINGGA, S.H & REKAN / KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Pengaduan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tidak melaksanakan Permohonan Eksekusi putusan perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Spt jo No.37/PDT/2013/PT.PR	Sudah ditindaklanjuti
24.	23 Mei 2016	AMINUDDIN LINGGA, S.H & REKAN / KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Klarifikasi Surat 3 Mei 2016 No. 203/Peks/Adv-AL&R/V/2016, perihal Pengaduan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tidak melaksanakan Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Spt jo No.37/PDT/2013/PT.PR	Sudah ditindaklanjuti
25	27 Mei 2016	KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT / -	Pengaduan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tidak/belum melaksanakan Pemohon Eksekusi putusan perkara perdata 04/Pdt.G/2012/PN.Spt jo No.37/PDT/2013/PT.PR (Penjelasan dari Ketua Pengadilan negeri Sampit)	Sudah ditindaklanjuti
26.	30 Mei 2016	JOHN EDDY TEGI / -	Laporan pemberitahuan adanya mafia peradilan Mahkamah Agung RI	Arsip
27.	30 Mei 2016	AMINUDDIN LINGGA, S.H & REKAN / KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Pengaduan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tidak/belum melaksanakan Permohonan Eksekusi putusan perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Spt jo No.37/PDT/2013/PT.PR	Sudah ditindaklanjuti
28.	1 Juni 2016	WENSI, S.Pd / Agus Hairuddin, S.H (Panitera perkara No. 124/Pdt.G/2015/PN.PLK)	Pencabutan atas pengaduan terhadap Saudara Agus Hairuddin, S.H (Panitera perkara) No. 124/Pdt.G/2015/PN.PLK	Sudah ditindaklanjuti
30.	8 Juni 2016	Pdt. ZAKARIA AGAN / -	Laporan Uraian singkat : - Meminta Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 41/Pdt/2015/PT.PLK tanggal 13 Agustus 2015 - Mengetahui baru hari ini (7 Juni 2016) sudah ada relas panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi II hari Selasa tanggal 26 April 2016	Proses pemeriksaan
31.	17 Juni 2016	Dr. HM. Rosihan Anwar (CV. Insan Cipta Karya) / -	Alasan-alasan tidak dijalankannya Permohonan Eksekusi putusan	
32.	20 Juni 2016	PELAPOR MASYARAKAT KEC. SERUYAN HULU/SULING TAMBUN / -	Laporan Pengaduan Dugaan Korupsi	Tembusan (Arsip)
33.	23 Juni 2016	Dr. HM. Rosihan Anwar (CV.	Susulan 1 alasan-alasan tidak dijalankannya Permohonan	-



NO	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN / TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	5	8
		Insan Cipta Karya) / -	Eksekusi Putusan	
34.	27 Juni 2016	AGUSTIAN / -	Melaporkan secara kronologis atas segala tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh nama : 1. DANI 2. RUDINI 3. RIFAN, terhadap perempuan bernama MEILA dan ARBANIA	-
35.	18 Agustus 2016	BADAN PENGAWASAN MA RI / -	Laporan / Pengaduan	Laporan Hasil Pemeriksaan sudah dikirim
36.	24 Agustus 2016	BADAN PENGAWASAN MA RI / -	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Perkara LHP Nomor : W16-U/0540/HK/IV/2016 ditutup.	Arsip
37.	31 Agustus 2016	JAMRI / -	Pengaduan berselingkuh dengan Istri saya. Uraian Singkat : Saudara Jamri melaporkan tentang perbuatan selingkuh istrinya dengan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Muara Teweh atas nama LUTHER SIANTURI.	Laporan Hasil Pemeriksaan telah dikirim.
38.	22 September 2016	AGUSTIAN / -	Keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 September 2016	Laporan Hasil Pemeriksaan telah dikirim
39.	7 September 2016	KOMISI YUDISIAL RI / -	Pemberitahuan Tujuan surat : Sdr. Mohamad Zakiuddin, S.H.	Tembusan (Arsip)
40.	7 September 2016	KOMISI YUDISIAL RI / -	Pemberitahuan Tujuan surat : Sdr. Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.	Tembusan (Arsip)
41.	29 September 2016	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI / -	Mohon tindakan lanjut atas perkara perdata	Tembusan (Arsip)
42.	30 September 2016	KOMISI YUDISIAL RI / -	Permintaan Informasi Uraian Singkat : Laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 47/Pdt.G/2010/PN. Spt., informasi tentang keberadaan Panitera Pengganti FALCON, S.H.	Tembusan (Arsip)
43.	8 November 2016	PENGADILAN NEGERI SAMPIT / Ahmad Gazali, S.H. (Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sampit)	Laporan Pemalsuan Penetapan Pengadilan	
44.	7 November 2016	KOMISI YUDISIAL RI / Sucipto, S.H.	PEMBERITAHUAN Uraian singkat : Laporan masyarakat tentang pelanggaran Kode Etik &	Tembusan (Arsip)



NO	TANGGAL PENERIMAAN	ASAL PENGADUAN / TERLAPOR	URAIAN SINGKAT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	5	8
			Pedoman Perilaku Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung.	
45.	7 Desember 2016	KOMISI YUDISIAL RI / Pudji Tri Rahadi, S.H.	PEMBERITAHUAN Uraian Singkat : Laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan	Tembusan (Arsip)

5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Secara umum, dari keseluruhan data yang telah dilaporkan dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan baik ditingkat Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2016 yang berhubungan dengan administrasi perkara maupun yang berhubungan dengan administrasi umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Adapun kendala tersebut adalah tidak seimbangnya antara Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti dengan tenaga staf dan tidak meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), serta masih kurang memadainya sarana prasarana sehingga menjadi kendala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan.

REKOMENDASI

Sesuai yang telah disebutkan dalam bagian kesimpulan, maka perlu diadakan analisis tentang volume perkara dengan proporsi Hakim dan Panitera Pengganti serta tenaga staf yang ada di dalam promosi dan mutasi dan rekrutmennya. Selain itu juga perlu diadakannya pembinaan Sumber Daya Manusia yang ada. Demikian pula dengan tenaga-tenaga staf administrasi lainnya agar diisi juga oleh tenaga-tenaga yang terampil dan cakap untuk melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Demikian pula Sumber Daya Manusia yang cukup handal tidak akan berarti tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, untuk itu perlu juga untuk dipenuhi sarana dan prasarana yang memadai.

Selanjutnya untuk menghasilkan output yang lebih baik dari Lembaga Peradilan, maka sedang dijalankan program Akreditasi dan diharapkan akan adanya pembenahan dan sosialisasi tentang peraturan yang berlaku di lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan tujuan pokok dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH,



H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.

NIP. 19540314 198403 1 010